

**PEMBERITAAN MEDIA MASSA TENTANG AKSI DAMAI 4
NOVEMBER 2016 DI JAKARTA**

(Analisis Framing Surat Kabar Kompas dan Republika)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Memenuhi Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Oleh:

AnimMunifah

131211096

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (Lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
D. Semarang

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara

Nama	Anim Murifah
NIM	151211096
Fakultas	Dakwah dan Komunikasi
Jurusan	Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul	PEMBERITAAN MEDIA MASSA TENTANG AKSI DAMAI 4 NOVEMBER 2016 DI JAKARTA (Analisis Framing Surat Kabar Kompas dan Republik)

Dengan ini kami setuju dan mohon agar segera diujikan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 Desember 2017

Pembimbing,

Bidang Metodologi dan Analisis

Bidang Substansi Materi



Dr. Hj. Siti Sholikhati, M.A.

NIP. 19631017 199103 2 001



Asep M. Ag. Abdullah, M.Ag.

NIP. 19730114 200604 1 014

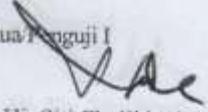
PENGESAHAN
SKRIPSI
PEMBERITAAN MEDIA MASSA TENTANG AKSI DAMAI 4 NOVEMBER DI
JAKARTA
(Analisis Framing Surat Kabar Kompas dan Republika)

Disusun Oleh:
Anim Munifah
131211050

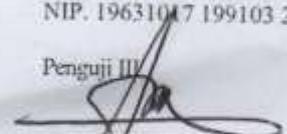
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 17 Januari 2018 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

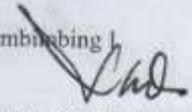
Ketua Penguji I


Dr. Hj. Siti Sholikhati, M.A.
NIP. 19631017 199103 2 001

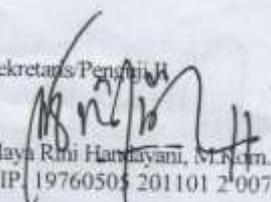
Penguji III


Drs. H. Ahmad Anas, M.Ag.
NIP. 19660513 199303 1 002

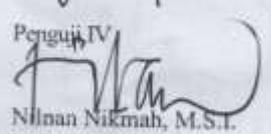
Pembimbing I


Dr. Hj. Siti Sholikhati, M.A.
NIP. 19631017 199103 2 001

Sekretaris Dewan Penguji

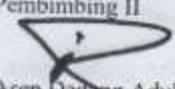

Maya Rini Handayani, M.Si.
NIP. 19760505 201101 2 007

Penguji IV


Nilnan Nikmah, M.Si.
NIP. 19800202 200901 2 003

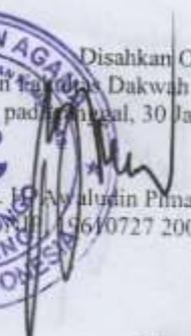
Mengetahui

Pembimbing II


Asep Dading Adullah, M.Ag.
NIP. 19730114 200604 1 014



Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
pada tanggal, 30 Januari 2018


H. Ayuludin Pimay, Lc., M.Ag.
19640727 200003 1 001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Samarang, 22 Desember 2017



Anim Munifah

NIM: 131211096

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji serta syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan rahman, rahim dan maunahnya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sehingga bisa berjalan lancar hingga akhir. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi agung Muhammad SAW, kepada keluarganya serta para sahabatnya.

Penyusunan skripsi merupakan tugas akhir dan syarat kelulusan dalam menyelesaikan studi di Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Awaludin Pimay, Lc. M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Siti Sholihati, MA. Selaku Ketua Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam UIN Walisongo Semarang sekaligus menjadi pembimbing I, dengan kesabarannya telah memberikan pengarahan dan bimbingan terbaik kepada penulis. *Jazakillahi khoir..*
4. Bapak Asep Dadang Abdullah, M.Ag. selaku pembimbing II sekaligus Wali Dosen, dengan kesabarannya pula telah mengajarkan tentang semangat dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi penulis, serta senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis. Terimakasih atas bimbingan dan nasehatnya. *Jazakallah khair.*
5. Para dosen dan Staf Karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah UIN Walisongo Semarang.

6. Bapak Ismail dan Ibu Warisah, orang tua yang tidak pernah lupa mendoakan anak-anaknya untuk kesuksesan dunia dan akhirat. Orang tua yang selalu mengajarkan arti penting sebuah perjuangan dan kesederhanaan. terima kasih atas kasih sayang dan doa yang kalian berikan. Semoga ini menjadi kebanggaan kalian.
7. Seluruh musyrifah dan saudariku dalam dakwah, terimakasih atas doa, semangat, dan dukungannya. Semoga kita selalu istiqomah di jalan dakwah sampai datangnya cahaya Islam kembali.
8. Teman-teman seperjuangan melewati jalan yang berliku untuk meraih gelar sarjana, teman-teman KPI C angkatan 2013 khususnya jurusan konsentrasi penerbitan. Ingatlah perjuangan kita ini, dan ceritakanlah kepada anak-anak kita nanti.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Teriring doa dan harapan semoga amal baik dan jasa dari semua pihak tersebut di atas akan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Penulis menyadari masih adanya ketidak sempurnaan dalam skripsi ini, maka dari itu kritik dan saran yang membangun akan diterima demi penyempurnaan yang diperlukan.

Semarang, 22 Desember 2017

Penulis

Anim Munifah

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'aalamiin....

Teriring besarnya rasa syukur, doa dan harapan yang tak akan pernah terputus

Kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang...

Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta (Bapak Ismail dan Ibu Warisah) yang selalu mendukung dan mendoakan setiap langkah yang penulis ambil.
2. Adik dan keponakanku yang membuat betah di rumah terimakasih untuk canda dan tawa kalian.
3. Pak lek dan bu lek yang selalu antusias saat aku pulang.

Semoga Allah selalu memberikan maunah-Nya dan mempererat ikatan keluarga ini, Aamiin...

Motto

“Barang Siapa Menolong Agama Allah, Maka Allah Akan menolongnya”

“Setelah Kesulitan Pasti Ada Kemudahan”

“Allah Tidak Akan Menguji Hambanya di Luar Batas Kemampuannya”

ABSTRAK

Nama: Anim Munifah, NIM: 131211096, Judul Skripsi: PEMBERITAAN MEDIA MASSA TENTANG PERISTIWA AKSI 4 NOVEMBER 2016 DI JAKARTA (Analisis Framing Surat Kabar Kompas dan Republika).

Media massa sebagai salah satu alat yang digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi kepada khalayak, dapat digunakan untuk mempengaruhi bahkan mampu merubah pola pikir masyarakat (pembaca) dengan apa yang diberitakan atau disampaikan oleh media massa. Terbukti beberapa peristiwa di akhir tahun 2016 yang cukup menyita perhatian masyarakat Indonesia. Media cetak maupun elektronik memberitakan kejadian demi kejadian sehingga menjadi perbincangan hangat di berbagai penjuru daerah.

Misalnya, Aksi 4 November 2016 merupakan bagian dari peristiwa akhir tahun yang banyak menyita perhatian media sekaligus masyarakat. Semua media ingin menghasilkan berita yang aktual dan terpercaya bagi masyarakat yang tak luput dengan kecenderungan yang dimilikinya. Salah satunya Surat Kabar Kompas (SKH) dan Republika yang sama-sama memberitakan peristiwa aksi damai yang diadakan di Jakarta tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti sebuah kecenderungan media dalam proses memberitakan sebuah peristiwa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan framing model Zongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yang mengemukakan bahwa perangkat framing terdiri empat struktur, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retorik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompas lebih netral dalam memberitakan mengenai aksi damai 4-11. Dalam pemberitaannya, Kompas lebih menekankan dan menitik beratkan upaya-upaya pemerintah khususnya langkah-langkah Presiden Joko Widodo dalam meredam ketegangan dampak dari aksi 4 November. Adapun Republika, yang memiliki komitmen tinggi terhadap Islam cenderung melihat peristiwa Aksi Damai 4 November 2016 sebagai aksi bermartabat dan tidak merupakan aksi SARA, yang murni merupakan aksi aspirasi umat Muslim Indonesia yang membela agamanya. Sehingga Republika menamainya sebagai aksi “Bela Islam” dan menempatkan Basuki sebagai orang yang terbukti telah melakukan penistiaan agama yang harus dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Berita yang dihadirkan oleh Republika, semuanya merupakan berita yang bersifat *indepth* dan selalu menjadi *headline*.

Adapun dalam menekankan fakta, Kompas dan Republika sama-sama sering menghadirkan foto sebagai pelengkap berita. selain foto, Kompas dan Republika juga menggunakan elemen grafis dalam bentuk pemakaian huruf tebal pada setiap berita yang dihadirkan.

Key words: Media massa, Pemberitaan, *Framing*,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II : KAJIAN TENTANG MEDIA MASSA DAN KONSTRUKSI MEDIA	
A. MEDIA MASSA	16
1. Pengertian Media Massa.....	16
2. Karakteristik Media Massa.....	17
3. Fungsi Media Massa.....	18
B. SURAT KABAR.....	19
1. Pengertian Surat Kabar.....	19
2. Karakteristik Surat Kabar	20
3. Fungsi Surat Kabar	21
C. PEMBERITAAN.....	21
1. Pengertian Berita	21
2. Pengertian Pemberitaan.....	22
3. Dasar Pemberitaan.....	26
4. Fungsi Pemberitaan	27
5. Proses Pembentukan dan Produksi Proses	27
6. Berita Dilihat Dari Paradigma Konstruksionis.....	30

	7. Analisis Framing	34
	8. Islam dan perdamaian.....	41
BAB III:	GAMBARAN UMUM KOMPAS DAN REPUBLIKA SERTA BERITA AKSI DAMAI 4 NOVEMBER 2016 DI JAKARTA	
	A. Profil Kompas dan Republika	44
	B. Data Berita Aksi Damai 4 November 2016 di SKH Kompas	51
	C. Data Berita Aksi Damai 4 November 2016 di SKH Republika	58
BAB IV:	ANALISIS FRAMING TERHADAP TEKS PERISTIWA AKSI DAMAI 4 NOVEMBER 2016 DI HARIAN KOMPAS DAN REPUBLIKA	
	A. Analisis Framing Pemberitaan Peristiwa Aksi Damai 4 November 2016 Kompas.....	63
	1. Berita tanggal 1 November 2016.....	63
	2. Berita tanggal 2 November 2016.....	67
	3. Berita tanggal 3 November 2016.....	69
	4. Berita tanggal 4 November 2016.....	71
	5. Berita tanggal 5 November 2016.....	73
	6. Berita tanggal 6 November 2016.....	75
	7. Berita tanggal 7 November 2016.....	78
	8. Berita tanggal 8 November 2016.....	80
	9. Berita tanggal 9 November 2016.....	82
	10. Berita tanggal 10 November 2016.....	83
	B. Analisis Framing Pemberitaan Peristiwa Aksi Damai 4 November 2016 Republika.....	85
	1. Berita tanggal 1 November 2016	85
	2. Berita tanggal 2 November 2016	87
	3. Berita tanggal 3 November 2016	89
	4. Berita tanggal 4 November 2016	91
	5. Berita tanggal 5 November 2016	94
	6. Berita tanggal 6 November 2016	96
	7. Berita tanggal 7 November 2016	98
	8. Berita tanggal 8 November 2016	100
	9. Berita tanggal 9 November 2016	102
	10. Berita tanggal 10 November 2016	103
	C. Kecenderungan Harian Kompas dan Republika Dalam Memberitakan Aksi Damai 4 November 2016 di Jakarta	105

BAB V:	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	113
	B. Saran.....	116
	C. Penutup	116
	D. Lampiran	10
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS		

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kerangka Framing Menurut Pan dan Kosicki.....	13
Tabel 2. Data Aksi Damai 4 November 2016 di SKH Kompas.....	53
Tabel 3. Data Aksi Damai 4 November 2016 di SKH Republika	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Kerangka Pikir Penelitian.....	14
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Media massa merupakan media yang diperuntukkan untuk massa. Dalam ilmu jurnalistik, media massa yang menyiarkan berita atau informasi disebut juga dengan istilah pers. Menurut Undang-Undang (UU) Pokok Pers pasal 1 ayat (1), pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis yang tersedia (Sudarman, 2008: 6).

Banyaknya peristiwa yang terjadi setiap hari, tentu membuat media massa memilah-milah peristiwa manakah yang akan dijadikan sebuah berita untuk dipublikasikan, dan mana yang tidak perlu dipublikasikan, mengingat tempat yang terbatas di media. Suatu peristiwa bisa dijadikan berita, jika peristiwa tersebut telah memenuhi unsur layak berita dan mengandung nilai berita (*news value*). Seperti mengandung konflik, keluarbiasaan, akibat, kekuatan (*magnitude*) sebuah peristiwa, dan kejutan.

Pemberitaan aksi damai 4 November 2016 atau lebih dikenal dengan aksi 4-11 adalah salah satu contoh peristiwa yang telah memenuhi unsur layak berita dan *news value*, seperti mengandung konflik, kejutan dan keluarbiasaan. Selain itu, peristiwa ini juga sempat menjadi sorotan masyarakat Indonesia bahkan luar negeri yang telah diberitakan secara massa, baik media massa cetak ataupun online. Diketahui, beberapa media asing seperti *The Guardian*, *Channel News Asia*, dan *Straits Times* juga ikut mengamati rencana aksi demonstrasi sejumlah ormas Islam tersebut. Adapun di media sosial, banyak pengguna yang berdebat mengenai aksi 4-11 ini. Misalnya, perdebatan para pengguna facebook

yang mengatakan, “Tuhan tidak perlu dibela.” Tidak hanya di facebook, media sosial twitter juga tidak ketinggalan ikut berkomentar. Salah satunya adalah akun twitter dengan nama @savicali, ia menulis, “Kasus Ahok ini hanyalah gunung es. Di bawahnya memang ada bongkahan sentimen yang telah mengendap. Lebih dari soal mulut Ahok dan ayat al-Maidah” (sumber <http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-38001552> diakses pada 4 Oktober 2017).

Aksi 4-11 di Jakarta adalah merupakan aksi puncak dari aksi-aksi sebelumnya yang telah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia, seperti, Solo, Cirebon, dan Sukabumi. Adapun di hari yang sama, jumat 4 November, beberapa kota di luar Jakarta juga ikut menggelar aksi yang sama pula. Seperti yang terjadi di Malang dan Semarang. Di Malang, sebanyak 10 ribu warga yang tergabung dalam Gerakan Aswaja Malang Raya (Gamal) melakukan aksi di depan Balai Kota Malang yang dilakukan secara damai. Sementara itu, di Semarang, sebanyak 700 orang mengikuti aksi damai Bela Qur’an ini. Mereka tergabung dalam Forum Muslim Semarang (Formis) yang di dalamnya terdiri dari beberapa elemen seperti HTI, KAMMI, IKADI, JPRMI serta unsur lainnya. Aksi dimulai dari Masjid Baiturrahman, Simpanglima, kemudian terpusat di depan kantor Gubernur/gedung DPRD Jawa Tengah (Republika, 5 November 2016).

Berbeda dengan aksi yang dilakukan di beberapa daerah, aksi puncak yang ada di Jakarta secara langsung dipimpin oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) di bawah pimpinan Ustadz Bachtiar Nasir dan Front Pembela Islam (FPI) di bawah pimpinan Habib Rizieq Shihab. Selain Ustadz Bachtiar Nasir, Habib Rizieq serta umat muslim Indonesia pada umumnya yang mengikuti aksi, aksi ini juga dikuti oleh beberapa tokoh seperti Mantan Ketua MPR Amien Rais, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon, serta penyanyi Ahmad Dhani dan Rhoma Irama. Aksi yang berpusat di kawasan antara Bundaran Hotel Indonesia, Bundaran Bank Indonesia dan

Istana Kepresidenan itu telah berubah menjadi “lautan putih” oleh peserta aksi (sumber https://id.wikipedia.org/wiki/Aksi_4_November diakses pada 4 Oktober 2017).

Adanya aksi 4-11 ini dikarenakan lambannya respon pemerintah dan kepolisian dalam mengusut laporan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Selain itu, para pimpinan aksi menyebut aksi 4-11 tersebut sebagai jihad konstitusional, yang memiliki arti aksi penegakan hukum, bukan SARA, ataupun aksi politik Pilkada. Tidak cukup di situ, pemberitaan mengenai aksi ini juga muncul banyak spekulasi yang menghiiasi peristiwa aksi dan menjadi “lahan basah” bagi media. Diantaranya, aksi dengan jumlah massa kurang lebih sebanyak dua juta orang, tuduhan adanya kepentingan politik di balik aksi, kunjungan presiden ke beberapa tokoh politik dan para ulama. Pemberitaan aksi 4-11 telah menghiiasi media massa salah satunya di Surat Kabar Harian Kompas dan Republika dengan *headline* yang berbeda dan bervariasi (sumber <http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-38001552> diakses pada 25 April 2017).

Diketahui, bahwa Kompas dan Republika merupakan surat kabar nasional yang telah memiliki pembaca di seluruh negeri ini. Kompas didirikan oleh yayasan Katolik yang memiliki ideologi humanisme, sedangkan Republika didirikan oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), dan merepresentasikan dirinya sebagai surat kabar Islam dengan ideologi kebangsaan, kerakyatan dan keislamaan. Selain itu, perbedaan sejarah dan visi misi kedua media cetak ini pasti memiliki ideologi yang berbeda dalam mengkonstruksi berita. Dengan adanya perbedaan ideologi tersebut, tentunya dalam pengemasan pemberitaan aksi damai 4-11 akan berbeda sehingga menarik untuk diteliti (Hamad, 2004: 114-120).

Harian Republika edisi Sabtu 5 November 2016 ditulis dengan *headline* “Aksi Bermartabat” sedangkan pada *lead* berita dituliskan: Aksi

umat Islam yang menuntut penyelesaian kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta berjalan damai dan tertib hingga tenggat yang disepakati, yaitu pukul 18.WIB (Republika, 5 November 2016). Berbeda dengan Republika, Kompas menulis dengan *headline* “Presiden: Aktor Politik Menunggangi Unjuk Rasa.” Yang diambil dari kutipan Presiden Jokowi pada paragraf ke tiga “Dan (kerusuhan) ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi.” (Kompas, 5 November 2016).

Mengingat media sebagai sarana informasi publik, maka media massa juga mempunyai sudut pandang atau *frame* pemberitaan yang berbeda-beda oleh media satu dengan media lainnya. Realitas pemberitaan media dalam hal ini bukanlah murni realitas, melainkan telah melalui berbagai proses. Sehingga seringkali kita bertanya-tanya, mengapa ada sisi yang ditonjolkan sementara sisi yang lain tidak? Mengapa bagian ini diberi penekanan sementara bagian yang lain tidak diberi penekanan? Semua pertanyaan tersebut mengarah pada konsep yang disebut *framing*. Pertanyaan tersebut menunjukkan apa yang diliput dan apa yang luput dari pemberitaan (Eriyanto, 2002: 27).

Selain itu, pekerjaan media pada hakikatnya adalah mengkonstruksi realitas. Disebabkan sifat dan faktanya bahwa pekerjaan media massa adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, maka isi seluruh media adalah realitas yang dikonstruksi. Pembuatan berita di media massa sebenarnya tidak lebih dari penyusunan realitas-realitas hingga terbentuk sebuah “cerita” (Sobur, 2006: 88).

Berdasarkan uraian tersebut, menarik bagi peneliti untuk menganalisa bagaimana SKH Kompas dan Republika menyajikan berita tentang aksi damai 4 November ini dengan menggunakan analisis *framing*.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana kecenderungan Surat Kabar Harian Kompas dan Republika dalam memberitakan peristiwa aksi damai 4 November 2016 di Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kecenderungan Surat Kabar Harian Kompas dan Republika tentang peristiwa aksi damai 4 November 2016 di Jakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian tersebut diharapkan memperoleh manfaat, baik secara teoritik maupun praktik antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang media massa khususnya media cetak, serta menambah khasanah keilmuan bagi Fakultas Dakwah dan Komunikasi terutama yang mengambil konsentrasi penerbitan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan baru kepada mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) terkait pemberitaan suatu media massa. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan studi komparatif atau studi lanjutan bagi pihak-pihak yang ingin mendalami lebih jauh tentang permasalahan yang berkaitan dengan fokus penelitian.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berguna untuk menguji keaslian penelitian dan membuktikan bahwa penelitian ini belum dilakukan oleh peneliti lainnya. Adapun Beberapa judul penelitian yang digunakan penulis sebagai

rujukan dalam penulisan penelitian ini adalah: Tinjauan pustaka berguna untuk menguji keaslian penelitian dan membuktikan bahwa penelitian ini belum dilakukan oleh peneliti lainnya. Adapun Beberapa judul penelitian yang digunakan penulis sebagai rujukan dalam penulisan penelitian ini adalah:

Pertama, penelitian Fitriyani (2009) dengan judul “Pemberitaan Tentang Jamaah Ahmadiyah di Media Massa (Analisis *Framing* Harian Suara Merdeka dan Republika). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan harian Suara Merdeka dan Republika dalam memberitakan jamaah Ahmadiyah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *framing* yang dikemukakan oleh Zong Dan Pan dan Gerald M Kosicki. Adapun hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Harian Suara Merdeka sebagai koran nasionalis mencoba memberitakan kasus Jamaah Ahmadiyah dengan sikap cenderung netral yaitu memberikan berita-berita yang berimbang, serta menginformasikan berita dengan narasumber baik pihak pemerintah berkaitan dengan keluarnya SKB dan juga menginformasikan kondisi psikologis pihak Ahmadiyah yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan terhadap jamaah tersebut. sedangkan Republika sebagai koran yang memiliki visi keislaman cenderung kontra dengan jamaah Ahmadiyah sebagai aliran yang menyimpang, dan penyimpangan tersebut sebagai sesuatu yang harus diluruskan. Republika juga mengambil kutipan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menegaskan bahwa SKB Ahmadiyah akan mencegah konflik.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani ini terdapat kemiripan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis *framing* model Pan dan Kosicki. Adapun perbedaannya terletak pada isu yang diangkat, yaitu tentang aliran Ahmadiyah dan sumber data yang digunakan. Fitriyani menggunakan Suara Merdeka dan Kompas sedangkan peneliti menggunakan Kompas dan Republika. Adapun isu yang diangkat dalam

penelitian yang saya lakukan adalah mengenai aksi damai 4 November di Jakarta.

Kedua, penelitian Noor Zaidah (2006) dengan judul “Analisis *Framing* Terhadap Pemberitaan Muktamar ke- 31 Nahdlatul Ulama di Surat Kabar Suara Merdeka.” Penelitian ini bertujuan untuk menjawab mengenai kecenderungan Surat Kabar Suara Merdeka terhadap pemberitaan Muktamar ke-31 Nahdlatul Ulama edisi November-Desember 2004 serta bagaimana pemberitaan itu dilihat dari perspektif dakwah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah framing model Pan dan Kosicki.

Hasil dari penelitian ini pertama, Suara Merdeka cenderung melihat Muktamar ke-31 sebagai bentuk demokrasi warga NU untuk memilih Rais Aam dan Ketua Umum PBNU setiap lima tahun sekali. Di sini Suara Merdeka mengemas beritanya cenderung memihak poros Lirboyo. Kedua, jika dilihat dari perspektif dakwah, pemberitaan Suara Merdeka belum memenuhi kode etik jurnalistik Islami.

Perbedaan antara penelitian yang akan saya lakukan dengan penelitian Noor Zaidah ini adalah, Noor Zaidah terletak pada kasus yang diteliti dan sumber data penelitian. Noor Zaidah meneliti tentang Muktamar ke-31 Nahdlatul Ulama yang ada di Surat Kabar Suara Merdeka, sedangkan peneliti meneliti tentang peristiwa aksi damai 4 November di Jakarta yang ada di Surat Kabar Kompas dan Republika. Dalam penelitian ini juga memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis *framing* model Pan dan Kosicki.

Ketiga, penelitian Panca Okta Hutabrina (2009) dengan judul “Insiden Monas Dalam Bingkai Media” (Analisis *Framing* Terhadap Berita Seputar Insiden Monas, 1 Juni 2008 di Harian Kompas dan Republika Periode 2-8 Juni 2008). Penelitian tersebut bertujuan untuk

mengetahui bingkai yang terbentuk dalam berita-berita mengenai Insiden Monas pada Harian Kompas dan Republika.

Hasil akhir dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kompas dan Republika memiliki kecenderungan keberpihakan yang berbeda dalam memberitakan insiden Monas. Kompas memaknai insiden Monas sebagai aksi kekerasan yang menciderai kebhinekaan. Kompas secara implisit berusaha menampilkan pemberitaan yang kecenderungan keberpihakan yang mengarah pada penentangan terhadap aksi kekerasan yang dilakukan FPI. Hal itu dilakukan dengan menghadirkan pendapat narasumber yang menentang dan mengecam kekerasan FPI. Sedangkan Republikamemaknainya sebagai masalah negara yang lamban menyelesaikan Ahmadiyah. Republika secara implisit mencoba menghadirkan berita yang memiliki tendensi terhadap pembubaran Ahmadiyah. Tampilan beritanya berupa paparan pendapat para ulama dan tokoh agama yang mendesak pemerintah untuk segera membubarkan Ahmadiyah.

Penelitian yang dilakukan oleh Panca Okta memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama-sama menggunakan Harian Kompas dan Republika sebagai sumber data penelitiannya. dan menggunakan analisis *framing* model Pan Kosicki sebagai pendekatan analisisnya. Adapun perbedaannya adalah berkaitan dengan isu yang dijadikan bahan penelitian, Panca Okta meneliti tentang seputar insiden Monas, sedangkan peneliti meneliti tentang peristiwa aksi damai 4 November 2016 di Jakarta.

Keempat, penelitian Anik Sarifah (2015) dengan judul "*Framing* Pemberitaan Kongres Umat Islam Indonesia ke VI pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika edisi Februari 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembingkai yang dilakukan oleh SKH Kompas dan Republika ketika menonjolkan dan mengemas informasi seputar peristiwa Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VI. kesimpulan dari penelitian ini adalah Harian Kompas dan Republika

sama-sama memberitakan peristiwa yang sama namun berbeda dalam pelaporannya. Harian Kompas mengemas berita tentang KUII VI sebagai masalah politik, ekonomi, dan budaya umat Islam. Berbeda dengan Republika mengemas berita seputar KUII VI tersebut lebih kepada sisi keislamannya.

Perbedaan antara penelitian Anik Sarifah dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah mengenai tentang peristiwa yang diteliti. Anik sarifah meneliti seputar Kongres Umat Islam Indonesia ke VI sedangkan saya meneliti tentang peristiwa aksi damai 4 November 2016 di Jakarta. Adapun persamaannya adalah sama-sama menggunakan analisis *framing* model Pan dan Kosicki.

Kelima, penelitian Sholeh (2017) dengan judul “Analisis *Framing* Pemberitaan Kasus Haji Via Filipina di Surat Kabar Suara Merdeka Edisi Agustus-September 2016.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembingkai dan kecenderungan Suara Merdeka dalam pemberitaan kasus haji via Filipina. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Suara Merdeka dalam membingkai kasus tersebut menggunakan gaya penulisan piramida terbalik, hal ini digunakan untuk memudahkan pembaca mengetahui intisari berita. adapun berita yang ditampilkan Suara Merdeka juga sering menampilkan foto narasumber sebagai penekanan fakta. Hal ini dilakukan supaya kesan yang diterima pembaca berita ini shahih karena narasumbernya kompeten. Selain foto, Suara Merdeka juga menggunakan grafis dalam bentuk pemakaian huruf tebal dengan tujuan pembaca menaruh perhatian lebih pada bagian tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Sholeh memiliki unsur kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama-sama menggunakan analisis *Framing* model Pan dan Kosicki sebagai pendekatan analisisnya. Adapun perbedaannya adalah berkaitan dengan isu yang dijadikan bahan penelitian, Sholeh meneliti kasus haji via Filipina sedangkan peneliti meneliti tentang aksi damai 4 November.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak (Sugiyono, 2012: 9).

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *Framing* yang dikembangkan oleh Zongdang Pan dan Gerald M Kosicki. Alasan peneliti memilih *framing* model Zongdang Pan dan Gerald Kosicki karena model ini paling populer dan banyak dipakai dibandingkan dengan model *framing* yang lainnya. selain itu, dengan analisis ini dapat digunakan untuk mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. Semua itu bisa dilihat dari pemakaian kata atau kalimat tertentu, kutipan narasumber, foto, *caption* pada foto, dan lainnya yang mana semua saling berhubungan yang memiliki makna. *Framing* merupakan pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi dan menulis berita. (Eriyanto, 2002:68).

2. Definisi Konseptual

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui kecenderungan SKH Kompas dan Republika tentang peristiwa aksi damai 4 November 2016 di Jakarta dengan menggunakan analisis *framing* model Zongdang Pan dan Gerald M Kosicki. Oleh karena itu, penulis hanya akan menjelaskan tentang berita/informasi yang berkaitan dengan peristiwa aksi 4 November. Dalam praktek jurnalistik para pakar memberikan pedoman menulis berita dengan menggunakan formula (rumusan) 5W+1H (*what, why, when, where, who, how*). Berita di atas sering disebut sebagai berita langsung (*straight news*) (Barus, 2010: 36).

Dengan demikian, penelitian ini akan difokuskan pada pemberitaan yang ada dalam media khususnya media yang berbentuk koran harian, yaitu harian Kompas dan Republika. Untuk membatasi keanekaragaman pemberitaan yang terdapat di halaman-halaman surat kabar maka peneliti hanya meneliti berita atau informasi yang berupa laporan fakta yang faktual. Sebagaimana didefinisikan oleh WilliardC. Bleyer yaitu suatu yang aktual yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar, karena ia dapat menarik pembaca tersebut. Adapun obyek yang akan diteliti adalah berita mengenai aksi damai 4 November di Jakarta 2016 dengan menggunakan analisis *framing* model Zongdang Pan dan Gerald Konsicki.

3. Sumber dan Jenis Data

Penulis menggunakan data primer dalam penelitian ini. Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan penulis langsung dari sumber utama. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari harian Kompas dan Republika dalam kurun waktu Bulan November 2016. Alasan mengapa rentang waktu ini yang penulis pilih adalah karena aksi damai umat muslim Indonesia dilaksanakan pada tanggal 4 November 2016, sehingga pemberitaan yang penulis teliti dalam kurun waktu November berarti pemberitaan sebelum dan sesudah aksi damai 4 November dilaksanakan. Data primer dalam penelitian ini adalah berita mengenai peristiwa aksi 4-11 di Jakarta dalam Surat Kabar Republika mulai tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sedangkan Kompas mulai tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 November 2016.

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006:231) Penulis mendokumentasikan berita dalam Surat Kabar Harian Kompas dan Republika pada edisi bulan

Nopember 2016. Data-data tersebut tidak hanya penulis kumpulkan tetapi juga penulis olah sesuai dengan metodologi analisis *framing* yang digunakan. Data yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah data primer yang telah disebutkan di atas.

b. Teknik Analisis Data

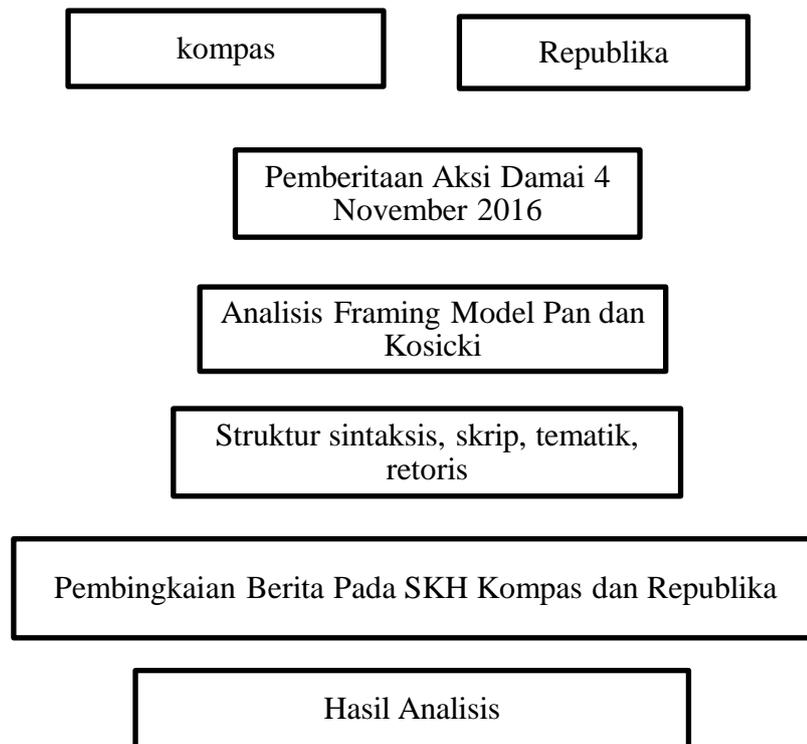
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, meyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2012: 244). Selanjutnya secara sistematis akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan data yang telah diperoleh dari hasil mengumpulkan berita mengenai peristiwa aksi damai 4 November 2016 di Jakarta yang ada di Surat Kabar Harian Kompas dan Republika
- b) Menyusun data yang diperoleh sesuai urutan tanggal dan edisi surat kabar

Menganalisis data dengan menggunakan framing model Pan dan Kosicki melalui empat struktur besar yaitu *Pertama*, struktur sintaksis, adalah cara wartawan menyusun berita. struktur ini dapat diamati melalui *lead*, latar,*headline*, informasi, kutipan, sumber pernyataan dan penutup. *Kedua*, struktur skrip adalah cara wartawan mengisahkan fakta. Struktur ini memfokuskan perangkat framing pada kelengkapan berita 5W+1H. *Ketiga*, struktur tematik, cara wartawan menulis fakta. Struktur ini dapat diamati melalui paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat. *Keempat*, struktur retorik, cara wartawan menekankan fakta. Struktur ini dapat diamati melalui kata, idiom, gambar dan grafik. Agar mudah

dipahami, penulis membuat skema pemikiran dalam penelitian ini tergambar dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 1. Skema Kerangka Pikiran



Tabel 1

Kerangka Framing Menurut Pan dan Kosicki
Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media

No	Struktur	Perangkat Framing	Unityang diamati
1.	SINTAKSIS Cara wartawan menyusun fakta	1. Skema Berita	<i>Headline, lead,</i> latar informasi, kutipan, sumber, pernyataan, penutup

2.	SKRIP Cara wartawan mengisahkan fakta	2. Kelengkapan Berita	5W+ 1H
3.	TEMATIK Cara wartawan menulis fakta	3. Detail 4. Kohorensi 5. Bentuk Kalimat 6. Kata Ganti	Paragraf, Proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat.
4.	RETORIS Cara wartawan menekankan fakta	7. Leksikon 8. Grafis 9. Metafora	Kata, idiom, gambar/foto, grafik.

(Eriyanto, 2002: 256).

G. Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini sistematis, penulis akan membagi penelitian ini menjadi lima bab. Setiap bab mempresentasikan isi dimana satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Dengan begitu akan tergambar secara jelas kemana arah dan tujuan penelitian ini. Sistematika skripsi ini yakni sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pokok bahasan dalam bab ini adalah: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN TENTANG MEDIA MASSA DAN KONSTRUKSI MEDIA

Pokok dalam bab ini media massa meliputi: pengertian media massa, karakteristik media massa, fungsi media massa, suat kabar, berita, pemberitaan, teks berita dalam pandangan konstruksionis, framing.

BAB III: GAMBARAN UMUM KOMPAS DAN REPUBLIKA SERTA BERITA AKSI DAMAI 4 NOVEMBER 2016 DI JAKARTA

Pokok bahasan dalam bab ini meliputi: profil Surat Kabar Harian Kompas dan Republika, obyek penelitian ini meliputi sejarah, visi misi dan gambaran umum pemberitaan Surat Kabar Harian Kompas dan Republika tentang Aksi Damai 4 Nopember 2016 di Jakarta.

BAB IV: ANALISIS TERHADAP PEMBERITAAN AKSI DAMAI 4 NOPEMBER 2016.

Bab ini berisi hasil penelitian yang meliputi: analisis *framing* pada Surat Kabar Harian Kompasa dan Republika, *frame* pemberitaan pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika mengenai pemberitan aksi damai 4 Nopember 2016.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Sedangkan saran berisi tentang tindak lanjut dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TENTANG MEDIA MASSA DAN KONSTRUKSI MEDIA

A. Media Massa

1. Pengertian Media Massa

Media massa adalah alat atau sarana yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak (penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan televisi (Cangara, 2002:134).

Istilah “media massa” memberikan gambaran mengenai alat komunikasi yang bekerja dalam berbagai skala, mulai dari skala terbatas hingga dapat mencapai dan melibatkan siapa saja dalam masyarakat dalam skala yang sangat luas. Istilah media massa mengacu kepada sejumlah media yang telah ada sejak puluhan tahun yang lalu tetap digunakan hingga saat ini seperti surat kabar, majalah, film, radio, televisi, dan internet (Morissan, 2014: 479).

Sedangkan definisi media massa menurut Bungin, media massa adalah institusi yang berperan sebagai *agent of change*, yaitu sebagai institusi pelopor perubahan (Bungin, 2008: 85).

Sebagai suatu alat untuk menyampaikan berita, penilaian, atau gambaran umum tentang banyak hal, ia mempunyai banyak kemampuan untuk berperan sebagai institusi yang dapat membentuk opini publik, antara lain, karena media juga dapat berkembang menjadi kelompok penekan atas suatu ide atau gagasan, dan bshkan suatu kepentingan atau citra yang ia representasikan untuk diletakkan dalam konteks kehidupan yang lebih empiris. Sehubungan dengan hal tersebut, sebenarnya media berada pada dua posisi, dalam pengertian bahwa ia dapat memberikan pengaruh-pengaruh “positif” maupun “negatif” (Sobur, 2012: 31).

2. Karakteristik Media Massa

Untuk suksesnya komunikasi menggunakan media massa, perlu diketahui karakteristik berkomunikasi dengan media massa. Ciri komunikasi massa itu, meliputi sifat-sifat unsur yang mencakupnya. Karakteristik itu dijabarkan Uchjana (1995: 35) sebagai berikut:

- a) Sifat komunikator, karena media massa adalah lembaga atau organisasi, maka komunikator dalam media massa seperti wartawan, sutradara, penyiar radio, tv, adalah komunikator terlembagakan. Media massa merupakan organisasi kompleks. Pesan-pesan yang sampai kepada khalayak adalah kerja hasil kolektif. Oleh karena itu, berhasil tidaknya komunikasi massa ditentukan berbagai faktor yang terdapat dalam organisasi media massa. Berita yang disusun oleh seorang wartawan, tidak akan sampai kepada pembaca kalau tidak dikerjakan oleh redaktur, *lay outer*, juru cetak dan karyawan lain dalam organisasi surat kabar tersebut.
- b) Sifat pesan, sifat pesan media massa lebih umum. Media massa adalah sarana menyampaikan pesan kepada khalayak bukan untuk sekelompok orang tertentu. Karena pesan komunikasi massa bersifat umum, maka lingkungannya menjadi universal, mengakui segala hal dan dari berbagai tempat. Sifat lain media massa adalah sejenak (*transient*), hanya sajian seketika.
- c) Sifat komunikan, komunikasi ditujukan kepada khalayak yang jumlahnya relatif besar anonim dan heterogen. Ciri khas dari komunikan komunikasi melalui media massa ini ialah *pertama* jumlah yang besar itu hanya dalam periode waktu yang sangat singkat saja. *Kedua*, komunikan massa sifatnya heterogen selain itu komunikator tidak tahu apa pesan yang disampaikan menarik perhatian atau tidak.
- d) Sifat media, sifat media massa adalah serempak cepat. Yang dimaksud dengan serempak yakni keserempakan kontak antara

komunikator dengan komunikan yang demikian besar jumlahnya. Selain itu sifat media massa adalah cepat. Artinya memungkinkan pesan yang disampaikan kepada begitu banyak orang dalam waktu yang cepat.

- e) Sifat efek, sifat komunikasi media massa yang timbul pada komunikan bergantung pada tujuan komunikasi yang dilakukan oleh komunikator. Apakah tujuannya agar komunikasi hanya sekedar menyampaikan informasi atau sampai tujuan untuk merubah perilaku dari komunikannya. Seorang komunikator akan membawa komunikan kemana arah dan tujuan dari media itu, baik yang sesuai dengan ideologi media itu atau bahkan sesuai dengan keadaan dan peta politik saat media itu menyajikan berita.

3. Fungsi dan Peran Media

Secara umum fungsi media massa (Sudarman, 2008: 7). adalah sebagai berikut:

- 1) Menginformasikan (*to inform*). Yakni bahwa media massa merupakan tempat untuk menginformasikan peristiwa-peristiwa atau hal-hal penting yang perlu diketahui oleh khalayak.
- 2) Mendidik (*to educate*), tulisan media massa dapat mengalihkan ilmu pengetahuan sehingga mendorong perkembangan intelektual, membentuk watak dan dapat meningkatkan keterampilan serta kemampuan yang dibutuhkan para pembacanya.
- 3) Menghibur, (*to Entertain*), media massa merupakan tempat yang dapat memberikan hiburan atau rasa senang kepada pembaca atau khalayaknya.
- 4) Memengaruhi (*to influence*), media massa dapat mempengaruhi pembacanya. Baik pengaruh yang bersifat pengetahuan (*cognitive*), perasaan (*affective*), maupun tingkah laku (*conative*).

5) Penghubung (*linkage*), media massa dapat menghubungkan unsur-unsur yang ada dalam masyarakat yang tidak bisa dilakukan secara perseorangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selain fungsi di atas, media massa juga memiliki peranan yang penting. Seperti yang disebutkan oleh Rahmadi (1990: 17) bahwa peran media massa adalah sebagai berikut:

a) Sebagai alat perubahan social dan pembaharuan masyarakat.

Di negara berkembang media massa lebih menunjuk pada peranan yang “membangun” yaitu untuk memberi informasi, mendidik dan menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan. Sebagai agen perubahan (*agent of change*) media massa berperan aktif sebagai pembangunan yang kreatif antara pemerintah dan masyarakat. selain itu media massa membantu mempercepat proses peralihan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern.

b) Sebagai pembentuk pendapat umum.

Media massa selain berperan sebagai alat perubahan sosial juga berperan dalam pembentuk pendapat umum. Pendapat umum atau *publicopinion* sangat penting bagi orang-orang politik praktis. Mereka biasanya menarik perhatian masyarakat dengan sering muncul di media. Melalui media massa pembentukan pendapat ini dapat dibentuk yang akan menjadi kekuatan dalam masyarakat. kekuatan ini dapat diarahkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu seperti apa yang diharapkan oleh perorangan atau kelompok.

B. Surat Kabar

1. Pengertian Surat Kabar

Surat kabar adalah kumpulan berita, artikel, cerita, iklan dan sebagainya yang dicetak dalam lembaran kertas fukuran plano, terbit secara teratur, bisa setiap hari atau seminggu satu kali (Djuroto, 2002:11).

2. Karakteristik Surat Kabar

Karakteristik surat kabar sebagai media massa mencakup: publisitas, perioditas, aktualitas, universalitas, dan terdokumentasikan (Ardianto dan Erdiana, 2004: 104-106).

- a. Publisitas atau *publicity* adalah penyebaran pada publik atau khalayak. Dengan demikian, semua aktivitas manusia yang menyangkut kepentingan umum dan atau menarik untuk umum adalah layak untuk disebarluaskan. Pesan-pesan melalui surat kabar harus memenuhi kriteria tersebut.
- b. Perioditas menunjuk pada keteraturan terbitnya, bisa harian, mingguan, atau dwi mingguan. Sifat perioditas sangat penting dimiliki media massa, khususnya surat kabar. Kebutuhan manusia akan informasi sama halnya dengan kebutuhan manusia akan makan, minum, dan pakaian. Setiap hari manusia selalu membutuhkan informasi. Bagi penerbit surat kabar, selama ada dana dan tenaga yang terampil, tidaklah sulit untuk menerbitkan surat kabar secara periodik.
- c. Aktualitas, menurut kata asalnya, berarti “kini” dan “keadaan sebenarnya” kedua istilah tersebut erat kaitannya dengan berita, karena definisi berita adalah laporan tercepat mengenai fakta-fakta atau opini yang penting atau menarik minat, atau kedua-duanya bagi sejumlah besar orang. Laporan tercepat menunjuk pada “kekinian” atau terbaru dan masih hangat. Fakta dan peristiwa penting atau menarik tiap hari berganti dan perlu untuk dilaporkan, karena khalayakpun memerlukan informasi yang paling baru. Hal ini dilakukan oleh surat kabar, karena surat kabar sebagian besar memuat berbagai jenis berita.
- d. Universalitas menunjuk pada kesemestaan isinya, yang beraneka ragam dan dari seluruh dunia. Dengan demikian atau isi surat kabar meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, seperti masalah sosial, ekonomi, budaya, agama, pendidikan, keamanan, dan lain-lain.

Selain itu, lingkup kegiatannya bersifat lokal, regional, nasional, bahkan internasional.

- e. Dari berbagai fakta yang disajikan surat kabar dalam bentuk berita atau artikel, dapat dipastikan ada beberapa diantaranya yang oleh pihak-pihak tertentu dianggap penting untuk diarsipkan atau dibuat kliping. Misalnya karena berita tersebut berkaitan dengan instansinya, atau artikel itu bermanfaat untuk menambah pengetahuannya. Kliping berita oleh sebuah instansi biasanya dilakukan oleh staf *public relations* untuk dipelajari dalam rangka menentukan kebijakan selanjutnya karena berita tersebut dianggap sebagai masukan dari masyarakat (*public eksternal*).

3. Fungsi Surat Kabar

Dari empat fungsi media massa (informasi, edukasi, hiburan, dan persuasif), fungsi yang paling menonjol pada surat kabar adalah informasi. Hal ini sesuai dengan tujuan utama khalayak membaca surat kabar, yaitu keingintahuan akan setiap peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Karenanya sebagian besar rubrik surat kabar terdiri dari berbagai jenis berita. Fungsi hiburan surat kabar pun tidak terabaikan karena tersedianya rubrik artikel ringan, *feature* (laporan perjalanan, laporan tentang profil seseorang yang unik), rubrik cerita bergambar atau komik, serta cerita bersambung. Begitu pula dengan fungsinya mendidik dan memengaruhi akan ditemukan pada artikel ilmiah, tajuk rencana atau editorial dan rubrik opini. Fungsi pers, khususnya surat kabar bertambah, yakni sebagai alat control sosial yang konstruktif (Ardianto dan Erdiana, 2004: 104).

C. Berita dan Pemberitaan

1. Berita

Berita berasal dari bahasa *Sansekerta*, yakni *Vrit* yang dalam bahasa Inggris disebut *Write*, arti sebenarnya ialah ada atau terjadi. sebagian ada yang menyebut dengan *Vritta*, artinya “kejadian” atau

“yang telah terjadi”. *Vritta* dalam bahasa Indonesia kemudian menjadi berita atau warta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia karya W.J.S Poerwadarminta “berita” berarti kabar atau warta, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka, arti berita diperjelas menjadi “laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat” (Totok Djuroto, 2004: 46).

Para ilmuwan, penulis dan pakar komunikasi memberikan defenisi yang berbeda-beda tentang istilah berita, diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Williard C. Bleyer berita adalah sesuatu yang berkala yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar, karena dia menarik minat atau mempunyai makna bagi pembaca surat kabar, atau karena dia dapat menarik para pembaca untuk membaca berita tersebut. (Sumadiria, 2014:64).

Berbeda dengan Williard, J.B. Wahyudi mendefinisikan berita adalah laporan tentang peristiwa atau pendapat yang memiliki nilai penting, menarik bagi sebagian khalayak, masih baru dan dipublikasikan secara periodik (Sudarman, 2008: 76).

Setelah merujuk pada beberapa definisi tersebut, meskipun berbeda-beda namun terdapat kesamaan yang mengikat pada berita, yaitu: menarik perhatian, luar biasa, dan termasa (baru). Karena itu dapat disimpulkan bahwa berita adalah laporan tercepat mengenai fakta, menarik perhatian banyak orang, termasa (baru) yang dipilih oleh wartawan untuk disebarakan melalui media berkala seperti surat kabar, televisi, radio dan media *online*.

2. Pemberitaan

Pemberitaan sebagaimana yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi keempat Departemen Pendidikan Nasional penerbitan adalah proses, cara, perbuatan memberitakan

(melaporkan, memaklumkan), perkabaran, maklumat (DEPDIKNAS: 2008: 179).

Pemberitaan atau bisa disebut sebagai reportase juga mempunyai makna melaporkan, memberi laporan dan memberitakan (Abdullah, 1992: 66). Reportase mencakup kegiatan meliput, mengumpulkan fakta-fakta tentang berbagai unsur berita, dari berbagai sumber atau narasumber kemudian menuliskannya dalam bentuk berita (Kuncoro, 2009: 66).

Pemberitaan berarti seolah melakukan pekerjaan, dengan demikian berarti pemberitaan adalah kegiatan untuk meliput suatu peristiwa yang terjadi, peristiwa tersebut identik sedang terjadi dan mempunyai rentang waktu yang lama. Setelah kegiatan ini diperlukan pengeditan tulisan dan gambar. Kegiatan tersebut diperlukan untuk mensinkronasikan tulisan dengan gambar berita yang sedang terjadi. Berita tidak terbentuk dengan sendirinya, namun berita terbentuk melalui proses aktif dari pembuat berita. peristiwa yang tidak beraturan dan kompleks disederhanakan dan dibuat bermakna oleh pembuat berita, yaitu wartawan.

Ruang pemberitaan tidak dipandang sebagai ruang hampa, karena banyak kepentingan yang dapat mempengaruhi media. Shomaker dan rasee, sebagaimana yang dikutip oleh Sudibyo (2001:7-13) bahwa ada lima faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pemberitaan diantaranya sebagai berikut: (a) Faktor individual, terdiri dari jenis kelamin, umur, dan agama (b) Faktor rutinitas media, terdiri dari mekanisme dan proses penentuan berita. (c) Faktor organisasi, terdiri dari struktur organisasi (d) faktor ekstra media, terdiri dari sumber berita, sumber penghasilan berita, pihak eksternal, lingkungan bisnis, dan ideologi.

Proses pemberitaan oleh wartawan menggunakan model untuk memahami peristiwa yang telah diliputnya. Model itu memasukkan

opini, sikap, prespektif, dan informasi lainnya. Menurut Van Dijk (dalam Eriyanto) ada beberapa strategi besar yang dilakukan.

- a. Seleksi, seleksi adalah strategi yang kompleks yang menunjukkan bagaimana sumber, peristiwa, informasi diseleksi oleh wartawan untuk ditampilkan ke dalam berita. keputusan untuk menggunakan satu sumber berita, lebih memilih wawancara dibandingkan konferensi pers adalah wacana yang dapat digunakan.
- b. Reproduksi, strategi seleksi berhubungan dengan pemilihan informasi apa yang dipilih untuk ditampilkan, reproduksi berhubungan dengan apakah informasi dikopi, digandakan, atau tidak dipakai sama sekali oleh wartawan. Ini terutama berhubungan dengan sumber berita atau *press release*.
- c. Penyimpulan, strategi besar dalam memproduksi berita yang berhubungan dengan mental kognisi wartawan adalah penyimpulan/peringkasannya informasi. Penyimpulan ini berhubungan dengan bagaimana realitas yang kompleks dipahami dan ditampilkan dengan ringkas.
- d. Transformasi lokal, penyimpulan berhubungan dengan pertanyaan bagaimana peristiwa yang kompleks disederhanakan dengan tampilan tertentu, transformasi lokal berhubungan dengan bagaimana peristiwa akan ditampilkan (Eriyanto, analisis wacana pengantar analisis teks media yogyakarta: PT. LkiS 2001: 269-270) Ada dua aspek penting dalam *framing* pemberitaan, Eriyanto (2002: 60-70) menjelaskan kedua aspek tersebut sebagai berikut:
 - a. Memilih fakta atau realitas. Proses pemilihan realitas ini didasarkan pada asumsi bahwasannya perspektif wartawan akan senantiasa mendampingi dan mempengaruhi proses pemilihan realitas berita. perspektif tersebut sangat menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut. karena dalam memilih fakta ini selalu terkandung dua kemungkinan: apa yang dipilih

(*included*) dan apa yang dibuang (*excluded*). Pendeknya, suatu peristiwa dilihat dari *angel* atau sisi tertentu. Oleh karenanya, realitas atau peristiwa yang sama sangat dimungkinkan dikonstruksikan secara berbeda oleh masing-masing media.

- b. Menuliskan fakta. Proses ini berkaitan dengan bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Gagasan itu diungkapkan dengan kata, kalimat dan proposisi apa, dengan bantuan aksentuasi foto dan gambar apa, dan sebagainya. Bagaimana fakta yang sudah dipilih tersebut ditekankan dengan pemakaian perangkat tertentu.

Seperti yang telah dikatakan oleh Mc. Quail dalam bukunya yang berjudul *MassCommunication Theory*, bahwa *framing* merupakan cara untuk memberikan penafsiran keseluruhan untuk mengisolasi fakta. Hal ini lah yang hampir tidak dapat dihindari oleh jurnalis untuk melakukannya, memisahkannya dari objektivitas yang murni dan memperkenalkan beberapa bias karena ketika informasi dipasok kepada media berita oleh sumber (sering kali), maka informasi tersebut kemudian muncul dengan kerangka yang terbentuk yang sesuai dengan tujuan sumber dan tidak dapat murni objektif (Quail, 2011: 124).

Ada dua aspek penting dalam *framing* pemberitaan, Eriyanto (2002: 60-70) menjelaskan kedua aspek tersebut sebagai berikut:

- a. Memilih fakta atau realitas. Proses pemilihan realitas ini didasarkan pada asumsi bahwasannya perspektif wartawan akan senantiasa mendampingi dan mempengaruhi proses pemilihan realitas berita. perspektif tersebut sangat menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut. karena dalam memilih fakta ini selalu terkandung dua kemungkinan: apa yang dipilih (*included*) dan apa yang dibuang (*excluded*). Pendeknya, suatu peristiwa dilihat dari *angel* atau sisi tertentu. Oleh karenanya, realitas atau peristiwa

yang sama sangat dimungkinkan dikonstruksikan secara berbeda oleh masing-masing media.

- b. Menuliskan fakta. Proses ini berkaitan dengan bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Gagasan itu diungkapkan dengan kata, kalimat dan proposisi apa, dengan bantuan aksentuasi foto dan gambar apa, dan sebagainya. Bagaimana fakta yang sudah dipilih tersebut ditekankan dengan pemakaian perangkat tertentu.

3. Dasar Pemberitaan

Berita yang ditampilkan dari berbagai media tidak terlepas dari ketentuan atau hal-hal yang menjadi dasar pemberitaan. Dasar pemberitaan di Indonesia tersebut adalah, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Kode Etik Jurnalistik, dan *Code of Conduct*. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 itu berisi tentang pembatasan terhadap media pers dari hal-hal yang boleh dan tidak boleh diberitakan. Undang-Undang ini dijadikan sumber hukum tertulis. Media pers bisa dituntut secara hukum apabila melakukan pelanggaran.

Kode Etik membatasi para jurnalis atau wartawan tentang hal-hal baik dan tidak baik untuk diberitakan. Kode Etik ini dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi Wartawan. Sanksi bagi wartawan yang melanggar adalah sanksi moral, atau pemberian peringatan. *Code of Conduct* merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh media pers tertentu tentang apa yang boleh dan tidak boleh diberitakan. Ruang lingkup ini lebih sempit karena hanya diberlakukan untuk wartawan yang bekerja di media tersebut. sanksi bagi pelanggarnya ditentukan sendiri oleh media

pers yang mengeluarkan *Code of Conduct*. Misalnya, skorsing dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Undang-Undang Nomer 40 Tahun 1999, Kode Etik Jurnalistik, dan *Code of Conduct* itulah yang menjadi dasar pemberitaan di Indonesia (Cahya, 2012: 3-4).

4. Fungsi Pemberitaan

Pada hakikatnya, fungsi utama pemberitaan adalah untuk melaporkan atau memberi tahu sesuatu kepada khalayak. Memilih, mengolah, dan menerbitkan suatu berita adalah tugas media pers. Segala informasi yang diberitakan harus diperhitungkan nilai gunanya bagi kepentingan masyarakat.

Ada dua hal yang perlu diperhatikan media pers dalam memenuhi nilai guna atau manfaat bagi khalayak. *Pertama*, berita harus dapat dimanfaatkan sebagai pengetahuan umum. Pengetahuan bersifat dinamis, artinya bahwa pengetahuan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Untuk itu, kebutuhan akan pengetahuan tidak cukup berhenti pada saat tertentu. *Kedua*, berita harus dapat dimanfaatkan sebagai alat control sosial, politik, kesehatan, pendidikan, dan masih banyak lagi. Berita bukan hanya menyampaikan informasi-informasi yang menyenangkan, melainkan juga informasi yang tidak menyenangkan, atau sering disebut “berita buruk” (Cahya, 2012: 5-6).

5. Proses Pembentukan dan Produksi Berita

Secara sosiologis berita adalah semua yang terjadi di dunia, seperti yang dilukiskan oleh pakar jurnalistik, berita adalah apa yang ditulis surat kabar, apa yang disiarkan radio dan apa yang ditayangkan televisi. Berita menampilkan fakta, tetapi tidak semua fakta merupakan berita. berita biasanya menyangkut orang-orang tetapi tidak semua orang bisa dijadikan sebuah berita (Sumadiria, 2005: 63).

Menurut Fishman, sebagaimana dikutip oleh Eriyanto (2002: 100) terdapat dua kecenderungan dalam proses produksi berita dapat dilihat. *Pertama*, Seleksi Berita (*selectivity of news*) adalah proses seleksi berita meliputi seleksi berita dari wartawan di lapangan yang akan memilih mana yang penting dan mana yang tidak, mana peristiwa yang bisa diberitakan dan mana yang tidak. Setelah diseleksi, berita itu akan diberikan kepada redaktur, selanjutnya akan diseleksi lagi dan

disunting dengan menekankan bagian mana yang perlu dikurangi dan bagian mana yang perlu ditambah. *Kedua*, Pembentukan Berita (*From of News*) adalah dalam perspektif ini, peristiwa itu bukan diseleksi, melainkan sebaliknya, dibentuk. Wartawanlah yang membentuk berita. Berita merupakan laporan peristiwa yang merupakan hasil dari olahan wartawan dan redaktur, tidak murni sebuah fakta.

Tahap paling awal dari produksi berita adalah bagaimana wartawan mempersepsi peristiwa/fakta yang akan diliput. Wartawan menentukan batasan-batasan yang dianggap berita dan mana yang tidak.

Berita adalah hasil akhir dari proses kompleks dengan memilah-milah dan menentukan peristiwa, tema-tema tertentu dalam kategori tertentu. Menurut Eriyanto (2002: 102-111) dalam bukunya yang berjudul Analisis Framing, untuk mengetahui produksi berita diperlukan langkah-langkah dalam proses pembuatannya, antara lain sebagai berikut:

- a) Rutinitas Organisasi, proses seleksi dan penyortiran dan dilakukan dalam suatu rutinitas keredaksian yang merupakan suatu bentuk rutinitas organisasi. Setiap hari, institusi media secara teratur menyeleksi dan memproduksi berita, yang mana hal itu merupakan bagian dari ritme dan keteraturan kerja yang dijalankan setiap hari. Untuk mengefektifkan organisasi media, dibentuklah struktur organisasi dengan cara mengkategorisasikan peristiwa dalam kategori atau bidang tertentu. wartawan dibagi ke dalam beberapa departemen dan diklasifikasikan sebagai koresponden daerah, nasional dan sebagainya dengan tujuan agar menghasilkan laporan yang berhubungan dengan tugas masing-masing.
- b) Nilai berita, peristiwa tidak lantas dapat disebut sebagai berita, tetapi ia harus dinilai terlebih dahulu apakah peristiwa tersebut memenuhi kriteria nilai berita. nilai-nilai berita menentukan bukan hanya peristiwa apa saja yang akan diberitakan, melainkan juga bagaimana peristiwa tersebut dikemas. Nilai jurnalistik

menentukan bagaimana peristiwa didefinisikan. Ketika seorang wartawan mengatakan sebagai berita, peristiwa yang mempunyai ukuran-ukuran tertentu saja yang layak dan bisa disebut sebagai berita. ini adalah prosedur pertama dari bagaimana peristiwa dikonstruksi. Tidak semua aspek dari peristiwa dilaporkan, ia juga harus dinilai terlebih dahulu, bagian mana dari peristiwa yang memiliki nilai berita tinggi maka bagian itulah yang ditekankan untuk terus menerus dilaporkan. Nilai berita yang dimaksud tersebut antara lain: *Prominance, human interest, conflict, unusual, proximity.*

- c) Kategori berita, selain nilai berita, hal prinsip lain dari proses produksi berita adalah kategori berita. Secara umum, wartawan menggunakan lima kategori berita: *hard news, soft news, developing news,* dan *continuing news.* Kategori tersebut dipakai untuk membedakan jenis isi berita dan subjek peristiwa yang menjadi berita. menurut Tuchman sebagaimana yang dikutip oleh Eriyanto jenis berita tersebut dibedakan berdasarkan jenis peristiwanya. Wartawan memakai kategori berita tersebut untuk menggambarkan peristiwa yang akan digunakan sebagai berita. berdasarkan kategori tersebut, wartawan kemudian menentukan apa yang harus dilakukan, persiapan yang dibutuhkan untuk menghasilkan dan menangkap peristiwa tersebut. setiap kategori tersebut menentukan kontrol kerja: apa yang harus dilakukan, kapan pekerjaan itu selesai, dan bagaimana berita itu seharusnya ditulis.
- d) Ideologi profesional/objektivitas, jika nilai berita berhubungan dengan prosedur apa yang bisa disajikan oleh media kepada khalayak, maka standar profesional berhubungan dengan jaminan yang ditekankan kepada khalayak bahwa apa yang disajikan adalah suatu kebenaran. Objektivitas dalam proses produksi berita secara umum digambarkan tidak mencampuradukkan antara fakta dengan

opini. Berita adalah fakta, maka dalam proses pencarian berita (*news gathering*) dan penulisan berita sama sekali tidak boleh terdapat opini. Dalam proses produksi berita ada beberapa prosedur. Serangkaian prosedur harus dilakukan oleh wartawan agar apa yang ditulis dapat disebut sebagai objektif. Berbagai prosedur itu terinternalisasi dalam pikiran dan dipraktikkan dalam praktik produksi berita oleh wartawan. Menurut Tuchman dalam bukunya Eriyanto (2002: 115) ada empat strategi dasar dalam praktik produksi berita. *pertama*, menampilkan semua kemungkinan semua konflik yang muncul. *Kedua*, menampilkan fakta-fakta pendukung. *Ketiga*, pemakaian kutipan pendapat. *Keempat*, menyusun informasi dalam dalam tata urutan tertentu.

D. Teks Berita; Pandangan Konstruksionis

Analisis *framing* termasuk ke dalam paradigma konstruksionis. Paradigma ini mempunyai posisi dan pandangan tersendiri terhadap media dan teks berita yang dihasilkannya. Konsep konstruksionisme ini diperkenalkan oleh sosiolog interpretatif, Peter L. Berger bersama Thomas Luckman dalam Eriyanto (2002: 13).

Peter L. Berger bersama Thomas Lucman menjelaskan konstruksi realitas melalui "*The Social Construction of Reality, a Treatise in the Sociological of Knowledge*". Teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas terjadi secara simultan melalui tiga proses sosial, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi (Bungin, 2014, 206).

Pertama, eksternalisasi, yaitu usaha pencurahan atau ekspresi manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Hal ini menjadi sifat dasar yang dimiliki manusia, ia akan selalu mencurahkan diri ke tempat di mana ia berada. Kedua, objektivasi, yaitu hasil yang telah dicapai baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Lewat proses objektivasi ini, masyarakat menjadi suatu realitas yang suigeneris. Hasil dari eksternalisasi kebudayaan misalnya, manusia menciptakan alat demi kemudahan hidupnya, atau kebudayaan non-

materiil dalam bentuk bahasa, baik alat ataupun bahasa adalah kegiatan eksternalisasi manusia ketika berhadapan dengan dunia, ia adalah hasil dari kegiatan manusia, setelah dihasilkan, baik benda atau bahasa sebagai produk eksternalisasi tersebut menjadi realitas yang objektif. Ketiga, internalisasi, adalah proses kembalinya dunia objektif ke dalam kesadaran sedemiakan rupa sehingga subjektif manusia dipengaruhi oleh struktur sosial.

Bagi Berger, mengatakan sebagaimana Eriyanto (2002: 15) bahwa realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga sesuatu yang diturunkan tuhan. Tetapi sebaliknya, ia dibentuk dan dikonstruksi. Dengan pemahaman seperti ini, realitas berwajah ganda/plural. Setiap orang bisa mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas. Setiap orang mempunyai pengalaman, preferensi, pendidikan tertentu, dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu akan menafsirkan realitas sosial itu dengan konstruksinya masing-masing.

Pendekatan konstruksionis juga memiliki penilaian sendiri bagaimana media, wartawan, dan berita dilihat. Penilaian tersebut dijabarkan Eriyanto (2002: 19-35) sebagai berikut:

1. Fakta/peristiwa adalah hasil konstruksi. Bagi kaum konstruksionis, realitas itu bersifat subjektif. Realitas yang diberitakan media merupakan hasil konstruksi media (wartawan). Realitas tercipta lewat konstruksi dan sudut pandang tertentu dari wartawan. Realitas itu hadir, karena dikonstruksi oleh konsep subjektif wartawan.
2. Media adalah agen konstruksi. Dalam pandangan konstruksionis, media bukanlah sekedar saluran yang bebas. Media dilihat sebagai agen konstruksi pesan, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya. Media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas. Media membentuk realitas yang tersaji dalam pemberitaan.
3. Berita bukan refleksi dari realitas. Ia hanyalah hasil konstruksi dari realitas. Dalam pandangan konstruksionis, berita bukan

menggambarkan realitas, melainkan berita adalah hasil dari konstruksi sosial dimana selalu melibatkan pandangan, ideologi, dan nilai-nilai dari wartawan atau media. Berita sangat tergantung pada bagaimana fakta itu dipahami dan dimaknai sesuai dengan realitas.

4. Berita bersifat subyektif/konstruksi atas realitas. Pandangan konstruksionis memiliki penilaian yang berbeda dalam menilai objektivitas jurnalistik. Hasil karya jurnalistik tidak dapat diukur dengan sebuah standar yang rigid seperti halnya pandangan positivis. Hal ini dikarenakan berita adalah produk dari konstruksi dan pemaknaan atas realitas. Pemaknaan seseorang atas suatu realitas bisa jadi berbeda dengan orang lain, yang tentunya menghasilkan realitas yang berbeda pula.
5. Wartawan bukan pelapor melainkan agen konstruksi sosial. Dalam pandangan konstruksionis, wartawan dipandang sebagai aktor/agen konstruksi. Wartawan bukan hanya melaporkan fakta, melainkan juga turut mendefinisikan apa yang terjadi, dan secara aktif membentuk peristiwa dalam pemahaman mereka.
6. Etika, pilihan moral, dan keberpihakan wartawan adalah bagian yang integral dalam produksi berita. pendekatan konstruksionis melihat bahwa aspek etika, moral, dan nilai-nilai tidak mungkin dihilangkan dari proses pembuatan berita. wartawan bukanlah robot yang meliput apa adanya, apa yang dia lihat. Etika dan moral dalam banyak hal berarti keberpihakan pada satu kelompok atau nilai tertentu umumnya dilandasi oleh keyakinan tertentu adalah bagian yang integral dan tidak terpisahkan dalam membentuk dan mengkonstruksi realitas.
7. Nilai, etika, dan pilihan moral peneliti menjadi bagian yang integral dalam penelitian. Dalam pandangan konstruksionis, peneliti bukanlah subjek yang bebas nilai. Pilihan etika, moral atau keberpihakan peneliti menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penelitian.
8. Khalayak memiliki penafsiran tersendiri atas berita. khalayak bukanlah subjek yang pasif. Ia merupakan subjek yang aktif dalam menafsirkan

apa yang ia baca. Karenanya, setiap orang bisa mempunyai pemaknaan yang berbeda atas teks yang sama.

Selain memiliki pandangan sendiri terhadap bagaimana media, wartawan dan berita dilihat, konstruksi sosial media massa juga memiliki tahapan-tahapan dalam membentuk sebuah konstruksi sosial. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya: (a) tahapan menyiapkan materi konstruksi, (b) tahap sebaran konstruksi, (c) tahap pembentukan konstruksi dan (d) tahap konfirmasi. Tahap-tahap tersebut dijelaskan Bungin (2014: 209-213).

Tahap menyiapkan materi konstruksi sosial media massa, merupakan tugas redaksi media massa, tugas tersebut didistribusikan pada deks editor yang ada di setiap media massa. Isu-isu penting setiap hari menjadi fokus media massa, terutama yang berhubungan dengan kedudukan, harta, wanita serta persoalan-persoalan yang sifatnya menyentuh perasaan banyak orang, yaitu persoalan sensitivitas, sensualitas, maupun kengerian.

Tahap sebaran konstruksi. Sebaran konstruksi media massa dilakukan melalui strategi media massa. Konsep sebaran konstruksi media massa masing-masing media berbeda., namun prinsip utamanya sama yaitu *real-time*. Media elektronik memiliki konsep *real-time* yang berbeda dengan media cetak. Karena sifat-sifatnya yang langsung (*live*), maka yang dimaksud dengan *real-time* oleh media elektronik adalah seketika disiarkan, seketika itu pula pemberitaan samapai kepada pemirsa atau pendengar. Adapun yang dimaksud dengan *real-time* media cetak berkaitan dengan perioditas pada keteraturan terbitnya. Meskipun media cetak memiliki konsep *real-time* yang sifatnya tertunda, namun konsep aktualitas menjadi pertimbangan utama sehingga pembaca utama sehingga pembaca merasa tepat waktu memperoleh berita tersebut.

Pembentukan konstruksi realitas. Dalam pembentukan konstruksi realitas ini terdapat proses pembentukani citra baik (*good news*) ataupun buruk (*bad news*). Model *good news* adalah sebuah model yang

cenderung mengkonstruksi suatu pemberitaan sebagai pemberitaan yang baik. Adapun model *bad news* merupakan sebuah konstruksi yang cenderung mengkonstruksi kejelekan pada objek pemberitaan sehingga terkesan lebih jelek, buruk dari sesungguhnya.

Tahap konfirmasi. Konfirmasi merupakan tahapan ketika media massa maupun pembaca dan pemirsa memberikan argumentasi dan akuntabilitas terhadap pilihannya. Bagi media, tahapan ini untuk memberi argumentasi terhadap alasan-alasannya konstruksi sosial. Bagi pembaca untuk menjelaskan mengapa ia terlibat dan bersedia hadir dalam proses konstruksi sosial.

E. Framing

Pada dasarnya, analisis *framing* merupakan versi terbaru dari pendekatan wacana, khususnya untuk menganalisis teks media. Gagasan tentang *framing* pertama kali dilontarkan oleh Beterson tahun 1955. Konsep *framing* atau *frame* sendiri bukanlah murni konsep ilmu komunikasi, akan tetapi dipinjam dari ilmu kognitif (psikologis).

Dalam perspektik komunikasi, analisis *framing* digunakan untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi, seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. Dengan kata lain, *framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa kemana berita tersebut (Sobur, 2002: 161-162).

Framing merupakan metode penyajian realitas di mana kebenaran tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus, dengan memberikan penonjolan terhadap aspek-aspek tertentu, dengan

menggunakan istilah-istilah yang punya konotasi tertentu, dan dengan bantuan foto, karikatur, dan alat ilustrasi lainnya. Dengan kata lain bagaimana realitas dibingkai, dikonstruksi dan dimaknai oleh media (Kriyanto, 2006: 155)

Model *framing* yang diperkenalkan oleh Pan dan Kosicki tersebut adalah salah satu model yang populer dan banyak dipakai. Sebenarnya, model ini awal mulanya diperkenalkan lewat suatu tulisan di Jurnal *Political Communication* dan merupakan makalah yang dipresentasikan pada Konvensi Asosiasi Komunikasi Internasional di Florida (Eriyanto, 2002: 251).

Pan dan Kosicki menilai, analisis *framing* dapat menjadi salah satu alternatif dalam menganalisis teks media di samping analisis isi kuantitatif. Sebagai suatu analisis isi, analisis *framing* agak berbeda dengan pendekatan yang dipakai dalam analisis isi kuantitatif. *Framing analysis distinguishes it self from several altrnative approaches to news texts, althoutg it borrows hesvily from them. Firts, unlike the traditional approach to content analysis, framing analysis does not conceive news texts as psychological stimuli wiht objectively identifable meanings, rather, it views news texts as consisof organized symbolic devices that well interct wiht individual agents' memory for meaning construction. Second, framing analysis is not constrainet within the content free structralist approach of news discours. Rather, it accepts both the assumption of the rule-governed nature of text formation and multidimensional conception of news texts that will allow for cognitive shortcuts in both news production and consumption. Third, the validity of framing analysis does net rest on researchers resorceful readings of news texts. Rathers, it the retains the systematic procedures of gathering data of news texts in order to identify the signifiying elements that might be used by audience members. Finally, framing analysis differs from it closest conceptually work on news discourse-in that it does not assume the presence of frames in news texts independent of readers of the texts* (Pan, Kosicki, 1993: 58)

(*framing* agak berbeda dengan pendekatan yang dipakai dalam analisis isi kuantitatif. Pertama, analisis isi tradisional melihat teks berita sebagai hasil stimuli psikologis yang objektif, dan karenanya maknanya dapat diidentifikasi dengan ukuran yang objektif pula. Sebaliknya dalam analisis *framing*, teks berita dilihat terdiri dari berbagai simbol yang disusun lewat perangkat simbolik yang dipakai yang akan dikonstruksi dalam memori khalayak. Dengan kata lain, tidak ada pesan atau stimuli yang bersifat objektif, sebaliknya teks berita dilihat sebagai perangkat kode yang membutuhkan interpretasi. Makna karenanya, tidak dimaknai sebagai sesuatu yang dapat diidentifikasi dengan menggunakan ukuran yang objektif, sebaliknya, ia hasil dari proses konstruksi, dan penafsiran khalayak. Kedua, analisis *framing* tidak melihat teks berita sebagai suatu pesan yang hadir begitu saja seperti diandaikan dalam analisis isi tradisional. Sebaliknya, teks berita dilihat sebagai teks yang dibentuk lewat struktur dan formasi tertentu, melibatkan proses produksi dan konsumsi dari suatu teks. Ketiga, validitas dari analisis *framing* tidaklah diukur dari objektivitas dari pembacaan peneliti atas teks berita. tetapi lebih dilihat dari bagaimana teks menyimpan kode-kode yang dapat ditafsirkan dengan jalan tertentu oleh peneliti. Ini mengandaikan tidak ada ukuran valid, karena tergantung pada bagaimana seseorang menafsirkan pesan dari teks berita tersebut) (Eriyanto, 2002: 252).

Alex Sobur dalam bukunya Analisis Teks Media Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana mengatakan, *framing* model Pan dan Kosicki diartikan sebagai proses membuat suatu pesan lebih menonjol, menempatkan informasi lebih dari pada yang lain sehingga khalayak lebih tertuju pada pesan tersebut. Kata penonjolan didefinisikan sebagai membuat sebuah informasi lebih diperhatikan, bermakna, dan berkesan. Untuk membuat informasi menjadi lebih bermakna biasanya sebuah media cetak melakukan penonjolan-penonjolan terhadap suatu berita. dalam pengambilan keputusan mengenai sisi mana yang ditonjolkan tentu

melibatkan nilai dan ideologi para wartawan yang terlibat dalam proses produksi sebuah berita (Sobur, 2012:164).

Sebagaimana yang dikutip Eriyanto: (257-266) Pan dan Kosicki mengemukakan bahwa perangkat *framing* terdiri dari empat struktur:

1. Sintaksis, yaitu struktur yang berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa ke dalam bentuk susunan berita. Struktur sintaksis berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa. Struktur semantik ini dapat diamati dari bagian berita (*headline* yang dipilih, *lead* yang dipakai, latar informasi, kutipan yang diambil, sumber, penutup dalam satu kesatuan teks berita secara keseluruhan. Bagian itu tersusun dalam bentuk yang tetap teratur sehingga membentuk skema yang menjadi pedoman bagaimana fakta hendak disusun.

- a) *Headline*, aspek sintaksis dari wacana berita dengan tingkat kemenonjolan yang tinggi yang menunjukkan kecenderungan berita. Pembaca cenderung lebih mengingat headline yang dipakai dibandingkan bagian berita. headline mempunyai fungsi *framing* yang kuat. *Headline* mempengaruhi bagaimana kisah dimengerti dengan menekankan makna tertentu.

Terdapat empat jenis *headline* berdasarkan kepentingan berita, yaitu (a) *Banner headline*: untuk berita yang sangat atau terpenting. Headline dimaksud dibuat dengan jenis dan ukuran huruf yang mencerminkan sifat gagah dan kuat, dalam arti hurufnya terbesar dan lebih tebal dibandingkan jenis *headline* lainnya, serta menduduki tempat lebih dari empat kolom surat kabar. (b) *Spreadheadline*: untuk berita penting. Headline dimaksud tampak lebih kecil daripada jenis banner headline. (c) *Secondary headline*: untuk berita yang kurang penting *headline* jenis ini tampak lebih kecil dari pada *spread headline*. (d) *Subordinated headline*: untuk berita yang dianggap tidak penting. Kehadirannya kadang-kadang dibutuhkan untuk menutup tempat kosong pada halaman yang

bersangkutan. Kosong dalam arti sisa tempat pada halaman yang memuat beita-berita lain. Memiliki ukuran dan ketebalan huruf lebih rendah dari jenis lainnya (Suhandang, 2016: 124)

- b) *Lead*, merupakan pengantar sebelum masuk ke dalam berita. Fungsi *lead* memberikan sudut pandang dari berita, menunjukkan perspektif tertentu dari peristiwa yang diberitakan. Dalam penulisan *lead*, wartawan dapat melakukan penekanan atau penonjolan pada salah satu unsur 5W+1H. Pertama, *what lead* yang menekankan pada bentuk kejadiannya. Kedua, *who lead* yang mendiskripsikan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan. Ketiga, *when lead* disusun untuk menekankan waktu di mana peristiwa yang diberitakan tersebut terjadi. Keempat, *where lead* merupakan lead yang menekankan mengenai tempat di mana peristiwa itu terjadi. Kelima, *why lead* menjelaskan sebab terjadinya peristiwa yang diberitakan. Keenam, *how lead* menjelaskan mengenai bagaimana peristiwa yang diberitakan dapat terjadi (Suhandang, 2016: 128-133).
- c) Latar, merupakan bagian berita yang dapat mempengaruhi makna yang ingin ditampilkan wartawan. Seorang wartawan ketika menulis berita biasanya mengemukakan latar atas peristiwa yang ditulis. Latar yang dipilih menentukan ke arah mana pandangan khalayak hendak dibawa.
- d) Kutipan sumber berita, penulisan kutipan sumber berita ini bertujuan untuk membangun objektivitas, prinsip keseimbangan dan tidak berpihak. Kutipan sumber berita menekankan bahwa apa yang ditulis oleh wartawan bukan pendapat wartawan semata, melainkan pendapat dari orang yang mempunyai otoritas tertentu. pengutipan sumber ini menjadi perangkat framing atas tiga hal. *Pertama*, mengklaim validitas atau kebenaran dari pernyataan yang dibuat dengan mendasarkan diri pada klaim otoritas akademik. Wartawan bisa jadi mempunyai pendapat tersendiri atas

suatu peristiwa, pengutipan itu digunakan hanya untuk memberi bobot atas pendapat yang dibuat, bahwa pendapat itu tidak omong kosong, tetapi di dukung oleh ahli yang berkompeten. *Kedua*, menghubungkan poin tertentu dari pandangannya kepada pejabat yang berwenang. *Ketiga*, mengecilkan pendapat atau pandangan mayoritas sehingga pandangan tersebut tampak sebagai menyimpang.

2. Skrip adalah struktur yang berhubungan dengan bagaimana wartawan mengisahkan atau menceritakan peristiwa ke dalam bentuk berita. struktur ini melihat bagaimana strategi cara bercerita atau bertutur yang dipakai oleh wartawan dalam mengemas peristiwa ke dalam bentuk berita. skrip memberikan tekanan mana yang didahulukan, dan bagian mana yang bisa disembunyikan. Bentuk umum dari struktur skrip ini adalah pola 5W+ 1H (*who, what, when, where, why, dan how*).
3. Tematik adalah struktur yang berhubungan dengan bagaimana fakta ditulis. Kalimat yang dipakai, menempatkan dan menulis sumber ke dalam teks berita secara keseluruhan. Ada Beberapa elemen yang dapat diamati dari perangkat tematik ini, yaitu:
 - a) Detail, yang berhubungan dengan kontrol informasi yang ditampilkan seseorang. Selain itu juga ada elemen maksud, nominalisasi dan koherensi.
 - b) Kohorensi, yaitu pertalian atau jalinan antar kata, proposisi atau kalimat. Dua buah kalimat atau proposisi yang menggambarkan fakta yang berbeda dapat dengan menggunakan koherensi. Sehingga fakta yang tidak berhebugan sekalipun dapat menjadi berhubungan ketika seseorang menghubungkannya. *Pertama*, koherensi sebab-akibat. Proposisi atau kalimat satu dipandang akibat atau sebab dari proposisi lain. Biasanya, dihubungkan dengan kata penghubung “sebab” atau “karena”. *Kedua*, koherensi penjelas. proposisi atau kalimat satu dilihat sebagai penjelas

- proposisi atau kalimat lain. Biasanya ditandai dengan kata penghubung “dan” atau “lalu”. *Ketiga*, koherensi pembeda. Proposisi atau kalimat satu dipandang kebalikan atau lawan dari proposisi atau kalimat lain. Biasanya dihubungkan dengan kata penghubung “dibandingkan” atau “sedangkan”
- c) Bentuk kalimat, yaitu hal yang berhubungan dengan cara berpikir logis
 - d) Kata ganti, yaitu menunjukkan posisi seseorang dalam suatu wacana Bertujuan untuk memanipulasi dengan menciptakan imajinasi.
4. Retoris, struktur retorik dari wacana berita menggambarkan pilihan gaya atau kata yang dipilih oleh wartawan untuk menekankan arti yang ingin ditonjolkan oleh wartawan. Retorik berfungsi untuk membuat citra, meningkatkan kemenonjolan pada sisi tertentu meningkatkan gambaran yang diinginkan dari suatu berita. struktur retorik dari wacana juga menunjukkan kecenderungan bahwa apa yang disampaikan tersebut adalah suatu kebenaran. Beberapa elemen struktur retorik dalam *framing* yaitu:
- a) *Leksikon*, merupakan pemilihan dan pemakaian kata-kata tertentu untuk menandai atau menggambarkan peristiwa.
 - b) Grafis, dalam wacana berita, grafis ini biasanya muncul lewat bagian tulisan yang dibuat lain dibandingkan tulisan lain. Pemakaian huruf tebal, huruf miring, pemakaian garis bawah, huruf yang dibuat dengan ukuran lebih besar. Termasuk di dalamnya adalah pemakaian *caption*, *raster*, grafik, gambar, foto, tabel untuk mendukung arti penting suatu pesan.
 - c) Metafora, kiasan yang mempunyai persamaan sifat dengan benda atau hal yang bisa dinyatakan dengan kata atau frase. Dipakai tidak hanya untuk “ornamen” berita, tetapi juga untuk mendukung dan menekankan pesan utama yang disampaikan.

F. Islam dan Perdamaian

Agama Islam merupakan agama sepanjang sejarah manusia, yang disampaikan oleh seluruh Nabi dan Rosul yang pernah diutus oleh Allah SWT pada bangsa-bangsa dan kelompok manusia. Secara etimologi Islam berasal dari kata *salima* yang berarti selamat sentosa. Berasal dari kata itu dibentuk kata *assalam* yang artinya memelihara dalam keadaan selamat sentosa berarti juga menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat (Abdalati, 1983: 1).

Dalam Islam perdamaian juga disebut dengan *al-islah* yang berarti memperbaiki, mendamaikan, dan menghilangkan sengketa atau kerusakan, berusaha menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai, antara satu dan lainnya melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci (Tim Penyusun: 1997: 740).

Damai mempunyai arti tidak bermusuhan, keadaan tidak bermusuhan, berbaik kembali, tentram, aman, sedang mendamaikan, memperdamaikan yaitu menyelesaikan permusuhan (pertengkaran) supaya kedua belah pihak berbaik kembali, merundingkan supaya mendapat persetujuan, dan mendamaikan sendiri mempunyai arti sendiri penghentian permusuhan (Poerwadarminta, 1976: 224)

Sebagai agama, Islam adalah tatanan ajaran aqidah, ibadah dan akhlak yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman, bimbingan dan petunjuk agar manusia dapat menjalani hidupnya di dunia sesuai kehendakNya dalam rangka mencapai keselamatan (salam) dan kebahagiaan dunia akhirat. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang menyatakan bahwa diutusnya Nabi Muhammad sebagai pembawa agama Islam benar-benar menjadi rahmat bagi semesta alam. Karakteristik, watak, dasar, visi, misi Islam adalah totalitas ajaran komprehensif-integralistik tentang perlunya bagi umat muslim untuk selalu menyebarkan keselamatan, menciptakan kedamaian, dan

menegakkan perdamaian dalam segala aspek hidup dan kehidupan manusia di dunia (Ismail, 2014: 3)

Ada beberapa ajaran Islam yang berorientasi kepada pembentukan perdamaian di tengah umat manusia, sehingga mereka dapat hidup sejahtera dan harmonis, diantaranya:

1. Membangun ukhuwah, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupannya agar tercipta persaudaraan di antara manusia. Ada tiga bentuk ukhuwah, *pertama, ukhuwah islamiyah*, adalah hubungan yang tumbuh dan berkembang atas dasar agama (Islam). *Kedua, ukhuwah wathaniyyah*, yang berarti persaudaraan yang tumbuh dan berkembang atas dasar kebangsaan, tanpa membedakan agama, suku, warna kulit, adat istiadat, budaya, dan aspek-aspek kekhususan lainnya. *Ketiga, ukhuwah bashariyah* yang berarti persaudaraan yang tumbuh dan berkembang atas dasar kemanusiaan, berlaku kepada semua manusia secara universal tanpa membedakan ras, suku dan agama dan aspek-aspek kekhususan lainnya (Sumber: <http://zainuddin.lecturer.uin-malang.ac.id/2015/09/26/islam-agama-damai/> diakses pada 28 Januari 2018).

Sikap ukhuwah ini bahkan sudah diajarkan oleh Rasulullah semasa hidupnya, sehingga Nabi berhasil membangun hubungan kemanusiaan karena, *pertama*, Nabi memiliki sikap untuk selalu memperhatikan kepentingan dan penderitaan orang lain secara tulus. *Kedua*, Nabi senantiasa memberikan penghargaan kepada orang lain bila orang tersebut pantas menerima penghargaan. *Ketiga*, Nabi Muhammad selalu menebarkan sikap pemaaf kepada sesamanya. Beliau tidak pernah merasa benci dan dendam, apalagi kepada sesamanya. (Khaeruman, 2004: 155)

2. Menjunjung Tinggi Keadilan, Islam sangat menekankan perdamaian dalam kehidupan sosial di tengah masyarakat, keadilan harus diterapkan bagi siapa saja walau dengan musuh sekalipun. Karena dengan ditegakkannya keadilan, maka tidak ada seorang pun yang merasa

dikecewakan dan didiskriminasikan sehingga dapat meredakan rasa permusuhan, dengan demikian konflik tidak akan terjadi.

3. Menyeru Hidup Rukun dan Saling Tolong Menolong. Islam juga menyeru kepada umat manusia untuk hidup rukun saling tolong menolong dalam melakukan perbuatan mulia dan mengajak mereka untuk saling bahu membahu menumpas kedzaliman di muka bumi ini, dengan harapan kehidupan yang damai dan sejahtera dapat terwujud.
4. Menyeru Hidup Rukun dan Saling Tolong Menolong. Islam juga menyeru kepada umat manusia untuk hidup rukun saling tolong menolong dalam melakukan perbuatan mulia dan mengajak mereka untuk saling bahu membahu menumpas kedzaliman di muka bumi ini, dengan harapan kehidupan yang damai dan sejahtera dapat terwujud (Sumber: <https://rachman007.wordpress.com/perdamaian-dalam-perspektif-islam/> diakses pada 28 Januari 2018).

BAB III

GAMBARAN UMUM KOMPAS DAN REPUBLIKA SERTA BERITA AKSI DAMAI 4 NOVEMBER 2016 DI JAKARTA

Dalam bab ini, penulis menyajikan tentang deskripsi atau gambaran umum dari kedua media yang menjadi objek penelitian, yaitu Surat kabar Harian Kompas dan Republika, serta data berita tentang peristiwa aksi damai 4 November 2016 di Jakarta.

A. Profil Surat Kabar Kompas

1. Sejarah dan Perkembangannya

Kompas didirikan tahun 1965 oleh jurnalis Katholik keterunan Cina dan Jawa, P.K. Ojong dan Jacob Utama. Sebelumnya keduanya mendirikan majalah bulanan Intisari yang terbit pertama tahun 1963. Adapun Jacob Oetama sendiri merintis karirnya sebagai wartawan mingguan Penabur pada tahun 1955. Setelah Ojong meninggal, Jacob Oetama menjadi nahkoda yang membesarkan Kompas. Dewasa ini, Kompas telah menjadi surat kabar terkemuka di Indonesia dalam rumpun usaha Kelompok Kompas Gramedia (KKG).

Nama Kompas sering diplesetkan dengan Komando Pastor atau Komando Pak Seda. Hal ini tentu semua ada dasarnya, ketika Kompas lahir, situasi saat itu yakni tahun 1963, di mana setiap surat kabar mempunyai afiliasi politik mengharuskan Kompas memiliki afiliasi politik juga. Maka Kompas pun berafiliasi dengan partai politik yang diketuai Frans Seda. (Hamad, 2004: 116).

Di bawah kepemimpinan Jacob Oetama sebagai pemimpin redaksi, Kompas identik dengan kritik terselubung, tidak langsung dan serba tersirat, gaya yang kerap dianggap sebagai tipikal budaya Jawa. Adapun pembahasan yang harus dilakukan ketika mengupas sebuah masalah sensitif yang berkembang ditengah masyarakat, Kompas memiliki tiga strategi. Pertama, model jalan tengah (MJT) yaitu menggugat secara

tidak langsung, mengkritik tapi disampaikan dengan santun, terkesan berputar-putar, dan mengaburkan pesan yang hendak disampaikan. Kedua, model angin surga (MAS) yakni dalam mengupas masalah, Kompas bukan menggugat atau mempertanyakan hal tertentu, tetapi lebih sebagai imbauan serta harapan. Ketiga, model anjing penjaga (MAP) yang bersifat terbuka dan menggunakan bahasa yang lebih berani (Hamad, 2004: 117).

Pada permulaan periode 1990-an, Kompas telah menjadi kekaisaran yang terdiri atas 38 anak perusahaan yang saling berkaitan satu sama lain. Imperium tersebut dikenal dengan nama Kelompok Kompas-Gramedia. Kelompok ini tidak hanya meliputi penerbit buku dan percetakan Gramedia, tetapi juga stasiun radio, sejumlah agen perjalanan, hotel, alat-alat berat, pasar swalayan, perusahaan asuransi, kontraktor, bank, dan sejumlah periklanan. Harian Kompas rutin menempati posisi paling depan untuk perolehan iklan cetak terbanyak di Indonesia, dan sepanjang tahun pun porsi tersebut semakin besar. Angka ini diperkirakan akan naik sampai 32,2 persen atau (Rp 85.916) juta di tahun 1993.

Kelompok Kompas-Gramedia juga telah menjalin relasi kerja yang erat dengan sejumlah institusi media terkait milik pemerintah. Secara umum hubungan ini memunculkan tekanan tertentu pada jurnalis atau jajaran terbitan di kelompok tersebut. Kelompok Kompas-Gramedia terus-menerus menjaga agar tulisan-tulisan mereka tidak melampaui batas. Di bawah kendali Jacob Oetama sebagai salah satu pendiri, pihak manajemen kelompok ini tidak segan-segan jurnalis-jurnalisnya bahkan menutup sejumlah penerbitan dari pada mengambil resiko berhadapan dengan pemerintah atau reaksi masyarakat. Hal seperti ini dinilai merugikan kelompok secara keseluruhan (Hill, 2011: 98-99).

Dengan motto “Amanat Hati Nurani Rakyat” ini sekaligus juga menjadi *merk* dagang (*brand market*), Kompas membidik pasar kelas menengah ke atas (kelas B hingga A-1). Pembaca Kompas dari segi

umur, terbanyak pada umur 25 hingga 40 tahun, dengan pekerjaan dalam bidang white collar. Sebagai koran nasional, peredaran Kompas meliputi hampir seluruh kota di Indonesia, dan selalu menjadi market leader (Hamad, 2004: 117).

Saat ini, Kompas telah menjadi raksasa di dunia pers. Dimulai dengan mencetak koran, dan saat ini telah berkembang menjadi multimedia, merambah berbagai aktivitas lain hingga menjadi media *empire* yang kuat dan kaya. Setidaknya 23 penerbitan yang berada di bawah KKG (Kelompok Kompas Gramedia): Serambi Indonesia, Sriwijaya *Post*, Bernas, Surya, Pos Kupang, Banjarmasin *Post* (harian), Hoplea Bola, Citra, Kontan, Otomotif, Raket, Warta Pramuka, Bobo, HAI, Hidup, Jakarta-Jakarta, Kawanku, Nova (mingguan), Info Komputer (tengah bulanan), Foto Media, Intisari (bulanan), *Product and Industri* (dwi bulanan) (Hamad, 2011: 116).

2. Visi dan Misi Kompas

a. Visi

Visi Kompas adalah “Menjadi institusi yang memberikan pencerahan bagi perkembangan masyarakat Indonesia yang demokratis dan bermartabat, serta menjunjung tinggi asas dan nilai kemanusiaan”.

b. Misi

Misi Kompas adalah “Mengantisipasi dan merespon dinamika masyarakat secara profesional, sekaligus memberi arah perubahan (*trend setter*) dengan menyediakan dan menyebarluaskan informasi terpercaya” (Anam, Skripsi, 2015: 46)

3. Struktur Organisasi Kompas

Keterangan:

Pemimpin Utama	: Jacob Oetama
Wakil Pemimpin Utama	: Lilik Oetama, Rikard Bagun
Pemimpin Redaksi	: Budiman Tanuredjo

Wakil Pemimpin Redaksi	: Trias Kunchayono, Ninuk Merdiana Pambudy
Redaktur Senior	: St. Sularto, Ninok Leksono
Redaktur Pelaksana	: Mohamad Bakir
Wakil Redaktur Pelaksana	: Rusdi Amral, Try Harijono, P. Tri Agung Kistanto, Sutta Dharmasaputra
Sekretaris Redaksi	: Subur Tjahjono, Mohamad Bakir

Alamat Redaksi

Jl. Palmerah Selatan 26-28, Jakarta 10270 **Telepon:** 534 7710/20/30, 530 2200 **Fax:** 548 6085/548 3581 **Penerbit:** PT Kompas Media Nusantara **Surat Izin Usaha Penerbitan Pers:** SK Menpen No. 013/SK/Menpen/SIUPP/A. 7/1985 tanggal 19 November 1985 **Penerbit SuratKabar**No 37/1965/11/A/2002 Percetakan PT. Gramedia ISSN 0215-207X (Kompas, 20 Oktober 2017).

B. Surat Kabar Republika

1. Sejarah dan Perkembangannya

Kelahiran Republika tidak dapat dipisahkan dari kehadiran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Melalui Yayasan Abdi Bangsa yang dibentuk 17 Agustus 1992, ICMI menetapkan tiga program utama: (1) pengembangan Islamic Center, (2) Pengembangan *Centre for Information and Development Studies* (CIDES) dan (3) Penerbitan Harian Umum Republika (Hamad, 2011: 120).

Sesuai UU Pokok Pers, penerbitan pers harus berbadan usaha. Untuk itulah yayasan Abdi Bangsa mendirikan PT Abdi Bangsa pada 28 November 1992. Satu bulan kemudian, 19 Desember 1992 Republika mendapat SIUPP dan mulai resmi berdiri tanggal 4 Januari 1993. Berkat dukungan ICMI, SIUPP segera diperoleh tanpa kesulitan berarti, lebih cepat dibandingkan dengan para pemohon izin lainnya yang tidak

memiliki koneksi sebaik Republika. dikabarkan pula bahwa, Presiden Soeharto-lah yang mengganti nama dari Republik menjadi Republika (Hill, 2011: 154).

Begitu eratnya hubungan antara Republika dan ICMI maka untuk memahami Republika berarti juga harus mengetahui ICMI. Organisasi ini bukanlah sekedar perkumpulan cendekiawan muslim tetapi juga sebagai perhimpunan kekuatan politik Islam pada masa 70-80-an yang banyak dipinggirkan oleh rezim Golkar dan militer. Dengan penggerak utama BJ. Habibie, ICMI lahir dan bergerak penuh dengan muatan politik. Menyadari umat Islam sering kalah dalam bidang politik karena lemah dalam pemikiran dan opini (Hamad, 2004: 121)

Hal tersebut dikarenakan pada tahun 1990-an belum ada media atau pers Islam yang cukup berpengaruh di Indonesia. David T Hill seorang akademi dari Australia sebagaimana dikutip Agus Sudibyo (2001: 10) melukiskan bahwa media berorientasi Islam kurang mampu meraih peluang komersial. Satu dilema yang sering muncul adalah kesulitan menjaga kredibilitas di hadapan pembacanya, saling mengkropomikan sebuah akomodasi dengan kepentingan negara.

Manajemen awal Republika mencoba untuk menjawab persoalan klasik yaitu mengedepankan misi Islam dalam sebuah negara yang sangat “*state-centered*”. Dalam konteks jurnalisme, yaitu menerapkan kaidah pemberitaan yang profesional tanpa meninggalkan keislamannya. Republika hadir sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa Islam bukan hanya sekedar persoalan untuk orang desa dan ulama, tetapi sebuah agama yang bisa mengilhami suatu kesadaran sosial yang sesuai dengan aspirasi rakyat sebagai keterbukaan, dan hal-hal penting secara cerdas (Agus Sudibyo, ddk, 2002: 12)

Sejak berdiri, motto “Bukan Sekedar Menjual Berita” telah digunakan oleh Republika. Adapun ideologi Republika adalah ideologi pemiliknya, PT Abdi Bangsa, yaitu Kebangsaan, Kerakyatan dan Keislaman, dengan tujuan mempercepat terbentuknya *civil society*. Republika banyak

berupaya menyajikan Islam sebagai agama yang dapat memberi inspirasi terhadap kesadaran sosial selaras dengan aspirasi kontemporer seperti keterbukaan, pluralisme, kecanggihan dunia informasi. Republika menampilkan Islam dalam wajah moderat (Hamad, 2004: 120).

Dalam usahanya menghasilkan surat kabar “berkualitas”, secara mengesankan Republika menggalang sejumlah intelektual dan jurnalis Islam liberal yang paling berpengaruh di Indonesia. Secara umum, surat kabar ini sekuler dalam memilih liputan peristiwa dan masalah yang diangkat. Sekalipun demikian, harian ini secara ideologis menginformasikan nilai-nilai Islami dengan cara serupa seperti Kompas dan Suara Pembaruan dengan muatan kristianinya (Hill, 2011: 155)

Republika berhasil memantapkan diri sebagai pembawa bendera kemenangan di tengah ketatnya kompetisi industri pers di periode 1990-an. Bulan Agustus 1993, begitu angka penjualan mencapai 125.000, target akhir tahun kemudian direvisi agar lebih masuk akal menjadi 200.000. sepanjang tahun 1993 pula, surat kabar ini secara teratur menurunkan daftar panjang berisi nama-nama sejumlah pembeli saham Republika. ratusan bahkan ribuan di antaranya dibeli oleh Industri Pesawat Terbang Nasional (IPTN) yang didirikan oleh Habibie. Di bulan Agustus, Parni Hadi sebagai redaktur mengklaim 1,3 juta sahamnya, telah terjual habis.

Untuk kepentingan pemasaran (distribusi), Republika menggunakan sistem jarak jauh dan bisa dikatakan merupakan harian pelopor yang menggunakan sistem ini. dalam pendistribusian, harian ini tidak menggunakan orang dalam tetapi diserahkan ke satu agen besar di setiap daerah pemasaran. Sedangkan untuk distribusi hingga ke pengecer diserahkan sepenuhnya kepada agen tersebut. untuk mendongkrak pemasaran, Republika melaksanakan program barter dengan media lain baik cetak maupun elektronik di samping membuka Republika *on line* (Hamad, 2004: 123).

2. Visi dan Misi Republika

a. Visi

Menjadi perusahaan media cetak terpadu berskala nasional serta dikelola secara profesional Islami, sehingga berpengaruh dalam proses pencerdasan bangsa, pengembangan kebudayaan, serta peningkatan keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia baru.

b. Misi

1. Pencerdasan bangsa melalui pendalaman wawasan yang berbasis komunitas melalui pemberitaan yang akurat, aktual, terpercaya, edukatif, serta membela keadilan dan kebenaran. Menciptakan dan menghidupkan sistem manajemen yang efisien dan efektif, serta mampu dipertanggungjawabkan secara profesional.
2. Meningkatkan dan menguatkan prestasi dan dedikasi individu menjadi sebuah team sebagai kunci untuk perkembangan perusahaan dan peningkatan kesejahteraan. Menciptakan budaya kerja yang sehat dan transparan.

3. Struktur Organisasi Republika

Keterangan:

Direktur Utama	: Agoosh Yoosran
Wakil Direktur Utama	: Mira Rahardjo Djarot
Direktur Operasional	: Arys Hilman Nugraha
Komisaris Utama	: Erick Thohir
Komisaris	: R Harry Zulnardy, Adrian Syarkawi, Rudi Setia Laksmna, Rosan P Roeslani

4. Staf Redaksional Republika

Pemimpin Redaksi	: Irfan Junaidi
Wakil Pemimpin Redaksi	: Nur Hasan Murtiaji
Redaktur Pelaksana Koran	: Subroto

Redaktur Khusus	: Ikhwanul Kiram Mashuri, Nasihin Masha
Redaktur Senior	: Agung P Vazza
Sekretaris Redaksi	: Hamidah Sagaf
Wartawan Senior	: Harun Husein, Nurul S Hamami, Selamat Ginting, Siwi Tri Puji Budiwiayati, Rakhmat Hdi Sucipto,

Alamat redaksi

Jl. Warung Buncit Raya No. 37, Jakarta 12510T. 021. 780 3747
(*Hunting*), 021. 791 84744 (Iklan)F. 021. 780 0649, 798 3623
(Redaksi) **Email** Redaksi Republika: sekretariat@republika.co.id.

Percetakan: PT. Republika Media Mandiri Jl. Rawa Bali 2 No. 1
Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta **Surat Izin Usaha**
Penerbitan Pers: SK Menpen No.
283/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1992 (Republika 20 Oktober 2017)

C. Data Berita Aksi Damai 4 November 2016 di SKH Kompas dan Republika

Pada penelitian ini, peneliti telah mengumpulkan berita-berita dari Surat Kabar Kompas dan Republika mengenai aksi 4 November 2016 di Jakarta. Adapun berita-berita Kompas dan Republika mengenai aksi 4 November 2016 berjumlah 10 berita di Koran Republika dan 9 berita di Koran Kompas. Di bawah ini adalah tabel pemberitaan Kompas dan Republika terhadap peristiwa aksi damai 4 November 2016 di Jakarta.

Tabel 2
Berita Harian Kompas Tentang Aksi 4 November 2016 di Jakarta

NO	Tanggal terbit	Judul Berita	Rubrik
1	1 November 2016	Elite Patut Jaga Kemajemukan	Utama
2	2 November 2016	Presiden Tidak Akan Intervensi	Utama
3	3 November 2016	Pemerintah Jamin Keamanan Masyarakat	Utama
4	4 November 2016	Presiden dan Wapres Tetap Berkantor Seperti Biasa	Utama
5	5 November 2016	Presiden: Aktor Politik Menunggangi Unjuk Rasa	Utama
6	6 November 2016	Presiden Punya Data Intelijen	Utama
7	7 November 2016	Dugaan Penistaan Agama	Utama
8	8 November 2016	Presiden Menemui Sejumlah Pihak	Utama
9	9 November 2016	Presiden tak Akan Lindungi Basuki	Utama
10	10 November 2016	Presiden Terus Bersilaturahmi	Nasioan al

Tabel 3
Berita Harian Republika Tentang Aksi 4 November 2016 di Jakarta

NO	Edisi	Judul Berita	Rubrik
1	1 November 2016	Jokowi-Prabowo Suasana Dinginkan	Utama
2	2 November 2016	Ulama Imbau Unjuk Rasa Damai	Utama
3	3 November 2016	SBY: Tuntaskan Kasus Ahok	Utama
4	4 November 2016	Presiden: Tetap Tenang	Utama
5	5 November 2016	Aksi Bermartabat	Utama
6	6 November 2016	Ungkap Provokator	Utama
7	7November 2016	Pesan Aksi tersampaikan	Utama
8	8November 2016	Ahok Diperiksa 9 Jam	Utama
9	9 November 2016	Jokowi Janji tak Lindungi Ahok	Utama
10	10 November 2016	Presiden Minta Ormas Dinginkan Suasana	Utama

1. Berita pada hari Selasa, 1 November 2016 dengan judul: Elite Patut Jaga Kemajemukan.

Pada berita ini, Koran Kompas mengangkat judul “Elite Patut Jaga Kemajemukan”. Berita ini merupakan berita yang dimuat

sebelum rencana aksi yang akan diselenggarakan pada hari Jumat 4 November 2016 di Jakarta. Berita ini menceritakan upaya-upaya Presiden Joko Widodo untuk meredam suasana dengan mengunjungi para tokoh elite nasional yang patut ikut menyelesaikan masalah kebangsaan dengan damai dan sejuk. Adapun *lead* yang digunakan Koran Kompas sebagai berikut:

Para tokoh elite nasional patut ikut menyelesaikan masalah kebangsaan dengan damai dan sejuk. Keterlibatan mereka, mulai kalangan agama hingga politik, sangat penting menjaga nilai-nilai kebangsaan dan kemajemukan Indonesia.

Selanjutnya, isi berita lebih menerangkan kunjungan dan isi pembahasan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ke rumah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang juga pernah menjadi pesaing Presiden Joko Widodo semasa pemilihan presiden (pilpres).

Berita pertama ini diletakkan oleh Koran Kompas pada halaman pertama dan kemudian dilanjutkan pada halaman lima belas.

2. Berita pada hari Rabu, 2 November 2016 dengan judul: Presiden Tidak Akan Intervensi

Dalam edisi ini, Kompas menggunakan foto Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, didampingi Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nasir yang menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan mengintervensi kasus Basuki Tjahaja Purnama dan juga tidak akan menghalangi aksi unjuk rasa. Pernyataan tersebut disampaikan setelah bertemu dengan Presiden dan sejumlah ulama serta pemimpin organisasi massa Islam di Istana Merdeka. Mendengar keputusan tersebut, wartawan mengungkapkan bahwa Presiden tidak akan melakukan intervensi dan tetap akan menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Selain itu, Presiden

dan para ulama juga berkomitmen untuk merawat kebangsaan dan keindonesian bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah final serta tidak akan memberikan toleransi terhadap siapa saja yang akan memecah belah bangsa. Salah satunya dengan menghadirkan isu SARA.

3. Berita pada hari Kamis, 3 November 2016 dengan judul: Pemerintah Jamin Keamanan Masyarakat.

Berita yang disajikan wartawan pada edisi ini menegaskan bahwa pemerintah akan menjamin keamanan masyarakat saat aksi 4-11 berlangsung. *Lead* yang digunakan Kompas adalah:

Masyarakat tak perlu resah terhadap unjuk rasa terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama yang digelar esok. Pemerintah menjamin keamanan masyarakat.

Dalam edisi ini pemerintah melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mengatakan bahwa akan tetap menjamin keamanan masyarakat dengan memperketat keamanan menurunkan sekitar 4.000 aparat personil yang terdiri dari aparat Polri, TNI, dan satpol PP yang tersebar di beberapa lokasi. Wartawan juga menuliskan bahwa sejumlah elite dan tokoh telah melakukan pertemuan terkait unjuk rasa salah satunya mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun pernyataan SBY mengenai data intelijen yang tidak akurat dianggap dapat membingungkan masyarakat, berlebihan dan tidak menunjukkan sikap kenegarawan yang justru memanaskan situasi.

4. Berita pada hari Jumat, 4 November 2016 dengan judul: Presiden dan Wapres Berkantor Seperti Biasa

“Masyarakat tetap bekerja saja seperti biasa. Yang jelas saya ada di Jakarta”.

Pada edisi ini, wartawan menuliskan bahwa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan tetap berkantor seperti biasa meski akan ada aksi. Wawancara ini dilakukan saat

Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla menjawab pertanyaan tentang sejumlah persoalan bangsa yang sedang terjadi. unjuk rasa adalah hal yang biasa, hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara demokrasi, Wapres juga menghimbau agar aksi dilakukan secara tertib dan waspada terhadap penyusup yang bisa mengacaukan keadaan.

5. Berita pada hari Sabtu, 5 November 2016 dengan judul: Aksi Ditunggangi Aktor Politik.

Dalam edisi ini, terdapat empat tema besar, (1) ucapan terima kasih Presiden Jokowi kepada Ulama, Kiai, Habaib, dan Ustadz sehingga unjuk rasa terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok berjalan tertib dan damai, (2) pernyataan presiden mengenai kerusuhan yang terjadi itu dikarenakan telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi, (3) kronologi aksi damai sampai terjadinya kericuhan, (4) kesepakatan antara pimpinan aksi dengan pihak pemerintah yang berjanji akan dilakukan dengan cepat yakni dua minggu.

6. Berita pada hari Minggu, 6 November 2016 dengan judul: Presiden Punya Data Intelijen.

Pada *lead* edisi ini mengisahkan tentang:

Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Normantyo menyatakan, Presiden Joko Widodo tidak sembarangan bicara terkait aktor yang menunggangi kerusuhan dalam aksi damai jumat malam. Presiden punya data, yaitu laporan intelijen, laporan kepolisian, dan lainnya.

Dalam edisi Kompas ini, wartawan menuliskan bahwa apa yang telah dikatakan Presiden Joko Widodo mengenai adanya aktor politik yang menunggangi aksi adalah sesuatu yang berdasar, yaitu dimilikinya data oleh presiden yang diperoleh dari intelijen. Selanjutnya, isi berita lebih menerangkan sanggahan dari pihak GNPF-MUI serta kembalinya suasana kota Jakarta yang normal.

Terkait unjuk rasa damai yang berubah menjadi rusuh, Bachtiar membantah gerakan yang dipimpinnya sebagai pemicu. Front Pembela Islam (FPI) yang menjadi bagian dari gerakan itu justru mencegah kerusuhan terjadi dengan berada di antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan.

**7. Berita pada hari Senin, 7 November 2016 dengan judul:
Dugaan Penistaan Agama**

Konsolidasi Politik dan Kenegaraan Dibutuhkan

Berita pada edisi ini, Kompas ingin menekankan kepada khalayak untuk mendesak pemerintah melakukan langkah-langkah yang tepat untuk menjaga kedamaian dan persatuan agar tercipta suasana seperti semula. Hal ini dapat dilihat dari beberapa tema yang ditampilkan oleh Kompas. Salah satunya dengan mengulang kembali isi ikrar yang dilakukan oleh perwakilan pemuda Indonesia yang ada di Australia. Selain itu, Kompas dalam beritanya menyampaikan mengenai rencana gelar perkara untuk kasus Basuki Tjahaja Purnama, penangkapan sepuluh aktor provokator dan menyelipkan mengenai kritikan kepada massa aksi yang telah menganiaya dan menuduh kameramen Kompas TV Muhammad Guntur pelaku yang melempar botol ke arah polisi.

**8. Berita pada hari Selasa, 8 November 2016 dengan judul:
Presiden Menemui Sejumlah Pihak.**

Dari judul di atas, wartawan menuliskan bahwa Presiden Joko Widodo sedang melakukan konsolidasi politik dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada sejumlah pihak, seperti TNI dan PBNU. Sementara itu, Ketua Tanfidziyah PBNU Sail Aqil Siradj berpendapat bahwa kurang tepat jika memberi stigma terhadap aksi 4-11 ditanggung oleh kelompok-kelompok tertentu dan lambannya pemerintah untuk melakukan komunikasi politik dengan rakyat. Berita ini juga menuliskan bahwa pernyataan Basuki Tjahaja

Purnama di Kepulauan Seribu telah disunting sehingga menimbulkan permasalahan.

9. Berita hari Rabu, 9 November 2016 dengan judul: Presiden tak Akan Lindungi Ahok.

Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan melindungi Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama terkait dugaan penistaan agama yang dilakukannya. Presiden juga menerima kritik dari sejumlah pihak terkait kelambanan pemerintah dalam membangun komunikasi politik. Berita ini juga menjelaskan bahwa masyarakat untuk bersabar dan percaya kepada proses hukum yang sedang berjalan karena polri akan bekerja profesional.

10. Berita hari Kamis, 10 November 2016 dengan judul: Presiden Terus Bersilaturahmi

Presiden Joko Widodo terus menjalin silaturahmi. Setelah menemui Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Presiden bertemu dengan sekitar 20 pimpinan ormas Islam di istana Merdeka. Dalam pertemuan tersebut Presiden kembali menegaskan tidak akan mengintervensi dan melindungi Basuki Tjahaja Purnama. Berita ini juga menjelaskan bahwa Polri telah menerima laporan terkait aksi unjuk rasa, laporan tersebut diterima dari para relawan Jokowi Presiden (Bara- JP) yang melaporkan Ketua DPR Fahri Hamzah ke Bareskrim Polri. Bara-JP mengatakan bahwa pernyataan FahriHamzah saat aksi 4 November bernada provokatif dan mengarah pada upaya makar.

D. Data Berita Aksi Damai 4 November 2016 di SKH Republika

1. Berita pada hari Selasa, 1 November 2016 dengan judul: Jokowi-Prabowo Dinginkan Suasana

Presiden Joko Widodo menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang sama-sama pernah bersaing dalam pemilihan

presiden 2014 di Bogor. Selepas kunjungan tersebut, keduanya menginginkan suasana menjelang pilkada serentak 2017 berlangsung menyejukkan, begitu juga dengan rencana aksi yang akan dilakukan tanggal 4 November. Presiden juga menyampaikan harapannya agar para tokoh dan politik menyampaikan imbauan yang mendinginkan suasana agar masa kampanye menjelang pilkada serentak 2017 berlangsung damai, tanpa diwarnai aksi-aksi anarkistis yang meresahkan.

2. Berita pada hari Rabu, 2 November 2016 dengan judul: Ulama Imbau Unjuk Rasa Damai

Dalam edisi ini, Republika menggunakan foto para tokoh agama dan pimpinan ormas Islam berbincang dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Dalam pertemuan itu pula Presiden mengatakan bahwa peran ulama sangat berpengaruh dalam menjaga keutuhan umat, sehingga presiden meminta para ulama untuk meningkatkan peran tersebut dengan memberikan nasihat yang menyejukkan dan membawa perdamaian. Adapun *lead* yang digunakan Republika sebagai berikut:

Presiden Joko Widodo mengundang puluhan ulama dari berbagai organisasi dan lembaga keislaman ke Istana Merdeka, Selasa (1/11). Para ulama menekankan, agar aksi unjuk rasa terkait dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama, pada Jumat (4/11) nanti berlangsung damai.

Selanjutnya, isi berita lebih menerangkan himbauan-himbuan yang disampaikan beberapa ulama dan menteri agama kepada peserta aksi untuk mematuhi aturan yang ada.

3. Berita pada hari Kamis, 3 November 2016 dengan judul: SBY: Tuntaskan Kasus Ahok

Dalam edisi ini, Republika menuliskan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono mengajak untuk menyelesaikan kegaduhan yang terjadi sampai rencana aksi 4-11 dengan cara fokus kepada permasalahan semula, yaitu pernyataan Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap telah menistakan agama. Selain itu, SBY juga menyangkal jika dirinya ikut menggerakkan massa. Dalam berita ini juga menjelaskan bahwa aksi

tidak diperlukan lagi karena presiden telah melakukan tuntutan dari para ulama dan para demonstran untuk memenjarakan Basuki Tjahaja Purnama.

4. Berita pada hari Jumat, 4 November 2016 dengan judul: Presiden: Tetap Tenang

Dari judul di atas, wartawan menuliskan bahwa Presiden Joko Widodo memberikan pernyataannya mengenai aksi yang akan berlangsung agar warga Jakarta untuk tidak perlu takut dan tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Adapun *lead* yang digunakan Republika sebagai berikut:

Presiden Joko Widodo menegaskan, masyarakat tak perlu memendam ketakutan berlebihan menjelang demo akbar yang rencananya diikuti ribuan massa pada (4/11). Jokowi meminta warga Jakarta tetap menjalani aktivitas seperti biasa.

Selanjutnya, isi berita lebih menerangkan pernyataan para tokoh baik dari pemerintah seperti Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan pimpinan aksi sendiri yaitu Rizieq Shihab bahwa aksi ini adalah aksi yang akan dilakukan secara damai sehingga masyarakat tidak perlu takut. Hal ini bertujuan untuk menguatkan pernyataan dari Presiden dan Wapres. bagaimana Dalam edisi ini, wartawan menuliskan bahwa aksi yang akan berlangsung adalah aksi yang damai. Selain itu wartawan juga mengambil narasumber dari pihak GNPF-MUI yang menyatakan bahwa aksi yang diselenggarakan bukanlah aksi SARA akan tetapi aksi menuntut penegakan hukum terhadap kasus Basuki Tjahaja Purnama bukan yang lain.

5. Berita hari Sabtu, 5 November 2016 dengan judul: Aksi Bermartabat

Dalam edisi ini, Republika menceritakan kronologi terjadinya aksi 4-11 secara keseluruhan berjalan dengan damai meski pada waktu berakhirnya aksi sempat terjadi keributan. Dari isi berita sendiri itu wartawan juga menuliskan mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh pimpinan massa dengan perwakilan pemerintah yang berjanji akan

menyelesaikan kasus Ahok selama dua pekan. Bantahan dari Ketua Umum Himpunan Mahasiswa (HMI) Islam Mulyadi Tamsir bahwa kericuhan bukan berasal dari massa HMI.

6. Berita hari Minggu, 6 November 2016 dengan judul: Ungkap Provokator

Berita ini menjelaskan tiga tema besar yaitu (1) mendesak aparat Kepolisian untuk segera mengungkap siapa aktor dibalik kerusuhan aksi, (2) tertangkapnya 10 provokator yang telah diamankan dan masih menjalani proses pemeriksaan oleh polisi serta sejumlah elemen masyarakat yang menyesalkan adanya provokator dan meyakini bahwa pelaku bukan dari peserta aksi (3) kisah terjadinya kericuhan dari saksi mata yang melihat awal mula terjadinya kericuhan, salah satunya adalah ustadz Arifin Ilham.

7. Berita hari Senin, 7 November 2016 dengan judul: Pesan Aksi Tersampaikan.

Berita yang disajikan wartawan pada edisi ini mengenai aksi yang damai diapresiasi oleh banyak kalangan. PB Nahdlatul Ulama (NU) dan PP Muhammadiyah, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin merilis pernyataan resmi mengapresiasi aksi yang telah berlangsung. berita ini juga menjelaskan bahwa aksi 4-11 bisa menunjukkan persatuan umat dan menjadi kemenangan bagi umat.

8. Berita hari Selasa, 8 November 2016 dengan judul: Ahok Diperiksa 9 Jam

Pada *lead* edisi ini mengisahkan tentang:

Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri sebagai saksi terlapor kasus dugaan penistaan agama (7/11). Ia diperiksa penyidik selama sembilan jam.

Dalam edisi ini wartawan menuliskan mengenai berjalannya pemeriksaan yang dilakukan polisi kepada Basuki Tjahaja Purnama dan pernyataan resmi oleh Ketua Umum MUI mengenai pendapat dan sikap

keagamaan terkait pernyataan Basuki Tjahaja Purnama di Kepulauan Seribu tergolong menghina al-quran dan ulama.

9. Berita hari Rabu, 9 November 2016 dengan judul: Jokowi Janji tak Lindungi Ahok

Berita ini menjelaskan tiga tema besar (1) janji Presiden Jokowi yang tidak akan melindungi Ahok yang sedang menjalani proses hukum (2) presiden menerima kritik dari beberapa pihak yang mengatakan bahwa pemerintah lamban menyikapi aksi (3) Ketua Umum PP Muhammadiyah meminta kepada kepolisian tidak masuk area tafsir mengenai penistaan agama (4) Bareskrim melakukan pemeriksaan dari pihak pelapor dan saksi ahli dari pihak terlapor dari pihak terlapor polisi memeriksa Pengurus Angkatan Muda Muhammadiyah dan Tim Advokasi Forum Anti Penistaan Agama (FAPA), sedangkan dari pihak terlapor, polisi memeriksa saksi Anggota DPR dari Fraksi PDIP sekaligus menjabat sebagai Dewan Penasihat Majelis Ulama Indonesia.

10. Berita hari Kamis, 10 November 2016 dengan judul: Presiden Minta Ormas Dinginkan Suasana

Berita pada edisi ini wartawan memberitakan mengenai kembalinya Presiden Joko Widodo mengundang pimpinan ormas Islam ke Istana Negara untuk bersama-sama mendinginkan suasana dan mengajak seluruh umat untuk bersatu. Dalam berita ini digambarkan bahwa pimpinan ormas Islam siap untuk menenangkan umat Islam dengan syarat pemerintah tetap memproses kasus Basuki Tjahaja Purnamasecara serius, adil, dan diproses sesuai hukum, serta tidak pura-pura. Pada berita ini juga dijelaskan Polda Metro Jaya yang tidak jadi menahan Sekretaris Jenderal Himpunan Mahasiswa Islam (Sekjen PB HMI) Ami Jaya Halim dengan pertimbangan subjektik dari penyidik.

BAB 1V

ANALISIS FRAMING TERHADAP TEKS PERISTIWA AKSI DAMAI 4 NOVEMBER 2016 DI JAKARTA DI HARIAN KOMPAS DAN REPUBLIKA

Analisis *framing* adalah upaya media untuk menonjolkan pemaknaan atau penafsiran atas suatu peristiwa. Analisis *framing* dengan menggunakan model yang diperkenalkan oleh Zongdang Pan dan Gerald M. Kosicki lebih menekankan pada wacana publik tentang suatu isu atau kebijakan yang dikonstruksikan. Analisis dilakukan ketika penulisan berita yang dilakukan oleh wartawan secara strategis dari sisi kata, *lead*, hubungan antar kalimat, foto, grafik, dan perangkat lain yang memperjelas suatu berita (Eriyanto, 2002: 254).

Proses menganalisis berita menggunakan analisis *framing* model Pan dan Kosicki yang mempunyai empat perangkat *framing* yaitu, struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Keempat struktur ini peneliti gunakan dalam menganalisa berita dari Surat Kabar Harian Republika dan Surat Kabar Harian Kompas. Dengan analisis framing model Pan dan Kosicki, penelitian ini berusaha untuk mengetahui kecenderungan dari berita mengenai aksi 4 November di SKH Kompas dan Republika. Adapun berita-berita di surat kabar Republika dan Kompas mengenai aksi 4 November 2016 sama-sama menurunkan sepuluh berita (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10) 2016. Di bawah ini tabel analisis *framing* Pan dan Kosicki terhadap pemberitaan mengenai aksi 4 November di SKH Kompas dan Republika.

A. Analisis Framing Pemberitaan Aksi Damai 4 November 2016 di Harian Kompas

1. Frame Kompas, 1 November 2016

Judul: “Elite Patut Jaga Kemajemukan”

Untuk Ketiga kalinya Presiden Joko Widodo Bertemu Prabowo Subianto

Struktur Sintaksis

Dalam struktur ini, pandangan Kompas terbentuk dalam skema atau bagan berita dengan menulis judul “Elite Patut Jaga Kemajemukan”. Dalam edisi ini Kompas menggambarkan bahwa para elite nasional patut andil dalam menyelesaikan masalah kebangsaan dengan damai dan sejuk. Hal ini didukung oleh *lead*.

Para tokoh elite nasional patut ikut menyelesaikan masalah kebangsaan dengan damai dan sejuk. Keterlibatan mereka, dari kalangan agama hingga politik, sangat penting dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan dan kemajemukan Indonesia.

Dalam berita ini, Kompas menggunakan kata “elite” untuk menunjukkan kepada khalayak bahwa semua orang yang memiliki pengaruh kepada masyarakat baik dari kalangan politik maupun agama, semua memiliki andil untuk menjaga keutuhan Indonesia dalam hal ini adalah kemajemukan yang dimiliki oleh Indonesia. Cara ini didukung oleh Kompas sebagai cara yang tepat guna menanggulangi permasalahan yang dianggap sensitif menjelang pilkada Jakarta sebagai pusat perhatian rakyat. Keberpihakan Kompas terlihat dari penggunaan kalimat “Presiden juga meminta kepada para tokoh bangsa agar bersedia bersama-sama mendinginkan suasana pilkada serentak 2017. Adapun isi berita pada edisi ini lebih membahas mengenai isi perbincangan yang telah dilakukan antara Presiden Joko Widodo dengan Prabowo. Salah satunya mengenai Pilkada DKI Jakarta dan rencana aksi 4 November. Kompas juga mengulas kembali pertemuan-pertemuan yang telah terjadi diantara keduanya. Pertemuan tersebut sudah dilakukan oleh keduanya sebanyak tiga kali.

Struktur Skrip

Dari struktur skrip dapat diamati dari kelengkapan unsur berita, yaitu, (*who*) Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, (*what*) pertemuan Presiden Joko Widodo dan Prabowo yang mengajak para elite politik nasional dari kalangan agama hingga politik untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan kemajemukan Indonesia, (*when*) Senin (31/10), (*where*) Desa Bojong Koneng, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, (*why*) pilkada serentak berjalan lancar dan menjadi pesta demokrasi bagi rakyat tanpa adanya upacac untuk memecah belah (*how*) meminta kepada para tokoh bangsa agar bersedia bersama-sama mendinginkan suasana pilkada serentak 2017 dan meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi. Dalam berita ini, Kompas juga lebih menggambarkan mengenai hubungan baik antara Presiden Joko

Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo yang sudah bertemu selama tiga kali.

Struktur Tematik

Struktur tematik ini terbagi atas beberapa tema: (1) para tokoh elite nasional mulai dari kalangan agama dan politik patut ikut menyelesaikan masalah kebangsaan dengan damai dan sejuk. Pentingnya para elite dalam menyelesaikan masalah ini ditampilkan dengan menampilkan pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa meski terkadang sering berbeda pendapat, namun tetap memiliki kepentingan yang sama yaitu untuk menjaga NKRI. Tema ini disusun dengan cara yang detail pada teks. Dalam teks juga ditampilkan bagaimana antara Presiden Joko Widodo dengan Prabowo saling menyampaikan harapan dan pesan yang sama. (2) momentum Pilkada tidak boleh dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan harus berlangsung dengan baik dan tenteram. Tema ini ditampilkan dengan menyatakan dua pesan yang sama antara Presiden Joko Widodo dan Prabowo. Keduanya berpesan untuk tidak mudah terprovokasi dan waspada setiap upaya yang dapat memecah belah bangsa. (3) hubungan Jokowi dan Prabowo relatif setelah Pilpres. Tema ketiga ini menampilkan tentang bagaimana seharusnya sebuah hubungan dalam sebuah perpolitikan. Dalam politik, rivalitas hanya terjadi ketika dalam masa pemilihan saja. Sehingga persaingan adalah sebuah kewajaran. (4) penilaian dari beberapa tokoh mengenai kunjungan Presiden ke rumah Prabowo. Dalam tema ini, menampilkan bagaimana penilaian para tokoh terhadap hubungan yang terjalin antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto yang sebelumnya sempat menjadi lawan politik saat pilpres tahun 2014.

Berita Kompas ini menunjukkan bagaimana media menjadi pembentukan citra, yakni citra yang baik, khususnya citra terhadap Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Struktur Retoris

Dari struktur retoris dapat dilihat dari foto yang ditampilkan oleh Kompas, yaitu foto Presiden Joko Widodo dan Prabowo yang sedang menaiki kuda di kediaman Prabowo. Selain itu Kompas juga melakukan

pemilihan kata, seperti: “tenteram” “pecah belah” “rival” dan “keakraban”. Kata “tenteram” digunakan oleh Kompas dalam pemilihan katanya yang digunakan untuk menekankan kepada khalayak agar Indonesia kembali aman dan damai. Kata “pecah belah” mengindikasikan bahwa ada upaya seseorang yang berusaha untuk memutus persatuan, menceraikan beraikan persatuan. Rival, Keakraban, dengan menulis kata “keakraban” Kompas ingin menampilkan kepada khalayak mengenai hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo sangat baik. Ada juga dapat dilihat dari pemakaian kata “elite” yang berarti orang-orang yang memiliki pengaruh di tengah-tengah masyarakat. selanjutnya kata “patut” yang cenderung pada sebuah kewajiban untuk dilakukan. Selain itu, dari struktur ini dapat dilihat bagaimana Kompas menjadikan Presiden sebagai pemeran utama yang berusaha untuk meredakan suasana dengan melakukan konsolidasi politik.

2. **Frame Kompas, 2 November 2016**

Judul: “Presiden Tidak Akan Intervensi”

SBY Temui Wapres dan Wiranto

Struktur Sintaksis

Analisis sintaksis dapat diamati bagaimana wartawan menyusun fakta dalam teks secara keseluruhan. Berita Kompas memakai judul “Presiden Tidak Akan Intervensi”. Di sini terlihat jelas, judul ini memberikan penegasan kepada khalayak bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan melakukan intervensi kasus Basuki Tjahaja Purnama. Hal ini dapat diamati dari susunan *lead*.

Presiden Joko Widodo tidak akan mengintervensi penanganan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama. Presiden juga tak menghalangi aksi unjuk rasa, tetapi hal itu harus dilakukan secara damai dan sesuai aturan.

Selain menampilkan *lead* yang menunjukkan sikap presiden, Kompas dalam menyusun fakta dengan cara menyatukan dan menguraikan pernyataan narasumber secara berurutan. Penyatuan itu dilakukan untuk lebih menguatkan sikap presiden. Narasumber tersebut di antaranya adalah, Ketum PPP Muhammadiyah, dan Menteri Polhukam Wiranto.

Dalam berita ini, Kompas juga menampilkan sikap Presiden yang mengizinkan untuk aksi unjuk rasa dengan memberikan penekanan berupa “syarat” aksi dilakukan secara damai.

Berita ini juga memberi latar yang mendukung gagasannya, latar yang dipakai berupa pernyataan dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto saat bertemu dengan para ulama yang menjelaskan perkembangan proses hukum kasus dugaan penistaan agama sudah berjalan. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat menunggu dengan tenang dan tidak resah. Selain itu, berita ini juga menghadirkan pertemuan antara Menko Polhukam Wiranto, Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan mantan presiden ke enam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pertemuan tersebut membahas mengenai aksi 4 November.

Struktur Skrip

Dari struktur skrip dapat dilihat dari bagaimana wartawan mengisahkan fakta, (*what*) Presiden tidak akan mengintervensi kasus Ahok dan juga tidak akan menghalangi Aksi unjuk rasa, (*who*) Presiden, (*when*) Selasa, 1/11, (*where*) Istana Merdeka, Jakarta, (*why*) untuk menjaga persatuan (*how*) Presiden mempersilahkan aparat untuk mengusut dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama.

Struktur Tematik

Dari struktur tematik, dalam edisi ini ada empat tema yang diangkat: (1) Presiden tidak akan mengintervensi kasus Ahok dan juga tidak akan menghalangi aksi unjuk rasa, (2) NKRI adalah final dan berkomitmen untuk menjaga kebangsaan jangan sampai terganggu oleh situasi politik (3) Proses hukum Ahok sudah diproses, masyarakat diminta untuk menunggu dengan tenang, (4) aksi bagian dari kebebasan berpendapat, tapi jangan sampai mengganggu kebebasan orang lain.

Struktur Retoris

Penekanan pada struktur ini pertama, terletak pada grafis dengan menampilkan gambar/foto. Kompas menampilkan foto Menteri

Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto yang didampingi Peengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Aqil Siradj, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nasir untuk menyampaikan hasil pertemuan dengan presiden, salah satunya presiden tidak akan mengintervensi kasus Basuki Tjahaja Purnama dan mengenai seputar rencana aksi 4 November. Dengan menampilkan foto Menteri Polhukam, Ketum MUI, dan Ketum PPP Muhammadiyah, merupakan perwakilan yang pas, baik dari pemerintah maupun umat Islam. Kedua, Kompas melakukan pemilihan kata dengan menggunakan kata “intervensi”, kata ini merupakan istilah dalam dunia politik yang berarti tidak mencampuri urusan dengan berlebihan.

3. Frame Kompas, 3 November 2016

Judul; “Pemerintah Jamin Keamanan Masyarakat”

Struktur Sintaksis

Dari struktur sintaksis akan melihat bagaimana wartawan menyusun berita. judul yang dipakai Kompas adalah “Pemerintah Jamin Keamanan Masyarakat”. judul ini diterangkan dalam *lead*.

Masyarakat tak perlu resah terhadap unjuk rasa terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama yang digelar esok. Pemerintah menjamin keamanan masyarakat.

Dalam *lead* tersebut, Kompas menekankan kepada khalayak bahwa pemerintah telah menjamin keamanan masyarakat saat aksi berlangsung. dijelaskan dalam teks bahwa, sebanyak 18.000 aparat akan diturunkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa. *Lead* berita didukung pula dengan kutipan pernyataan dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung menekankan kepada masyarakat untuk tetap beraktivitas biasa.

“Besok beraktivitas saja seperti biasa. Pokoknya besok aktivitas normal.”

Berita ini juga memakai latar yang mendukung gagasannya, latar yang digunakan berupa pernyataan dari Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang akan mengutamakan msyarakat jika terjadi kericuhan atau anarki

dalam aksi. Teknik penyusunan fakta seperti ini memiliki akibat pada makna yang akan ditampilkan kepada khalayak. Dalam kutipan sumber, Kompas menghadirkan beberapa narasumber yang mendukung gagasannya mengenai unjuk rasa, yakni unjuk rasa boleh tetap dilakukan asalkan harus dilakukan dengan cara yang baik. Narasumber tersebut di antaranya Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

“Kapolri mengatakan, unjuk rasa tersebut tidak dilarang karena merupakan hak warga negara yang dijamin konstitusi dan Kovenan Internasional untuk Hak Sipil dan Politik. Namun, unjuk rasa tersebut harus berlangsung damai dan tidak anarki”.

Struktur Skrip

Dari struktur skrip, kita akan melihat bagaimana *frame* tersebut didukung Kompas dengan cara mengisahkan fakta, yaitu: (*who*) Pemerintah, (*what*) menjamin keamanan masyarakat saat aksi unjuk rasa terjadi, (*when*) Rabu, 2 November 2016, (*where*) Jakarta (*how*) menurunkan aparat keamanan sebanyak 18.000 personil, mulai dari TNI, Polri satpol PP yang nantinya akan melakukan pengamanan di beberapa titik lokasi. Dengan cara mengisahkan berita seperti ini, Kompas ingin menekankan kembali mengenai sikap pemerintah dalam memperhatikan keamanan masyarakat dengan menurunkan aparat keamanan.

Struktur Tematik

Dari struktur tematik, ada empat tema yang diangkat dalam edisi ini: (1) pemerintah menghimbau masyarakat untuk beraktivitas seperti biasa karena pemerintah telah menjamin keamanan masyarakat dengan menurunkan 18.000 aparat keamanan untuk mengamankan aksi. Tema ini dalam teks didukung oleh kutipan Sekretaris Kabinet Pramono Anung Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (2) unjuk rasa tidak dilarang asalkan unjuk rasa itu damai dan tidak anarki, (3) SBY angkat bicara mengenai tuduhan intelijen yang ngawur dan tidak akurat saat melakukan pertemuan dengan Meko Polhukam Wiranto dan Wapres Jusuf Kalla. Tema ini dalam teks dapat dilihat dari kutipan mantan presiden ke- 6 Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang sendiri membantah

tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepadanya (4) kritikan kepada SBY, bahwa SBY tidak menunjukkan sikap negarawan yang baik. Tema ini medalam teks dapat diamati dari komentar para Ketua Partai, diantaranya Ketua Partai Golkar Yorris Raweyai, Ketua Partai Nasdem Taufik Basari, Ketua Partai Hanura Sarifuddin Sudding, yang semuanya merupakan partai koalisi dengan PDI-P. Dalam struktur ini, berita Kompas menunjukkan bagaimana media menjadi ajang perang simbolik antara pihak-pihak yang memiliki pengaruh terhadap permasalahan ini. masing-masing pihak saling mengedepankan alasannya atau klaim pembenar agar alasannya lebih diterima, dan menonjol ketika diterima leh khalayak.

Struktur Retoris

Penekanan pada struktur ini terletak pada gambar/foto yang ditampilkan oleh wartawan yaitu berupa foto kendaraan baja milik kepolisian. Foto tersebut menggambarkan sebuah persiapan yang matang dan menunjukkan terjaminnya keamanan masyarakat. Kompas juga menggunakan penekanan pada kata “jamin” disini ingin menekankan, bahwasannya kesiapan pemerintah yang benar-benar akan menjaga keamanan masyarakat jika sesuatu terjadi pada aksi. Dalam struktur ini, Kompas juga ingin menampilkan citra *good news* khususnya pada pemerintah yang berkomitmen dengan menjamin keamanan masyarakat. adapun citra berupa *bad news* dalam berita ini adalah dengan menampilkan tersudutnya Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilai tidak menunjukkan sikap kenegarawan, memanaskan situasi, selain itu SBY juga dibandingkan dengan Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto yang lebih mampu memberikan pesan sejuk kepada masyarakat.

4. Frame Kompas, 4 November 2016

Judul: “Presiden dan Wapres Berkantor Seperti Biasa”

Struktur Sintaksis

“Masyarakat tetap bekerja saja seperti biasa. Yang jelas saya ada di Jakarta.”

Sebelumnya, diberitakan bahwa pemerintah akan menjamin keamanan masyarakat saat menjelang aksi berlangsung. Pesan tersebut secara langsung disampaikan oleh Sekretrasi Kabinet Pramono Anung.

Sebanyak 18.000 aparat telah diturunkan untuk mengamankan aksi, mulai dari aparat Polri, TNI dan satpol PP.

Lead di atas juga secara jelas menunjukkan mengenai sikap konsisten pemerintah untuk meyakinkan masyarakat agar tidak resah terhadap adanya aksi, yakni dengan tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Pernyataan ini disampaikan Kompas melalui sumber yang akurat yakni Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Struktur Skrip

Dari struktur skrip akan dilihat bagaimana wartawan mengisahkan fakta, yaitu (*who*) Presiden dan Wakil Presiden, (*what*) menyatakan akan berkantor seperti biasa sepanjang jumat saat aksi digelar, (*why*) Aksi adalah hal yang biasa terjadi di negara demokrasi, (*how*) TNI melakukan latihan militer, mengerahkan sekitar 500 anggota Polri yang dinamai pasukan Asmaul Husna yang memiliki kemampuan yang baik tentang agama, 300 anggota polisi wanita berhijab.

Struktur Tematik

Struktur tematik ini terbagi menjadi beberapa tema: (1) Pesan dari Presiden dan Wakil Presiden yang akan tetap berkantor seperti biasa, hendaknya unjuk rasa dilakukan secara tertib dan mewaspadaai penyusupan yang akan mengacaukan keadaan (2) Polri menurunkan 500 anggota Kepolisian yang dinamakan pasukan Asmaul Husna yang memiliki kemampuan baik tentang agama dan 300 anggota polisi yang berhijab, (3) Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dimintai keterangan oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) terkait kasus Basuki Tjahaja Purnama.

Struktur Retoris

Dari struktur retoris dapat dilihat dari foto yang menampilkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta foto rekayasa lalu lintas demonstrasi 4 November 2016. Dengan menampilkan foto Presiden Wapres, Kompas ingin menenangkan masyarakat dengan jaminan pernyataan secara langsung dari Presiden. Selain itu, foto rekayasa lalu lintas digunakan untuk mendukung pernyataan presiden

bahwa aktivitas masih bisa dilakukan seperti biasa meski jalanan Jakarta dipadati oleh peserta aksi.

5. Frame Kompas, 5 November 2016

Judul: “Presiden: Aktor Politik Menunggangi”

Struktur Sintaksis

Struktur sintaksis dari pemberitaan Kompas tanggal 5 November 2016 mengambil judul “Presiden: Aktor Politik Menunggangi Aksi”. Judul tersebut merupakan penilaian Kompas mengenai aksi 4-11 yang berakhir dengan kerusuhan. Dengan pemakaian judul semacam itu, Kompas ingin menekankan bahwa aksi 4-11 merupakan aksi yang dimanfaatkan oleh para aktor politik. Judul yang dipakai oleh Kompas merupakan kutipan dari pernyataan Presiden Joko Widodo saat menggelar rapat koordinasi dengan terbatas di Istana Merdeka.

“Dan (kerusuhan) ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi.”

Berita ini juga memberi latar untuk mendukung gagasannya. Latar yang dipakai berupa informasi mengenai kerusuhan dengan menghadirkan kronologi aksi dari awal hingga akhir. Kompas juga menampilkan kerugian akibat dari kerusuhan yang terjadi dalam aksi, seperti kerusakan anggota polisi yang mengalami luka, rusaknya kendaraan sebanyak 18 unit dua diantaranya merupakan kendaraan polisi. Dalam penyusunan beritanya, Kompas juga memakai strateginya yaitu dengan menggunakan model anjing penjaga yang bersifat terbuka dan menggunakan bahasa yang lebih berani. Hal tersebut dapat dilihat dari judul berita Kompas sendiri “Presiden: Aktor Politik Menunggangi”.

Struktur Skrip

Struktur skrip dapat diamati dari unsur kelengkapan berita, (*who*) Presiden, (*what*) pernyataan Presiden yang menyayangkan kerusuhan pada aksi 4-11 yang ditunggangi oleh aktor-aktor politik, (*when*) Sabtu, 5/11 sesuai rapat Koordinasi terbatas, (*where*) Istana Merdeka Jakarta, (*how*) Adanya ketegangan yang terjadi di depan Istana Merdeka pada pukul 19.00 yang seharusnya sesuai Undang-Undang No 9 Tahun 1999 mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum berakhir pada pukul 18.00. Samapi

pada pukul 20.00, kerusuhan terjadi Istana Merdeka. Dengan mengisahkan peristiwa seperti ini, berita ingin menekankan kepada khalayak bahwa aksi 4-11 merupakan aksi yang telah ternoda dengan adanya kerusuhan yang disebabkan oleh aktor politik.

Struktur Tematik

Dari sudut tematik, berita ini disusun dalam tema besar: (1) ungkapan kekecewaan presiden terhadap kericuhan dalam aksi dan Ucapan terima kasih Presiden kepada Ulama, Kiai, Habaib, serta aparat keamanan yang telah menjaga unjuk rasa sehingga berjalan tertib dan damai, (2) kronologi aksi 4 November, tema ini dalam teks dapat diamati dari kutipan atas sumber Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal M Iriawan (3) kesepakatan antara GNPF-MUI dengan pemerintah yang berjanji akan menyelesaikan kasus Bsuki Tjahaja Purnama dalam dua minggu. Tema ini dapat dilihat dari kutipan atas sumber Wapres Jusuf Kalla.

Struktur Retoris

Dalam struktur retoris, Kompas menggunakan penekanan pada kata “ditunggangi”, yang berarti dimanfaatkan untuk sebuah kepentingan, gerakan, klaim ini ditujukan kepada para aktor politik yang diduga dibalik kerusuhan yang terjadi dalam aksi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Presiden Jokowi yang menyatakan, “Dan (kerusuhan) ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi”. Kompas juga meletakkan berita ini pada halaman pertama dengan judul berukuran besar yang dicetak tebal dan disertai foto Bundaran Hotel Indonesia (HI) yang dipenuhi massa dengan pakaian serba putih.

6. Frame Kompas, 6 November 2016

Judul “Presiden Punya Data Intelijen”

Tudingan Ada Aktor Dalam Demo tak Mendasar

Struktur Sintaksis

Struktur sintaksis ini, pandangan Kompas terwujud dalam skema atau bagan dalam berita dengan menulis judul “presiden Punya Data Intelijen” dengan anak judul “Tudingan Aktor Dalam Demo Tak

Mendasar”. Meskipun antara judul dan anak judul bertentangan namun judul utama lebih dipertebal dengan tujuan untuk menyanggah anak judul yang dikutip dari pernyataan Ketua GNPf-MUI Bachtiar Nasir.

Selain itu, judul dipertegas dengan *lead* yang berisi tentang pernyataan dari Jenderal TNI Gatot Nurmantyo bahwa presiden Jokowi tidak sembarangan bicara terkait aktor yang menunggangi kerusuhan dalam aksi damai jumat malam, Presiden memiliki data yang diperoleh dari laporan intelijen, laporan kepolisian dan lainnya.

Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan, Presiden Joko Widodo tidak sembarangan bicara terkait aktor yang menunggangi kerusuhan dalam aksi damai Jumat malam. Presiden punya data, yaitu laporan intelijen, laporan kepolisian, dan lainnya.

Lead ini secara jelas menunjukkan kuatnya pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai adanya aktor politik yang memanfaatkan aksi. Pernyataan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dipakai untuk mendukung kalimat pembuka. Adapun latar yang ingin dibentuk oleh Kompas adalah bahwasannya kerusuhan yang terjadi saat menjelang berakhirnya aksi itu benar-benar terjadi dan dimanfaatkan oleh aktor politik dengan adanya data yang dimiliki oleh Presiden. Di sini Kompas juga memakai strategi khususnya dalam peristiwa yang dianggap penting, dan berkembang di masyarakat yaitu menggugat secara tidak langsung, ini terlihat dari gagasan yang ingin disampaikan mengenai judul berita sebelumnya “Presiden: Aktor Politik Menunggangi”, ingin membuktikannya bahwa apa yang disampaikan bukanlah pendapat dari Kompas sendiri, namun sesuai dengan fakta yang dihimpun bahwa tuduhan itu benar adanya dengan bukti data yang dimiliki oleh presiden. Selain latar, Kompas juga menghadirkan kutipan sumber sebagai penguat berita, membangun objektivitas, keseimbangan, tidak memihak, dan bukanlah opini wartawan. Dalam edisi ini, Kompas menyusun dua kutipan narasumber. Yang pertama adalah pernyataan dari Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, kedua, Ketua GNPf-MUI Bachtiar Nasir,

“Bukti jelas. Sekitar 200.000 orang itu sejak jumat siang sampai sebelum shalat isya berunjuk rasa tertib dan damai. Tuntutannya sudah dipenuhi pemerintah. Namun, ada pihak lain yang tetap tidak mau meninggalkan kawasan di depan Istana,” ujar Panglima TNI.

Pernyataan di atas disanggah oleh oleh Bachtiar Nasir

“Aktor Politik yang disebutkan oleh Presiden salah besar dan tidak mendasar. Kecuali, Presiden dapat informasi dari intelijen dan memiliki bukti sendiri. Itu diluar domain kami”.

Adapun pernyataan yang lainnya adalah tambahan. Berita pada edisi ini secara keseluruhan berisi dua pandangan yang berbeda. yaitu dari sudut pandang pihak Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang membenarkan pernyataan presiden bahwa aksi memang telah ditunggangi aktor politik dan pihak GNPF-MUI menyanggah tuduhan tersebut. Dua pendapat itu disusun oleh Kompas dengan empat paragraph awal berisi pendapat yang setuju bahwa ada aktor politik yang memanfaatkan situasi dengan adanya data intelijen yang dimiliki Presiden, sedangkan empat paragraph selanjutnya berisi pendapat yang tidak membenarkan adanya aktor politik dibalik kerusuhan.

Struktur Skrip

Dari struktur ini, Kompas menempatkan *who* (Jenderal TNI Gatot Nurmantyo) *what* (Presiden Punya data intelijen yang mengatakan bahwa adanya provokator dalam aksi) *why* (penyebab kerusuhan dalam aksi) *when* (5/11) *where* (Jakarta) *how* (adanya laporan dari intelijen, kepolisian dan lainnya mengenai penyebab kerusuhan dalam 4-11). Dengan mengisahkan kontroversi seperti itu, berita ingin menekankan bahwa masing-masing saling mempertahankan pendapatnya dengan argumen yang kuat.

Struktur Tematik

Tema yang diangkat oleh Kompas pada edisi ini adalah; (1) Pernyataan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang membenarkan ucapan Presiden Jokowi bahwa ada provokator dalam aksi dengan bukti data-data yang telah dimiliki Presiden, dalam teks, tema ini didukung dengan alasan-alasan yang kuat, yakni bukti berupa data yang dimiliki oleh presiden dari sumber yang kuat. Seperti intelijen, kepolisian. Selain itu, tema ini juga ingin menekankan bahwa apa yang diucapkan presiden tidak sembarangan. Selain argumen presiden tidak sembarangan dalam berbicara, tematik ini juga didukung dengan penulisan fakta yang mendukung gagasan. Elemen wacana yang (2) sanggahan dari pihak

GNPF-MUI yang tidak membenarkan tuduhan yang mengatakan bahwa adanya provokator dalam aksi khususnya dari peserta aksi, (3) Proses penyidikan terhadap Ahok yang dilakukan secara terbuka, (4) Kembali normalnya suasana kota Jakarta pasca aksi 4-11.

Struktur Retoris

Penekanan pada stuktur ini adalah dengan lebih menebalkan judul dibandingkan dengan judul berita lainnya, *font* yang lebih besar dan warna hitam pekat. Hal ini dilakukan oleh Kompas sebagai penonjolan dan mengarahkan pembaca untuk menarik perhatian dari pembaca. Berita dalam edisi ini tetap diletakkan Kompas di halaman pertama meski tidak disertai foto.

7. Frame Kompas, 7 November 2016

Judul: Dugaan Penistaan Agama

Konsolidasi Politik dan Kenegaraan Dibutuhkan

Struktur Sintaksis

Struktur sintaksis dari pemberitaan Kompas tanggal 7 November 2016 mengambil judul “Dugaan Penistaan Agama” dengan anak judul Konsolidasi Politik dan Kenegaraan Dibutuhkan Presiden. Judul tersebut merupakan penilaian Kompas mengenai penilaian pemerintah yang menyatakan perlunya konsolidasi politik dan kenegaraan yang tetap dibutuhkan untuk mengembalikan suasana atau keadaan Indonesia seperti semula, yakni damai dan tenang. Hal ini diperkuat oleh *lead*:

Meski tak ada yang perlu dikhawatirkan dengan kondisi Tanah Air saat ini, pemerintah menilai masih dibutuhkan konsolidasi politik dan kenegaraan. Terkait hal itu, dalam minggu ini pemerintah akan mengundang tokoh politik dan tokoh agama untuk memberikan masukan dalam rangka memberikan rasa sejuk dan mendinginkan suasana.

Dalam berita ini, Kompas menghadirkan narasumber-narasumber yang mendukung gagasannya yakni pentingnya konsolidasi politik dan kenegaraan. Di sisi lain, Kompas juga menyertakan kekecewaan Kompas mengenai juru kamera Kompas TV Muhammad Guntur yang mengalami penganiayaan saat meliput aksi, serta sanggahan terhadap tuduhan

sebagai pelempar botol air mineral ke arah barisan polisi. Di sini, Kompas ingin menekankan bahwa jurnalis tidak boleh dijadikan sasaran kemarahan, main hakim sendiri serta kerja jurnalis dilindungi undang-undang. Penegasan itu ditampilkan dengan cara menyertakan tanggapan dari Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Suwarjono yang mengatakan bahwa jurnalis bekerja dilindungi undang-undang.

Struktur Skrip

Dari struktur ini, Kompas menempatkan: (*who*) Pemerintah dan Presiden, (*what*) Konsolidasi politik dan kenegaraan dibutuhkan, (*when*) Minggu, 6 November 2016, (*where*) Istana Bogor, Jawa Barat, (*why*) untuk menjaga kedamaian dan persatuan Tanah Air, (*how*) mengundang tokoh politik, tokoh agama untuk berdialog bersama meminta masukan dan bersama membangun persatuan Indonesia.

Struktur Tematik

Tema yang diangkat dalam edisi ini adalah: (1) upaya untuk melakukan konsolidasi politik dan kenegaraan, (2) seruan perdamaian, (3) rencana pemeriksaan terhadap Basuki.

Struktur Retoris

Pada unsur retoris, Kompas menekankan pada judul utama yaitu “Dugaan Penistaan Agama”. Kompas ingin menampilkan dengan memberikan himbauan bahwa dengan adanya peristiwa berupa dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama akan mengganggu kestabilan Indonesia. Selain itu, Kompas juga menggunakan kata “konsolidasi politik” yang menunjukkan bahwa solusi kegaduhan yang terjadi pasca dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki adalah dengan melakukan konsolidasi politik atau penguatan politik agar situasi perpolitikan Indonesia kembali normal. Selain itu, Kompas juga menyertakan kata “kenegaraan” yang berartitilangkah-langkah yang akan ditempuh sesuai dengan bentuk negara.

8. Frame Kompas, 8 November 2016

Judul: “Presiden Menemui Sejumlah Pihak”

Struktur Sintaksis

Dari analisis sintaksis, pandangan Kompas terwujud dalam skema atau bagan dalam berita. Judul berita Kompas “Presiden menemui Sejumlah Pihak”. Dalam berita ini, Kompas ingin menekankan kepada khalayak bahwa presiden tidak tinggal diam dan lepas tangan mengenai beberapa peristiwa dari dampak kasus Basuki Tjahaja Purnama dan peristiwa pasca aksi 4-11. Salah satunya yaitu agenda presiden yang melakukan komunikasi politik dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah ikut andil dalam mengamankan aksi. Hal ini didukung oleh *lead*.

Presiden Joko Widodo, Senin (7/11), memberikan arahan kepada prajurit TNI di Markas Besar TNI Angkatan Darat dan kemudian mengunjungi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Setelah itu, presiden menggelar pertemuan dengan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal M Iriawan, Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal Teddy Lhaksana, serta sejumlah petinggi TNI dan Polri di Istana Merdeka, Jakarta.

Dari *lead* di atas dilihat bahwa usaha Presiden tersebut adalah sebagai wujud dari komunikasi politik yang dianggap mampu untuk mengembalikan suasana seperti semula. Meskipun, presiden dinilai lamban untuk melakukannya. Sebagaimana pernyataan Ketua Umum PBNU Aqil Siradj setelah menemui Presiden. Aqil Siradj sangat menyayangkan kelambanan pemerintah yang lamban melakukan komunikasi politik dengan rakyat. Aqil Siradj juga mengingatkan bahwa pemimpin tidak boleh mengeluarkan ujaran yang mengandung kontroversi.

Struktur Skrip

Dari struktur ini, Kompas menempatkan; *what* (Presiden Joko Widodo) menemui sejumlah Pihak, *who* (Presiden), *when* (Senin, 7/11), *where* (Markas Besar TNI Angkatan Darat, kantor PBNU, Istana Merdeka), *why* (ucapan terimakasih yang telah mengamankan aksi sehingga aksi menjadi sejuk dan damai), *how* (Presiden memiliki jadwal memberikan arahan kepada para Prajurit TNI di Markas Besar TNI

Angkatan Darat, kemudian mengunjungi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan menggelar pertemuan dengan Kapolda Metro Jaya).

Struktur Tematik

Tema yang diangkat oleh Kompas pada edisi ini adalah: (1) jadwal kegiatan Presiden yang menemui jajaran TNI Angkatan Darat, Polda Metro Jaya, dan Ketum PBNU untuk menyampaikan ucapan terima kasih karena telah mengamankan aksi, (2) kritikan Ketum PBNU Aqil Siradj terhadap Presiden yang mengatakan aksi ditunggangi oleh aktor politik, (3) Ahok telah diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama, (4) himbaun polisi untuk tidak menyebarkan kebencian melalui medsos.

Struktur Retoris

Pada unsur retoris, Kompas menekankan pada gambar/foto Presiden Joko Widodo di dampingi Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang menyalami para personel TNI yang ikut mengamankan aksi. Hal ini dimaksudkan untuk memberi penonjolan bahwa dengan gambar tersebut pembaca paham, Presiden memang benar-benar sedang melakukan konsolidasi politik. Selain itu, Kompas menggunakan kata “konsolidasi” yang berarti upaya untuk memperteguh atau memperkuat hubungan, persatuan atau peleburan. Kedua Kompas menggunakan kata “komunikasi politik” yang berarti komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan tokoh-tokoh politik atau orang yang memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat. Di sini Kompas juga ingin menunjukkan kembali kepada khalayak bahwa Presiden sangat berupaya untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi.

9. Frame Kompas, 9 November 2016

Judul: “Presiden tak Akan Lindungi Basuki

Struktur Sintaksis

Lead yang digunakan pada edisi ini adalah

Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan melindungi Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama terkait kasus penistaan agama yang dilakukannya. Presiden juga menyatakan menerima kritik dari sejumlah pihak terkait kelambanan pemerintah dalam membangun komunikasi politik.

Dalam edisi ini, Kompas ingin menekankan kepada khalayak bahwa pemerintah khususnya presiden benar-benar tidak akan melindungi

Basuki dari jeratan hukum yang sedang dihadapi. Skema semacam ini ditempatkan dari awal sampai akhir teks, dengan mengambil kutipan dari beberapa narasumber. Di antaranya Ketua Umum PP Muhammadiyah, Wiranto, dan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian.

Struktur Skrip

Dari struktur skrip, kita akan melihat bagaimana *frame* tersebut disusun Kompas dengan mengisahkan fakta, yaitu (*who*) Presiden, (*what*) menegaskan tidak akan melindungi Basuki dan akan menrima kritik dari sejumlah pihak, (*when*) Selasa, 8/11, (*where*) Gedung Dakwah PP Muhammadiyah (*why*) Sudah masuk pada proses hukum (*how*) meminta semua pihak untuk bersabar dan percaya pada proses hukum yang sedang berjalan.

Struktur Tematik

Dilihat dari tematiknya, berita ini disusun dalam tema besar, yaitu (1) penegasan kembali oleh Presiden yang tidak akan melindungi Basuki, (2) presiden menerima kritik, (3) himbauan kepada masyarakat untuk bersabar dan menyerahkan semua kepada pihak Kepolisian. tentang bagaimana masing-masing narasumber memberikan pendapat atau evaluasi mengenai pasca aksi 4 November. Tema ini dapat dilihat dari awal hingga akhir teks berita yang menyampaikan untuk tetap menjaga persatuan dan bersabar dan percaya kepada kepolisian yang sudah menjanjikan untuk menyelesaikannya secara cepat dan transparan.

Struktur Retoris

Dari struktur retoris, Kompas menggunakan penekanan pada kata “tak akan” dan “menegaskan” klaim ini ditujukan kepada masyarakat bahwa presiden benar-benar tidak akan melindungi Basuki Tjahaja Purnama. Hal ini diperkuat dengan pernyataan presiden secara langsung yang menyatakan

“Sekali lagi, ini juga rakyat perlu tahu, saya tidak akan melindungi saudara Basuki Tjahaja Purnama karena sudah diproses hukum.”

10. Frame Kompas, 10 November 2016

Judul “Presiden Terus Bersilaturahmi”

Sekitar 20 Ormas Islam Diundang ke Istana

Struktur Sintaksis

Struktur sintaksis, dapat diamati dari bagaimana wartawan menyusun fakta dalam teks berita secara keseluruhan. Berita Kompas memakai judul “Presiden Terus Bersilaturahmi”. Di sini, Kompas ingin menunjukkan sikap presiden yang masih berusaha untuk mencairkan ketegangan dan kembali menegaskan bahwa presiden tidak akan melakukan intervensi dan melindungi kasus Basuki Tjahaja Purnama. Hal ini dibuktikan dengan melakukan silaturahmi kepada ormas Islam. Dalam anak judul, Kompas menginformasikan bahwa sebanyak 20 ormas Islam diundang ke Istana oleh Presiden. Hal ini dipertegas dengan *lead*.

Dalam pertemuan kemarin, presiden menegaskan lead berita ini juga didukung pula dengan kutipan Ketua Umum Al Washliyah Yusnar Yusuf, yang mana presiden berjanji untuk tegas dan berlaku adil dalam kasus Ahok.

Dari penyampaian berita seperti itu, Kompas menekankan kepada khalayak bahwa Presiden tidak akan mengintervensi dan melindungi kasus Basuki dan meminta masukan kebijakan lain yang dapat diambil pemerintah. Salah satunya dengan mengundang para tokoh.

Struktur Skrip

Dari struktur skrip, kita akan melihat bagaimana *frame* tersebut disusun Kompas dengan cara mengisahkan fakta, yaitu (*who*) Presiden Joko Widodo, (*what*) terus bersilaturahmi, (*when*) Rabu, 9/11, (*where*) Istana Merdeka, Jakarta, (*why*) dianggap masih ada sebagian umat yang kecewa setelah aksi 4 November (*how*) mengundang sekitar 20 pemimpin ormas Islam.

Struktur Tematik

Penulisan fakta oleh wartawan dalam menyajikan berita mengambil beberapa sudut pandang berupa tema: (1) usaha Presiden yang terus bersilaturahmi dan menegaskan kembali bahwa tidak melakukan intervensi dan melindungi kasus Basuki, (2) Polri melakukan proses hukum dengan memintai keterangan dari sejumlah pihak salah diantaranya pengajar hukum pidana Universitas Islam Indonesia, Mudzakkir dan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Darussalam, Ibnu

Baskoro, (3) Barisan Relawan Jokowi (Bara-JP) melaporkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dengan tuduhan makar.

Struktur Retoris

Penonjolan-penonjolan pada struktur retorik terletak pada foto dan ukuran judul berita yang digunakan. Kompas menampilkan foto keakraban Presiden Joko Widodo yang menerima kedatangan pimpinan organisasi Islam dengan duduk bersama di Istana Merdeka. Adapun mengenai judul, Kompas menggunakan *font* lebih besar dibandingkan dengan judul yang lain.

B. Analisis Framing Pemberitaan Aksi Damai 4 November 2016 di Harian Republika

1. Frame Republika, 1 November 2016 Judul “Jokowi-Prabowo Dinginkan Suasana”

Struktur Sintaksis

Dari struktur sintaksis, pandangan Republika tanggal 1 November 2016 mengambil judul “Jokowi-Prabowo Dinginkan Suasana”. Dari judul tersebut Republika menjelaskan tentang pembahasan yang dilakukan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk kembali mengembalikan suasana menjadi tenang. Selain itu, Republika ingin menyampaikan kepada khalayak bahwa hubungan antara Presiden dengan Prabowo baik-baik saja. Di sini, Republika menggunakan kata “dingin” dan “seteru” yang memberikan dampak psikologis. Kata-kata dinginkan dan meneduhkan merupakan penilaian Republika yang menggambarkan sesuatu keadaan yang baik itu adalah sebuah suasana yang damai, tenang kembali seperti biasanya. Khususnya saat menjelang Pilkada serentak 2017. Adapun kata “seteru” disini menunjukkan bahwa seseorang yang pernah bersaing tetap akan menjalin hubungan baik setelah persaingan selesai.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menemui mantan seterunya semasa pemilihan presiden (Pilpres), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di Bogor, Senin, (30/10). Selepas kunjungan tersebut, keduanya menginginkan suasana menjelang Pilkada serentak 2017 berlangsung menyejukkan.

Lead menerangkan tentang kunjungan Presiden ke kediaman Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor. Keduanya memiliki harapan yang sama yakni menginginkan suasana kembali seperti semula dan mengharapkan Pilkada Jakarta berlangsung damai.

Narasumber berita antara lain: Presiden Jokowi, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua DPR Ade Komarudin dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Dalam teks berita, Republika mewancarai empat orang, Presiden Jokowi, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo, dan yang dua lainnya Ketua DPR Ade Komarudin dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Adapun sumber dari Ketua DPR Ade Komarudin dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon berisi tentang tanggapannya mengenai kunjungan Presiden ke rumah Prabowo. Mereka memiliki pandangan yang sama bahwa hal tersebut adalah langkah positif yang harus dicontoh oleh yang lain khususnya pada masa tegang yang sedang terjadi.

Struktur Skrip

Dari struktur ini Republika menempatkan (*who*) Presiden Jokowi dan Prabowo, (*what*) dinginkan suasana, (*where*) Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, (*when*) Senin, 31 Oktober 2016, (*why*) rencana aksi 4 November terkait dugaan penistaan agama oleh Ahok yang beriringan dengan adanya masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017, (*how*) meminta agar para tokoh agama dan tokoh politik menyampaikan imbuhan yang mendinginkan suasana.

Struktur Tematik

Tema yang diangkat oleh Republika pada edisi ini adalah: (1) Kunjungan Presiden Jokowi ke rumah Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus mantan rivalnya pada saat pilpres Prabowo Subianto. (2) Hubungan baik antara Jokowi dan Prabowo. (3) Isi bahasan yang dibicarakan oleh Presiden Jokowi dan Prabowo mengenai aksi 4-11 (4) harapan keduanya mengenai masa kampanye Pilkada berlangsung damai.

Struktur Retoris

Dari struktur retoris, penggunaan kata dinginkan merupakan sebuah metafora. Kata dingin biasanya digunakan untuk mengatasi keadaan ataupun suhu yang dalam keadaan panas. Ditambah pada sub judul dengan menggunakan kata “mendinginkan” Gambar yang dipakai adalah

Joko Widodo dan Prabowo menunggang kuda beriringan dan keduanya tersenyum. Sama seperti Kompas, berita pada edisi ini diletakkan di halaman pertama oleh Republika.

Dari seluruh uraian analisis *frame* di atas pada pemberitaan harian Republika tanggal 1 November 2016, mengambil judul “Jokowi-Prabowo Dinginkan Suasana”. Republika menekankan pada judul yang seolah ingin menunjukkan kepada pembaca mengenai hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra yang baik pasca pilpres dan layak menjadi contoh yang dapat ditiru oleh masyarakat.

2. Frame Republika, 2 November 2016

Judul “Ulama Imbau Unjuk Rasa Damai”

Struktur Sintaksis

Dari struktur sintaksis akan dilihat bagaimana frame ini dalam skema yang dibuat. Judul yang digunakan oleh Republika adalah “Ulama Imbau Unjuk Rasa Damai”. Judul ini memberikan pemaknaan kepada khalayak bahwa ulama memiliki peran penting di tengah-tengah masyarakat dalam menjaga keutuhan umat. Judul tersebut diperkuat dengan *lead*.

Widodo mengundang puluhan ulama Presiden dari berbagai organisasi dan lembaga keislaman ke Istana Merdeka, Selasa (1/11). Para ulama menekankan, agar aksi unjuk rasa terkait dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama, pada Jumat (4/11) nsnti berlangsung damai.

Dalam *lead* tersebut, Republika menekankan kepada khalayak bahwa Ulama memiliki pengaruh yang besar bagi umat. Republika juga memberikan latar, hal ini diperkuat dengan pernyataan Presiden yang dimuat oleh Republika

“Nasihat yang menyejukkan dan membawa pesan perdamaian sangat dinanti dari para ulama”.

Dengan memberikan kutipan semacam itu, memberi asumsi bahwa ulama menjadi garda terdepan dalam permasalahan tersebut, sehingga harus segera mengambil langkah untuk meredakan umat dan menyeru kepada para peserta aksi untuk melakukannya dengan damai dan tertib.

Struktur Skrip

Dari analisis skrip, ini dapat dilihat bagaimana cara menyusun berita dengan cara mengisahkan atau menceritakan fakta. Unsur-unsur yang ada di dalam berita: (*what*) Ulama menghimbau para peserta aksi untuk melakukan unjuk rasa secara damai, (*who*) Ulama dan Jokowi, (*what*) menghimbau agar unjuk rasa dilakukan dengan damai, (*where*) Istana Merdeka, (*when*) 1 November 2016, (*why*) menjaga keutuhan umat, (*how*) meningkatkan peran ulama yang memiliki pengaruh besar bagi umat dengan memberikan nasihat yang menyejukkan yang membawa kedamaian. Dengan mengisahkan fakta seperti ini, berita ingin menekankan kepada khalayak bahwa hanya ulama yang bisa menenangkan massa. Di mana, dalam pandangan Islam, ulama merupakan seorang yang disegani dan memiliki pengaruh besar kepada umat.

Struktur Tematik

Dari struktur tematik terdiri dari beberapa tema: (1) Presiden Jokowi mengundang puluhan ulama dari berbagai organisasi dan lembaga keislamaan, (2) himbauan Ketua Umum Majelis ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin kepada peserta aksi agar aksi dilakukan dengan cara yang tertib dan damai, (3) Presiden berjanji tidak akan mengintervensi kasus Ahok, (4) Ketua PBNU Said Aqil Siradj dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir mempersilakan warga Nahdliyin dan Muhammadiyah untuk ikut melakukan aksi dengan syarat tidak perlu membawa atribut ormas masing-masing.

Struktur Retoris

Penekanan oleh redaksi dalam menyajikan berita di halaman pertama dengan dipertegas judul yang dicetak tebal dan memiliki ukuran *font* yang paling besar dibanding berita yang lain dalam satu di halaman yang sama. Hal ini dilakukan oleh Republika dengan tujuan pembaca memberikan perhatian lebih pada berita tersebut. Selain itu, Republika juga dilengkapi dengan menampilkan foto para ulama yang duduk bersama di meja Istana bersama Presiden dengan wajah diantaranya Ketum PB NU Aqil Siradj, Ketum MUI Ma'ruf Amin, dan Ketu PPP Muhammadiyah yang ketiganya merupakan ormas terbesar yang memiliki pengaruh besar terhadap umat Islam Indonesia.

3. Frame Republika, 3 November 2016

Judul “SBY: Tuntaskan Kasus Ahok”

Kapolri Menilai Tuntutan Kepada Jokowi tak Lagi Diperlukan

Sintaksis

Dari struktur sintaksis akan dilihat bagaimana Republika menyusun fakta dalam skema keseluruhan. Judul Republika sangat jelas, menunjukkan sikap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang angkat bicara mengenai kegaduhan yang terjadi. Judul ini memberikan pemaknaan kepada khalayak bahwa SBY mengajak untuk mencari akar permasalahan yang terjadi dan meminta kepada kepolisian untuk segera menuntaskan kasus Basuki Tjahaja Purnama. Judul tersebut juga diperkuat dengan *lead*.

“Jakarta- Presiden ke 6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara soal rencana demonstrasi akbar menuntut penegakan hukum atas dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahaja Purnama alias Ahok, Kemarin. SBY menekankan, akar pemicu unjuk rasa tersebut mesti dituntaskan agar suasana kembali adem”.

Dalam *lead* tersebut, secara jelas Republika menunjukkan tindakan yang tepat untuk menyelesaikan akar pemicu unjuk rasa yang akan terjadi. teknik penyusunan fakta seperti ini mempunyai akibat pada makna berita yang ingin ditampilkan kepada khalayak. Di sini, Republika memberi penekanan yang lebih atas pendapat seseorang yaitu SBY diuraikan dengan detail yang panjang, yakni sebanyak lima paragraf. Republika juga memberikan latar informasi kasus Basuki harus diperlakukan sesuai hukum yang berlaku agar keadaan kembali seperti semula. Hal ini diperkuat dengan pernyataan SBY:

“Jadi, kalau ingin negara ini tidak terbakar oleh amarah para penuntut keadilan, Pak Ahok ya mesti harus diproses secara hukum,”

Struktur Skrip

Dari struktur skrip terdapat unsur-unsur berita (*what*) konferensi pers, (*who*) SBY, (*when*) Rabu, 2 November 2016, (*where*) Cikeas Bogor, (*why*) tanggapan tentang banyaknya protes dan unjuk rasa dan penyangkalan SBY mengenai tuduhan sebagai salah satu aktor politik yang menggerakkan massa, (*how*) dengan mencari pemicu akar masalah

sampai munculnya demonstrasi dan permasalahan ini harus diproses secara hukum. Dengan cara mengisahkan berita seperti ini, berita ingin menekankan kepada khalayak bahwa perkara dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok serta aksi 4-11 menjadi peristiwa yang telah menarik banyak perhatian.

Struktur Tematik

Dari struktur tematik, berita ini disusun dalam beberapa tema: (1) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara mengenai rencana demonstrasi menuntut penegakan hukum atas kasus Ahok. (2) SBY menyangkal mengenai tuduhan ikut menggerakkan massa, (3) menagih janji pernyataan Jokowi yang tidak akan melakukan intervensi pada kasus Ahok. Elemen wacana yang dipakai di antaranya adalah detail dan kohorensi. Pendapat SBY diuraikan dengan detail dan panjang. Adapun Kohorensi yang dipakai berupa kohorensi penjelas dan sebab-akibat.

Struktur Retoris

Struktur ini dapat dilihat dari penonjolan Republika yakni melalui grafis dengan meletakkan berita tersebut di halaman pertama. Judul yang dicetak lebih tebal dengan ukuran *font* yang berbeda dibandingkan dengan judul berita lainnya. Dengan menggunakan simbol tulisan tersebut Republika memperlihatkan pemberitaan tentang aksi 4-11 mendapat perhatian dari semua kalangan tak terkecuali mantan presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

Selain itu, grafis lain yang dipakai oleh Republika yaitu menampilkan foto aparat Kepolisian dengan nama pasukan Asmaul Husna dan foto rekayasa lalu lintas ketika aksi berlangsung. Di sini, Republika ingin menekankan kepada Kepolisian yang menjadi salah satu kewajibannya yaitu untuk segera memproses Kasus Basuki Tjahaja Purnama, sedangkan foto rekayasa lalu lintas Republika ingin menyampaikan kepada masyarakat meskipun akan diselenggarakan aksi, masyarakat msaih bisa melakukan aktivitas seperti biasa. SBY juga memakai metafora tertentu untuk memberi istilah “lebaran kuda” untuk menjelaskan akibat dari tidak segeranya pemerintah dalam menyelesaikan kasus tersebut.

4. Frame Republika, 4 November 2016

Judul “Presiden: Tetap Tenang”

Struktur Sintaksis

Pandangan Republika terwujud dalam skema atau bagan berita yaitu dengan judul “Presiden: Tetap Tenang” judul ini memberikan pemaknaan kepada khalayak bahwa aksi 4-11 adalah aksi yang damai sehingga masyarakat tidak perlu takut. Hal ini dapat diamati dari susunan *lead*.

Jakarta- Presiden Joko Widodo menegaskan, masyarakat tak perlu memendam ketakutan berlebihan menjelang demo akbar yang rencananya diikuti ribuan massa pada Jumat (4/11). Jokowi meminta warga Jakarta tetap menjalani aktivitas seperti biasa.

Dengan membentuk *lead* semacam itu, Republika menilai bahwa pernyataan dari presiden tersebut akan memberikan dampak positif kepada masyarakat sehingga Republika mengambil judul “Presiden: Tetap Tenang”. Dari judul tersebut pula, Republika juga ingin meyakinkan kepada masyarakat bahwa aksi 4-11 adalah aksi yang damai. Selain itu, presiden juga meminta masyarakat tidak merasa takut berlebihan serta menghimbau kepada masyarakat untuk beraktivitas seperti biasa.

Kutipan sumber yang dihadirkan oleh Republika adalah pernyataan yang saling mendukung dan memiliki kevaliditasan agar pembaca dan masyarakat yakin bahwa aksi yang akan terjadi adalah aksi yang damai. Narasumber dalam berita ini adalah: Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Jenderal Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono, dan Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Riziq Shihab. Pernyataan mereka disusun secara berurutan.

“Bekerja seperti biasanya, yang sekolah ya sekolah seperti biasanya.” Ucap Presiden.

Disusul pernyataan Wapres, “Islam itu rahmatan lilalamin, kalau ada yang merusak, bukan rahmat itu.”

“Karena yang melakukan demo itu adalah saudara-saudara kita juga, yang akan menyampaikan aspirasinya sesuai konstitusi,” ujar Gatot

“Kita akan meredam massa dengan atau melunakkan hati ribuan demonstran dengan menggunakan hati, dzikir,” kata Awi.

Adapun pernyataan dari Pimpinan Front Pembela Islam Rizieq Shihab sekaligus yang akan memimpin aksi massa, Republika tidak menjadikannya sebagai kutipan langsung. Isi pernyataan tersebut mengenai adanya aksi bukanlah untuk melawan umat Nasrani maupun etnis tiong-hoa, tapi semata-mata aksi tersebut dilakukan hanyalah untuk menuntut penegakan hukum atas kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama.

Struktur Skrip

Dari struktur ini, Republika menempatkan (*who*) Presiden dan Wakil Presiden, (*what*) presiden akan berkantor seperti biasa dan menghimbau untuk tidak takut dan beraktivitas seperti biasa, (*where*) Istana Merdeka Jakarta, (*when*) 3 November 2016, (*why*) jaminan pengamanan yang disampaikan oleh presiden, wakil presiden, Jenderan TNI, Polisi, dan GNPf-MUI, (*how*) memberikan penjagaan ketat dengan menurunkan personel TNI dan Polri. Dengan cara mengisahkan berita seperti ini, berita ingin menekankan kepada khalayak bahwa aksi tersebut bukanlah aksi yang seperti biasanya terjadi, aksi ini adalah aksi yang damai, tidak akan adanya kerusuhan ataupun yang lainnya yang dapat membuat masyarakat khawatir dan takut.

Struktur Tematik

Tema yang diangkat oleh Republika pada edisi ini adalah (1) himbaun Presiden, Wakil Presiden, untuk tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa (2) penjagaan ketat/pengawasan ketat dari TNI dan Polisi, (3) dana aksi. Tema ini disusun dengan cara bercerita tertentu, di mana narasumber yang dihadirkan adalah untuk menguatkan gagasan Republika mengenai aksi yang akan diselenggarakan dengan damai. Adapun narasumber lain adalah tambahan.

Struktur Retoris

Dalam struktur ini dapat dilihat dari grafis yang digunakan. Republika mencetak besar judul berita dengan warna hitam yang pekat sehingga para pembaca dapat tertarik untuk membaca berita tersebut. selain itu judul yang digunakan sangat jelas yakni menampilkan presiden dengan pernyataannya. Retorika yang dipakai diantaranya “islam rahmatan lilalamin” “unjuk rasa itu biasa” “aksi bukan untuk menyerang

umat nasrani ataupun etnis Tionghoa”. Kata ini dapat menguatkan keyakinan khalayak bahwa aksi ini hanya berfokus pada penegakan hukum kepada Basuki. Republika juga melengkapi dengan foto, foto yang ditampilkan dalam edisi ini adalah sejumlah pasukan TNI yang sedang melakukan apel dalam rangka pengamanan aksi damai. Di sini Republika ingin menyampaikan kepada khalayak bahwa tidak akan terjadi suatu yang membahayakan karena ketatnya pengamanan.

5. Frame Republika, 5 November 2016

Judul: “Aksi Bermartabat”

Struktur Sintaksis

sintaksis dapat diamati dari bagaimana Republika menyusun fakta. Judul yang dipakai adalah “Aksi Bermartabat”. Dilihat dari judul tersebut, menunjukkan bahwa aksi 4 November adalah aksi yang bermartabat, tertib, damai dan menjadi sejarah di Indonesia khususnya umat muslim yang ada di Indonesia sebagai aksi terbesar. Meskipun Republika juga tidak menampik bahwa sempat terjadi kericuhan di akhir aksi, tetapi Republika tetap menilai bahwa aksi fenomenal tersebut merupakan aksi yang bermartabat Hal ini dapat dilihat dari susunan *lead*:

Aksi umat Islam yang menuntut penyelesaian kasu penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta, Jumat (4/11), berjalan damai dan tertib hingga tenggat yang disepakati, yaitu pukul 18.00 WIB. Namun, selepas itu, kericuhan akibat kesalahpahaman yang bermula dari ulah oknum mahasiswa dan petugas keamanan terjadi.

Berita ini juga didukung dengan latar yang dapat mendukung gagasannya. Latar yang dipakai berupa pantuan tim Republika di beberapa titik seperti Stasiun Juanda, Jalan BudiKemuliaan, Kawasan Patung Tugu Tani, dan Lapangan Banteng telah dipadati oleh massa. Dalam edisi ini pula, Republika menceritakan kronologi aksi, mulai dari persiapan dimulainya dan berakhirnya aksi.

Struktur Skrip

Struktur skrip dalam edisi ini, yaitu: (*what*) aksi bermartabat, (*who*) umat Islam Indonesia, (*when*) Jumat, 4 November 2016, (*where*) Jakarta, (*why*) segera menyelesaikan kasus Ahok, (*how*) massa aksi mulai

berdatangan sejak pagi ke Jakarta, adapun massa yang datang dari luar Jakarta sudah hadir sejak dua silam. Massa menempati beberapa titik seperti Stasiun Juanda, Jalan Budi Kemulian, kawasan patung Tugu Tani, dan Lapangan Banteng. Selesai shalat jumat massa menuju titik aksi yaitu Istana Negara dan para orator dari tokoh ormas Islam mulai menyampaikan tuntutan yang senada yakni untuk segera menyelesaikan kasus Basuki. Dengan cara mengisahkan berjalannya aksi seperti itu, berita ingin menekankan kepada khalayak bahwa permasalahan tersebut bergantung pada pemerintah khususnya presiden untuk serius menyelesaikan kasus ini.

Struktur Tematik

Dari struktur tematik, berita ini memiliki beberapa tema (1) persiapan pelaksanaan aksi melalui pantuan Republika (2) alotnya dialog antara perwakilan massa dengan pemerintah (3) Wapres menjanjikan waktu dua pekan untuk menyelesaikan kasus Ahok (4) pernyataan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Haedar Tamsir bahwa penyebab kerusuhan bukan berasal dari massa HMI.

Struktur Retoris

Dari struktur retoris, Republika menggunakan penekanan pada judul “Aksi Bermartabat” di sini ingin menekankan bahwasannya, aksi yang dilaksanakan pada tanggal 4 November 2016 di Jakarta tersebut tetaplah sebagai aksi yang bermartabat karena dilakukan dengan damai dan tertib meskipun terdapat kerusuhan yang terjadi pada waktu tenggat yang telah disepakati. Kerusuhan tersebut tidak dihitung masih dalam bagian aksi, karena kerusuhan itu terjadi pada pukul 19.00 sedangkan aksi berakhir pada pukul 18.00. Selain penggunaan judul yang tegas, penonjolan lainnya adalah font/ukuran tulisan yang digunakan sangat besar dengan warna hitam yang tebal. Republika juga tidak lupa menampilkan foto Bundaran Hotel Indonesia telah menjadi lautan putih karena telah dipadati oleh pesersta aksi yang didominasi oleh peserta aksi yang memakai pakaian putih. Foto yang dihadirkan Republika tersebut sama dengan foto yang dihadirkan Kompas pada edisi yang sama pula yakni

pada tanggal 5 November 2016, namun berbeda dalam pengambilan *angel* foto.

6. Framing Republika, 6 Novemer 2016

Judul: “Ungkap Provokator”

Terlihat Jelas Aktor Kunci yang Menghasut.

Struktur Sintaksis

Struktur sintaksis dari pemberitaan Republika tanggal 6 November 2016 mengambil judul “Ungkap Provokator”. Judul berita pada edisi ini Republika ingin menyampaikan kepada khalayak bahwa kerusuhan yang terjadi dalam aksi bukanlah dari peserta aksi. Hal ini dapat dilihat pada *lead*:

Aparat Kepolisian harus menangkap “otak” kerusuhan aksi damai 4 November. Aksi damai terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sepanjang siang hingga sore ternoda oleh adanya kerusuhan ketika sebagian peserta aksi mulai membubarkan diri.

Berita ini juga didukung oleh latar untuk mendukung gagasannya, yakni dengan menampilkan tokoh-tokoh yang menuntut agar provokator kericuhan dalam aksi segera diungkap. Seperti, Ketua Setara Institute Hendaridi yang meminta kepada Kepeolisian untuk mengungkap aktor kerusuhan.

Dalam pemberitaan ini Republika mewawancarai narasumber yang pro dengan usulan mengenai provokator kericuhan yang harus segera diselidiki. Hal ini terlihat dalam teks yang digunakan, hanya dari GNPf-MUI saja yang diambil sebagai narasumber sebagaimana kutipan wawancara dengan Ketua Setara Institute Hendaridi menyatakan kepada Polri untuk segera menyelidiki dan mengungkap aktor kerusuhan dalam aksi.

Wartawan dalam edisi ini juga ingin menginformasikan bahwa perlunya dilakukan pengusutan terhadap para provokator yang menjadikan aksi damai 4-11 tersebut ternoda dengan adanya kerusuhan. Dalam teks berita, Republika mewawancarai tiga orang yaitu Ketua Setara Institute, Hendaridi, Kadiv Humas Boy Rafli Amar dan Ustadz Bachtiar Nasir.

Struktur Skrip

Berita tersebut mengisahkan mengenai kewajiban kepolisian untuk segera mengungkap siapa provokator yang menyebabkan aksi 4-11 ricuh. Dari berita tersebut, unsur berita yang terdapat dalam teks adalah (*who*) GNPf-MUI dan aparat Kepolisian (*what*) untuk segera mengungkap provokator, (*when*) Sabtu, (5/11), (*where*) Jakarta. (*Why*) tokoh agama yang ikut aksi damai meyakini bahwa provokator bukan dari kelompok mereka. Salah satunya adalah Aa Gyim yang mengunggah foto pelaku di akun twitter yang berbeda dengan massa lainnya yang didominasi berpakaian muslim berwarna putih. Aa Gyim meminta netizen menilai apakah foto tersebut sebagai pelaku provokator, (*how*) aksi para pemuda yang dicurigai sebagai provokator menyerang barikade aparat keamanan, sedangkan massa yang berpeci terlihat terpisah dan mencoba untuk menghentikan. Ketika mengisahkan *why*, Republika secara jelas bahwa para provokator harus segera diusut. Dengan menyusun struktur skrip seperti ini, maka yang muncul dihadapan khalayak adalah bahwa pihak kepolisian harus segera melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa aktor dibalik terjadinya kerusuhan aksi 4-11 yang sebenarnya.

Struktur Tematik

Berita ini membawa tema besar yang ingin disampaikan kepada khalayak. **Pertama**, keharusan bagi pihak kepolisian untuk segera mengungkap siapa aktor yang mengakibatkan aksi 4-11 menjadi ricuh. Ditambah dengan adanya desakan dari beberapa pihak salah satunya Ketua Setara Institute, Hendaridi yang mendesak Presiden Joko Widodo melalui aparat kepolisian untuk segera melakukan penyelidikan. **Kedua**, tertangkapnya para provokator aksi yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian serta adanya penyesalan dari peserta aksi dengan adanya provokator dan keyakinan peserta aksi yang meyakini bahwa provokator bukan dari kelompok mereka. Hal ini ditandai dengan adanya unggahan foto oleh aa Gym yang menunjukkan ciri-ciri dari provokator bukanlah dari peserta aksi. **Ketiga**, pengulasan kisah/tragedi aksi damai oleh Ustadz Bakhtiar Nasir yang diperoleh dari Ustadz Arifin Ilham.

Struktur Retoris

Penekanan oleh redaksi dalam menyajikan berita dengan meletakkannya di halaman pertama yang seolah ingin menunjukkan kepada pembaca, tentang sikap GNPf-MUI selaku panitia aksi yang telah mengeluarkan pernyataan resmi dan memberikan klarifikasi bahwa GNPf-MUI menolak tuduhan aktor kerusuhan berasal dari peserta aksi. *Republika* juga memakai leksikon berupa “otak” yang berarti sebagai penggerak sebuah rencana. Selain itu, judul ditulis dengan *font* lebih besar dan warna hitam pekat serta foto yang menampilkan massa aksi yang membubarkan diri secara tertib.

7. Framing *Republika*, 7 November 2016

Judul “Pesan Aksi Tersampaikan”

Struktur Sintaksis

Sebelumnya, diberitakan GNPf-MUI mendesak Kepolisian untuk segera mengungkap siapa provokator yang menyebabkan kerusuhan pada aksi 4 November. Adapun pada edisi ini, *Republika* ingin menjawab bahwa tuduhan kerusuhan tersebut adalah salah dengan menghadirkan bukti bahwa aksi yang terjadi pada hari Jumat, 4 November dijuluki sebagai aksi terbesar sepanjang sejarah di Indonesia, aksi yang bisa mempersatukan umat dan mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan. Hal ini dapat dilihat dari *lead*:

Aksi damai “Bela Islam” besar-besaran sepanjang Jumat (4/11) yang berjalan tertib diapresiasi berbagai kalangan. Setelah aksi yang menunjukkan persatuan tersebut, umat Islam dimintai ikut mendinginkan tensi dan memberikan keteladanan dengan sabar.

Dalam isi berita tersebut juga menampilkan bahwa pesan yang dibawa pada aksi 4 November tersebut sudah disampaikan kepada pemerintah sehingga umat Islam dapat mendinginkan suasana dan tidak terpengaruh dengan ujaran-ujaran yang dapat memanaskan situasi dan berpotensi provokasi. Sebagaimana kutipan wawancara yang dilakukan *Republika* dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir yang menilai pesan aksi sudah tersampaikan.

“Percayakan penanganan kasus tersebut sepenuhnya kepada pihak kepolisian sesuai dengan tugas dan kewenangannya.”

Struktur Skrip

Struktur skrip yaitu terdapat (*what*) pesan aksi tersampaikan (*who*) tuntutan umat Islam di Indonesia yang mengikuti aksi, (*when*) 6 November 2016, (*how*) PBNU, dan PP Muhammadiyah sekaligus merilis pernyataan resmi mengapresiasi aksi 4 November, begitu juga dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin yang ikut mengapresiasi aksi tersebut. Dengan mengisahkan berita semacam ini, berita ingin menekankan kepada khalayak bahwa tuduhan-tuduhan mengenai aksi adalah salah, karena aksi ini mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan dan para provokator bukanlah bagian dari massa aksi.

Struktur Tematik

Dari struktur tematik, berita ini mempunyai beberapa tema yang mengacu kepada frame utama. (1) aksi Bela Islam mendapatkan apresiasi dari beberapa kalangan, salah satunya PBNU, PP Muhammadiyah dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, (2) umat dihimbau untuk memberikan *uswah hasanah* dengan bersikap tenang dan menghindari ujaran-ujaran yang berpotensi provokasi, (3) pernyataan Ustadz Arifin Ilham dan Ketua GNPf-MUI bahwa aksi 4 November bukanlah aksi yang sia-sia karena yang dibela adalah al-quran serta aksi tersebut sebagai kemenangan umat. Dengan cara penulisan seperti ini, ditekankan kepada khalayak bahwa aksi 4-11 mendapatkan apresiasi yang positif dari berbagai kalangan. Di sisi, Republika menampilkan PBNU, Muhammadiyah sebagai ormas terbesar di Indonesia dan Menteri Agama.

Struktur Retoris

Dari struktur retoris Republika melakukan penonjolan pada judul dengan tujuan untuk mengajak khalayak fokus pada judul, serta memberitahukan kepada khalayak bahwa aksi 4 November tersebut sesuai dengan harapan para peserta aksi yaitu menuntut agar penegakan hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama segera diproses.

8. Frame Republika, 8 November 2016

Judul: “Ahok diperiksa 9 Jam”

Struktur Sintaksis

Dari analisis sintaksis akan dilihat bagaimana Republika menyusun fakta. Judul Republika sangat jelas yang menunjukkan bukti bahwa tujuan dalam aksi 4 November sudah tercapai dengan adanya pemeriksaan kepolisian terhadap Ahok. Berita ini juga menjawab judul berita sebelumnya mengenai “Pesan Aksi Tersampaikan”. Hal ini dapat dilihat dari *lead*:

Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri sebagai saksi terlapor kasus dugaan penistaan agama, Senin (7/11). Ia diperiksa penyidik selama 9 jam.

Dalam berita ini juga menggunakan latar untuk mendukung gagasannya. Latar yang digunakan merupakan pernyataan Ahok setelah keluar dari Bareskrim Mabes Polri dengan jawaban yang singkat dan padat.

“Saya kira sudah jelas tadi sembilan jam diperiksa. Kalau mau tahu yang lain silakan tanya ke penyidik. Yang jelas, sekarang saya ingin pulang soalnya lapar.”

Struktur Skrip

Struktur skrip dalam teks berita ini (*who*) Ahok (*what*) diperiksa selama 9 jam, (*when*) Senin, 7 November 2016, (*where*) Bareskrim Mabes Polri, (*why*) tuntutan massa aksi 4 November untuk segera melakukan tindakan hukum kepada Ahok, (*how*) Ahok di dampingi oleh tim advokatnya mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan sebagai pihak terlapor kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan. Pemeriksaan tersebut berjalan selama 9 jam, adapun dalam pemeriksaan tersebut penyidik memberikan 22 pernyataan. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan lanjutan yang sebelumnya Ahok juga pernah diperiksa dengan 18 pertanyaan.

Struktur Tematik

sudut tematik, berita ini memiliki beberapa tema: (1) Basuki menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri sebagai pihak terlapor selama sembilan jam dengan 22 pertanyaan, (2) Basuki didampingi tim advokat, Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP dan Hanura (3) MUI mengeluarkan sikap resmi mengenai pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu tergolong menghina alquran dan ulama.

Struktur Retoris

Dari struktur retorik, Republika menggunakan penekanan pada gambar/foto dan judul berita. Foto yang dipakai oleh Republika adalah pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PBNU Aqil Siradj dan Rais Syuriah PBNU KH Ma'ruf Amin yang tersenyum lebar. Ini menunjukkan bahwa NU sebagai ormas yang terbesar memiliki pengaruh bagi umat muslim di Indonesia. Adapun judul, Republika mencetaknya dengan ukuran yang besar dan memberikan warna hitam tebal dengan tujuan untuk menarik pembaca.

9. Frame Republika, 9 November 2016

Judul: "Jokowi Janji tak Akan Lindungi Ahok"

Struktur Sintaksis

Dari struktur sintaksis akan melihat bagaimana wartawan menyusun berita. judul yang dipakai Republika adalah "Jokowi Janji tak Lindungi Ahok", judul ini diterangkan dalam *lead*.

Presiden Joko Widodo menjanjikan tak akan melindungi Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang saat ini tengah diproses hukum terkait dugaan penistaan agama. Hal tersebut disampaikan Presiden se usai melakukan pertemuan dengan Pimpinan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah di Jakarta.

Dalam *lead* tersebut, Republika menekankan kepada khalayak bahwa Presiden tidak akan melindungi kasus Basuki Tjahaja Purnama yang sudah memasuki proses hukum. Dijelaskan dalam teks bahwa, presiden serta pemerintah tidak akan melindungi Basuki dan akan melakukan penegakan hukum secara profesional dan transparan. Melihat penjelasan di atas Republika cenderung menilai bahwa Basuki tidak akan mendapatkan perlindungan baik dari presiden maupun pemerintah dalam kasus penistaan agama yang dilakukan dengan adanya bukti proses hukum yang telah berjalan.

Struktur Skrip

Dari struktur skrip akan melihat bagaimana wartawan mengisahkan fakta: (*who*) Presiden Joko Widodo, (*what*) pernyataan Presiden yang

berjanji tidak akan melindungi Ahok, (*when*) Selasa, 8 November 2016, (*where*) Gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah, Jakarta (*why*) karena sudah masuk proses hukum, (*how*) melakukan penegakan kasus Ahok dengan profesional dan transparan. Dengan mengisahkan fakta semacam ini, berita ini ingin menenkankan kepada khalayak bahwa pernyataan presiden harus ditepati dengan menyatakan berjanji tidak akan melakukan intervensi pada kasus Basuki.

Struktur Tematik

Dari struktur tematik, berita ini memiliki (1) Presiden berjanji tak akan melindungi Ahok, (2) Imbauan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir kepada kepolisian untuk tidak masuk tafsir agar tidak menimbulkan prasangka, (3) perbedaan pendapat antara pihak terlapor dan pelapor mengenai kasus penistaan Agama yang dilakukan Ahok.

Struktur Retoris

Dari struktur retoris, kata-kata yang digunakan Republika bersifat tegas. Dengan menuliskan kata “janji” yang merupakan sebuah komitmen tinggi. Grafis yang dipakai dalam edisi ini berupa foto Presiden Joko Widodo yang di dampingi Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir untuk memberikan keterangan dari hasil pertemuan yang dilakukan oleh keduanya.

10. Frame Republika, 10 November 2016.

Judul: “Presiden Minta Ormas Islam Dinginkan Suasana”

Ormas Islam Tetap Meminta Proses Hukum Ahok Berjalan Adil dan Tidak Pura-Pura.

Struktur sintaksis

Dari struktur sintaksis akan dilihat bagaimana frame ini disusun dalam skema berita. frame tersebut tampak jelas dari judul berita yang dipakai “Presiden Minta Ormas Islam Dinginkan Suasana” judul ini memberi pemaknaan kepada khalayak bahwa ormas Islam memiliki peran penting dalam peristiwa aksi 4 November, yakni untuk meredakan massa yang mana pesertanya adalah mayoritas umat

muslim di Indonesia. Maka presiden kembali mengundang tokoh-tokoh ormas Islam ke Istana Merdeka untuk saling bekerja sama dalam mendinginkan suasana. Hal ini diperkuat oleh *lead*.

“Presiden Joko Widodo kembali mengundang para tokoh dari sejumlah ormas Islam ke Istana Negara, Rabu (9/11). Kali ini ia melakukan pertemuan dengan tokoh agama dari 17 ormas, antara lain Al Irsyad Al Islamiyah, Al Washliyah, Majelis Rasulullah, Mathlaul Anwar, Fatayat NU, Muslimat NU, Gerakan Pemuda Anshor dan Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI)”.

Dalam edisi ini pula, Republika menghadirkan susunan berita yang berisi tentang Presiden Joko Widodo dengan para Ulama yang mengadakan perjanjian yang meminta Presiden Joko Widodo dan para Ulama. Perjanjian itu berupa Presiden tidak akan melindungi kasus hukum Basuki Tjahaja Purnama adapun ulama akan mengendalikan umat agar bersabar dan menunggu. Hal ini dapat dilihat dari kutipan wawancara yang dilakukan oleh Republika dengan Ketua Umum PB Al-Washliyah Yusnar Yusuf.

“Kami siap untuk menenangkan umat Islam, permintaan bagaimana kami seorang yang sudah diduga melakukan penistaan agama agar diproses hukum, dengan adil, jangan pura”.

Struktur Skrip

(*who*) Presiden Joko Widodo, (*what*) presiden minta ormas Islam untuk dinginkan suasana. (*where*) Istana Merdeka, (*when*) Rabu (9/11) (*why*) mengajak bersama-sama untuk meredakan ketegangan-ketegangan yang masih terjadi di tengah masyarakat (*how*) kembali mengundang para tokoh dari sejumlah ormas Islam ke Istana Merdeka. Teknik penyusunan fakta seperti ini mempunyai akibat pada makna berita yang ingin ditampilkan kepada khalayak. Republika dalam teks memberi penekanan lebih terhadap para ulama yang dinilai memiliki kemampuan untuk menenangkan umat muslim.

Struktur Tematik

Tema yang diangkat dalam berita ini adalah: *pertama*, Presiden mengundang kembali para tokoh dari ormas-ormas Islam, sebanyak 17 pimpinan ormas Islam diundang di Istana Negara. *Kedua*, ucapan terima kasih presiden kepada ormas Islam yang telah ikut andil dalam

menyebarkan pesan kedamaian kepada masyarakat. presiden juga menegaskan kembali kepada peserta aksi bahwa pemerintah tidak akan melindungi kasus Ahok, sehingga masyarakat tidak perlu risau. *Ketiga*, kesedian ormas Islam untuk menjaga kedamaian asalkan kasus Ahok benar-benar diproses. *Keempat*, isu adanya aksi susulan, *kelima*, Sekretaris Jenderal Himpunan Mahasiswa Islam (Sekjen PB HMI) Ami Jaya Halim tidak ditahan dengan beberapa pertimbangan dari kepolisian.

Struktur Retoris

Dari truktur retorik dapat dilihat bagaimana Republika menggunakan kata “dingin” yang berarti damai dan tidak terjadi apa-apa. Selain itu kata yang dipakai berupa kata ‘pura-pura”, dengan kata tersebut, Republika meminta agar proses hukum Basuki Tjahaja Purnama dijalankan sesuai hukum yang berlaku. Di struktur retorik pula, wartawan juga menekankan pada judul yang dicetak tebal dengan ukuran besar.

C. Analisis Kecenderungan Harian Kompas dalam Memberitakan Aksi Damai 4 November 2016 di Jakarta

Analisis ini digunakan untuk mengetahui kecenderungan terhadap berita-berita yang dimuat oleh Harian Kompas dan Republika. Kecenderungan dan kecondongan wartawan dalam memahami peristiwa dapat dicermati melalui empat perangkat utama yaitu struktur sintaksis meliputi bagaimana wartawan menyusun fakta, struktur skrip meliputi bagaimana wartawan mengisahkan suatu fakta, struktur tematik sebuah cara bagaimana wartawan menulis fakta, dan struktur retorik bagaimana wartawan menekankan fakta.

Kemudian berdasarkan empat struktur tersebut, analisis framing berita tentang Aksi Damai 4 November 2016 di Jakarta dalam skripsi ini dapat terlihat adanya interpretasi antara Kompas dan Republika terhadap peristiwa, pernyataan maupun sumber yang diberitakan secara berbeda. Berdasarkan prinsip-prinsip framing, Kompas telah melakukan strategi tertentu dalam mengkonstruksi berita-berita seputar Aksi Damai 4 November 2016. Kompas dalam melihat Aksi Damai sebagai aksi yang telah dimanfaatkan oleh aktor politik. Kompas juga menampilkan sikap pemerintah dan khususnya Presiden Joko Widodo tidak akan melakukan intervensi terhadap kasus Basuki Tjahaja

Purnama. Serta sikap cenderung netral terhadap Aksi Damai meskipun masih tetap terlihat kecenderungannya dalam beberapa berita yang diterbitkan.

Sikap netral dari Kompas dapat dilihat dari setiap berita yang diterbitkan lebih fokus pada upaya-upaya yang dilakukan Presiden Joko Widodo untuk mengembalikan keadaan negara seperti biasanya. Secara keseluruhan Kompas menurunkan sembilan berita, berita dimulai pada tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 November 2016. Adapun berita yang menunjukkan kecenderungan sikap dalam menilai aksi khususnya pasca terjadinya aksi tanggal 4 November tersebut terletak pada tanggal 3, 5, dan 6 November 2016. Kecenderungan yang berbeda dilakukan oleh Republika sebagai koran Islam, yang merupakan penyalur aspirasi umat Islam cenderung melihat peristiwa Aksi Damai 4 November 2016 sebagai aksi yang bermartabat, bukan aksi untuk kepentingan politik, SARA tapi murni merupakan aspirasi umat Muslim Indonesia yang membela agamanya. Sehingga Republika menamainya sebagai aksi “Bela Islam”. Republika menurunkan berita secara berurutan yang dihadirkan setiap harinya, yaitu pada tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 November 2016. Kecenderungan Republika tersebut terlihat dari beberapa edisi yang telah diterbitkan oleh Republika, di antaranya, tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Kompas pada tanggal 3 November 2016 menurunkan berita dengan judul “Pemerintah Jamin Keamanan Masyarakat”. Dalam edisi ini berisi tentang jaminan keamanan dari pemerintah kepada masyarakat sehingga masyarakat tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Adapun kecenderungannya terlihat pada pertemuan Presiden keenam, Susilo Bambang Yudhono (SBY) yang angkat bicara mengenai tuduhan adanya aktor politik di balik aksi 4 November. Di sini, Kompas menilai sikap SBY sebagai sesuatu yang tidak mencerminkan negarawan yang baik dan berlebihan. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, “Tidak perlu saya elaborasi pernyataan Pak Yudhoyono. Saya tidak perlu menilai karena dia juga mantan pejabat, tahu apa yang diucapkan.”

Ketua Partai Golkar Yorrys Raweyai berpendapat, Yudhoyono tidak perlu secara defensif mengklarifikasi sesuatu yang disebutnya sebagai informasi intelijen. Sebab, selama ini belum pernah ada tuduhan langsung terkait sosok di balik aksi unjuk rasa 4 November. Ketua Partai Nasdem

Taufik Basari menyatakan, Yudhoyono seharusnya bisa memilah informasi dan tidak memberikan pernyataan yang memberikan pernyataan yang membingungkan rakyat. Ketua Partai Hanura Sarifuddin Sudding menilai sikap SBY sangat berbeda dengan sikap Prabowo. “Kami menghargai pandangan Yudhoyono. Namun, sebagai tokoh bangsa, Yudhoyono seharusnya ikut mengambil peran menciptakan suasana yang kondusif.”

pada tanggal 5 November 2016 menghadirkan berita dengan judul “Presiden: Aktor Politik Menunggangi” di sini Kompas, ingin menegaskan bahwa aksi 4 November memang benar-benar ditunggangi oleh aktor politik dengan mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo saat menggelar pernyataan sehari setelah aksi berlangsung.

“Dan (kerusuhan) ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor-oktor politik yang memanfaatkan situasi.”

Kemudian pada tanggal 6 November 2016, Kompas masih membahas mengenai aksi yang ditunggangi oleh aktor politik. Pada edisi ini, Kompas menghadirkan pernyataan-pernyataan yang mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo, yakni pernyataan langsung dari Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

“Oleh sebab itu, apa yang disampaikan Presiden itu bukanlah sembarangan. Polisi tentu segera menindaklanjutinya dalam waktu dekat ini. bukan TNI, *Iho*. TNI hanya mengamankan kondisi.”

Masih pernyataan dari Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, “Bukti jelas. Sekitar 200.000 orang itu sejak Jumat siang sampai sebelum shalat Isya berunjuk rasa dengan tertib dan damai. Tuntutannya sudah dipenuhi pemerintah. Namun, ada pihak lain yang tetap tidak mau meninggalkan kawasan di depan Istana.”

Adapun kecenderungan Republika terlihat pada tanggal 3 November dengan judul “SBY Tuntaskan Kasus Ahok”. Berita ini menekankan bahwasannya kasus Basuki Tjahaja Purnama tetap harus diselesaikan secara hukum karena masih ada sejumlah pihak dari umat Islam yang tidak puas dengan permintaan maaf dari Basuki Tjahaja Purnama. Republika dalam edisi ini menampilkan beberapa pernyataan dari SBY. “Mari bertanya, sebenarnya masalah apa yang kita hadapi ini, dan mengapa di seluruh Tanah

Air rakyat melakukan protes dan unjuk rasa? Tidak mungkin tidak ada sebab, maka mari lihat dari sebab-akibat.”

“Jadi, kalau ingin negara ini tidak terbakar oleh amarah para penuntut keadilan, Pak Ahok mesti diproses secara hukum.”

“Barang kali karena tuntutananya itu tidak didengar. Nah, kalau sama sekali tak didengar, diabaikan, sampai lebaran kuda, masih ada unjuk rasa itu.”

Kemudian tanggal 5 November 2016 Republika menulis judul berita “Aksi Bermartabat”. Meskipun dalam berita ini Republika tidak menampilkan kutipan pernyataan yang menunjukkan aksi 4 November sebagai aksi bermartabat, Republika menggantinya dengan memberikan keterangan melalui *lead* bahwa aksi 4 November tetaplah aksi yang santun meskipun tidak menampik adanya kericuhan yang terjadi. akan tetapi, kericuhan itu dinilai bukanlah karena ditunggangi oleh aktor politik namun penyebab kericuhan akibat dari kesalahpahaman yang bermula dari ulah oknum mahasiswa dan petugas keamanan.

Kemudian tanggal 6 November 2016 dengan judul berita “Ungkap Provokator”. Dalam berita ini, Republika ingin menyampaikan bahwa penyebab kericuhan bukan berasal dari peserta aksi karena pakaian para peserta didominasi memakai pakaian serba putih. Republika menghadirkan dua narasumber kuat untuk mendukung sikapnya, yaitu Ketua Setara Institut Hendardi dan Aa Gyim. Hendardi menyatakan bahwa Kepolisian harus segera menyelidiki dan mengungkap aktor kerusuhan karena sudah terlihat jelas aktor kunci melakukan memprovokasi, menghasut, dan menebar kebencian. “Namun, sistem demokrasi punya aturan yang jelas bagi pelaku kekerasan, provokator atau penyebar kebencian harus ditindak.”

Berbeda dengan Hendardi yang memberikan pernyataan secara langsung, Pemimpin Pondok Pesantren Darut Tauhid Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) tersebut mengunggah foto yang penampilannya tidak sesuai dengan masa aksi pada umumnya. “Silakan perhatikan, mungkinkah ini provokatornya semalam? Foto yang diunggah merupakan foto pada detik-detik sebelum terjadi kerusuhan di depan Istana Negara melalui media sosial Twitter nya @aagym dan meminta para netizen untuk menilai.

Kemudian tanggal 7 November 2016 dengan judul “Pesan Aksi Tersampaikan”. Dalam berita ini, Republika masih menampilkan bantahan-bantahan mengenai tuduhan terhadap aksi yang dilakukan pada tanggal 4 November dengan menyertakan kata “Bela Islam” serta pernyataan sikap dari para narasumber yang membrikan apresiasi dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Hal ini dilakukan dengan tujuan bahwasannya aksi 4 November bukanlah aksi SARA atau aksi yang dimanfaatkan oleh aktor politik, namun aksi tersebut murni aksi persatuan umat muslim Indonesia yang menuntut penegakan hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama yang telah diinilai menistakan agama. Melalui surat pernyataan yang diedarkan NU yang ditandatangani Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dan Sekjen PBNU Faishal Zaini. “Kami mengapresiasi Aksi Damai 4 November tentu hendak meluruskan etiak berpolitik para pemimpin.”

Kemudian tanggal 8 November 2016, Republika menulis judul berita “Ahok Diperiksa 9 Jam”. Dalam edisi ini, Republika ingin menunjukkan hasil dari jawaban pesan yang telah tersampaikan yaitu Basuki Tjahaja Purnama telah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri dan diperiksa penyidik selama sembilan jam. Selain itu, sebagai penguat bahwa Basuki telah melakukan penistaan agama, Republika menampilkan pendapat dan sikap keagamaan MUI Melalui Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid. “Ketua Umum MUI telah menjelaskan bahwa benar MUI telah mengeluarkan pendapat dan sikap keagamaan terkait dengan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (BTP).” “Pendapat dan sikap keagamaan derajat kedudukannya lebih tinggi.”

Kemudian tanggal 9 November 2016 Republika menulis judul berita “Jokowi Janji Tak Lindungi Ahok”. Republika kembali menampilkan komitmen Presiden Joko Widodo yang berjanji tidak akan melindungi kasus Basuki Tjahaja Purnama. Dalam edisi ini pula, Republika menekankan kepada kepolisian melalui pernyataan Ketua Umum PP Muhammadiyah untuk tidak memasuki area tafsir perkara penistaan agama agar tidak menimbulkan prasangka di tengah masyarakat. “Pak Kapolri (Tito Karnavian) jangan masuk area tafsir tersebut agar tidak menimbulkan

prasangka. Baik benar atau lebih-lebih salah, bisa menimbulkan pro-kontra lagi dan nanti Polri dituding memihak.”

Kemudian tanggal 10 November 2016 dengan judul ‘Presiden Minta Ormas Islam Dinginkan Suasana’. Dalam edisi ini, Republika menampilkan bahwa adanya perjanjian yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan Ormas Islam yang diundang ke Istana Merdeka. Ormas Islam siap menenangkan umat Islam jika Presiden Joko Widodo serius memproses kasus Basuki dengan adil dan sesuai hukum yang berlaku. Republika mengutip pernyataan narasumber yang dihadirkan yakni Ketua Umum PB AL-Washliyah Yusnar Yusuf. “Kami siap untuk menenangkan umat Islam, permintaan kami bagaimana seseorang yang sudah diduga melakukan penistaan agama agar diproses dengan adil, jangan pura-pura.”

Secara psikologis Kompas memberikan informasi bahwa Aksi 4 November merupakan aksi yang riil terjadi yang diakhiri dengan adanya kerusuhan yang tidak bisa ditolak fakta kejadiannya. Secara sosiologis, Kompas sebagai koran yang menyatakan diri sebagai koran nasional dengan gaya bahasa yang humanistik dalam menyajikan fakta kepada pembaca. Adapun dalam melakukan pembahasan berita yang dianggap penting, sensitif dan berkembang di masyarakat, Kompas menggunakan tiga strategi. *Pertama*, model jalan tengah (MJT) yaitu menggugat secara tidak langsung, mengkritik tapi disampaikan dengan santun, terkesan berputar-putar, dan mengaburkan pesan yang hendak disampaikan. *Kedua*, model angin surga (MAS) yakni dalam mengupas masalah, Kompas bukan menggugat atau mempertanyakan hal tertentu, tetapi lebih sebagai imbauan serta harapan. *Ketiga*, model anjing penjaga (MAP) yang bersifat terbuka dan menggunakan bahasa yang lebih berani.

Adapun Republika, secara psikologis memberikan kesan bahwa Aksi Damai 4 November merupakan aksi yang bermartabat meski tidak dapat dipungkiri adanya kerusuhan yang terjadi di akhir aksi. Republika juga menyebut aksi damai sebagai aksi yang murni dilakukan oleh aspirasi kaum muslim yang merasa bahwa agama yang diyakininya telah dihina, sehingga aksi damai 4 November juga disebut Republika sebagai Aksi Damai “Bela Islam”. Secara sosiologis, Republika sebagai koran Islam, yang sebagian pembacanya adalah orang-orang Islam, lebih menjelaskan

dan mengisahkan Aksi Damai dengan kaca mata Islam dan tetap menampilkan sisi yang lain.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Republika dalam memberitakan mengenai aksi damai 4 November 2016 sangat jelas kecenderungannya, yakni Republika mendukung aksi 4 November adalah sebagai aksi bela Islam, bela agama bukan sebagai aksi SARA. Menempatkan Basuki sebagai orang yang terbukti telah melakukan penistiaan agama yang harus dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal tersebut merupakan sebuah kewajaran, karena Republika sendiri memiliki visi-misi keislaman dan merupakan penyalur aspirasi umat Islam. Terlihat dari berita yang diturunkan, berita itu dimulai dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 November 2016.
2. Berbeda dengan Republika, Kompas dalam mengemas beritanya mengenai aksi 4-11 tidak terlalu memberi porsi yang besar, ini terlihat dari jenis berita serta letak berita yang tidak semua menjadi *headline*. Berita sama-sama dimulai dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 November 2016. Kompas menilai bahwa aksi 4 November adalah aksi yang riil terjadi dan terdapat kerusuhan di dalamnya. Dalam pemberitaannya, Kompas menilai aksi 4-11 diwarnai dengan kerusuhan, dan Kompas lebih menekankan dan menitik beratkan beritanya pada upaya-upaya pemerintah, khususnya langkah-langkah Presiden Joko Widodo dalam meredam ketegangan dampak dari aksi 4 November.

Dari strukturr sintaksis, Republika memberikan *headline* “Aksi Bermartabat”, dengan judul tersebut telah mewakili kecenderungan sikap Republika yang mendukung aksi yang dilakukan oleh elemen umat Islam Indonesia dengan secara bermartabat dan damai. Di lain pihak Kompas memberikan *headline* “Presiden: Aktor Politik Menunggangi”, pemberian judul tersebut telah mewakili kecenderungan Kompas yang mendukung pernyataan presiden bahwa aksi 4-11 merupakan aksi yang di dalamnya diwarnai dengan kerusuhan dan dimanfaatkan oleh sekelompok aktor politik.

Bentuk struktur skrip yang digunakan oleh Republika dan Kompas 5W+1H telah terpenuhi semua. Struktur tematik, untuk mendukung tema tema aksi 4-11 yang bermartabat, Republika menghadirkan narasumber-narasumber yang menguatkan gagasannya yakni dari kalangan ulama ataupun dari GNPF-MUI sendiri. Adapun Kompas menghadirkan narasumber dari pihak pemerintah.

Dalam menekankan fakta atau struktur retorik Republika selalu menampilkan foto dari pihak tokoh agama sebagai penguat berita Kompas tidak semua berita yang dihadirkan disertai dengan foto, seperti terlihat pada berita edisi 6 November 2016 dengan judul “Presiden Punya Data Intelijen”.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Republika Indonesia

Dalam kasus seperti ini, diharapkan pemerintah dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga, yakni untuk lebih memperhatikan dan cepat dalam menanggapi permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Cepat dan tepat dalam mengambil keputusan untuk kemaslahatan bersama.

2. Kepada Penegak Hukum

Tidak lamban dalam memproses segala bentuk laporan, baik itu permasalahan kecil maupun besar. Tidak pilih-pilih dalam menjalankan hukum serta untuk selalu komitmen dalam menjamin keamanan bagi masyarakat.

3. Kepada Pembaca

Diharapkan menjadi pembaca yang cerdas dengan tidak hanya membaca suatu berita dari satu surat kabar. Hendaknya, tidak mudah terpancing bahkan terprofokasi terhadap sebuah peristiwa sebelum mengetahui permasalahan yang sebenarnya. Pembaca memahami bahwa realitas yang dihadirkan oleh media massa bukanlah realitas yang sebenarnya, namun realitas yang hadir merupakan hasil dari sebuah konstruksi .

C. Penutup

Alhamdulillah, rasa syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat, rahim dan maunahNya dalam segala aktifitas. Sekali lagi ucapan syukur penulis panjatkan atas selesainya penulisan skripsi ini,

dan penulis mengakui bahwa skripsi ini di dalamnya masih banyak kekurangannya, baik itu menyangkut data maupun ketajaman analisis. Untuk itu, penulis memohon agar pembahasan terhadap penelitian ini lebih mendalam, dan sumbangan saran dari pihak-pihak yang berkompeten sangat kami harapkan. Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Yanuar. 1992. *Dasar-Dasar Kewartawanan Teori dan Praktek*. Padang: Angkasa Raya.
- Ardianto, Elvinaro dan Erdiana, K Lukiati. 2004. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2014. *Sosiologi Komunikasi*. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Kencana.
- Cangara, Hafied. 2002. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Cetakan Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djuroto, Totok. 2004. *Manajemen Penerbitan Pers*. Cetakan Ketiga. Bandung: PT REMAJA ROSDA KARYA.
- Efendi, Onong Uchjana. 1995. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik*. Bandung: Rosda Karya.
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LkiS.
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Analisis terhadap Berita-berita Politik*. Jakarta: Granit.
- Hill, Davit T. 2012. *Pers di Masa Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Inung, Cahya S. 2012. *Menulis Berita di Media Massa*. Yogyakarta: Citra Aji Parama.
- Kriyantono, Rachmad. 2010. *Teknis Praktik Riset Komunikasi. Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relation, Advertising Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana.
- Khaeruman, Badri. 2004. *Moralitas Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Mahir Menulis (Kiat Jitu Menulis Artikel, Opini, Kolom & Resensi)*. Jakarta: Erlangga.
- Mc, Quail Denis. 2011. *Mass Communication Theory*. Diterjemahkan oleh Putri Iva Izzati. Jakarta: Salemba Humanika.
- Nurudin. 2004. *Komunikasi Massa*. Yogyakarta: Pelajar Pustaka.
- Pan, Zongdang and Gerald M. Kosicki. 1993. *Framing Analysis: An Approach to news Discourse*. Vol. 10. No. 1993, hlm. 58.
- Puoerwadaminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Romli, Asep Syamsul. 2003. *Jurnalistik Dakwah*. Bandung: PT REJAMA ROSDAKARYA.
- Santoso, Edi, dan Setiansah, Mite. 2012. *Teori Komunikasi*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Sobur, Alex. 2012. *Analisis Teks Media; Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Cetakan Keenam. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sudarman, Paryati. 2008. *Menulis di Media Massa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudibyoy, Agus. 2001. *Kabar-Kabar Kebencian Prasangka Agama di Media Massa*. Jakarta: ISAI.
- Suhandang, Kustadi. 2016. *Pengantar Jurnalistik Seputar Organisasi Produk dan Kode Etik*. Cetakan Kedua. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.
- Sumadiriya, AS Haris. 2014. *Jurnalistik Indonesia Menulis berita dan Feature*. Cetakan Kelima. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Wibowo, Wahyu. 2009. *Menuju Jurnanisme Beretika*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Yunus, Syarifudin. 2012. *Jurnalistik Terapan*. Cetakan kedua. Bogor: Ghalia Indonesia.

SKRIPSI

- Fitriyani. 2009. "Pemberitaan Tentang Jamaah Ahmadiyah di Media Massa (Analisis Framing Harian Suara Merdeka dan Republika)". Semarang: UIN Walisongo
- Hutabrina, Panca Okta. 2009. "Insiden Monas Dalam Bingkai Media" (Analisis Framing Terhadap Berita Seputar Insiden Monas, 1 Juni 2008 di Harian Kompas dan Republika Periode 2-8 Juni 2008). Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Sarifah, Anik. 2015. "Framing Pemberitaan Kongres Umat Islam Indonesia ke VI pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika edisi Februari 2015". Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Zaidah, Noor. 2006. "Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Muktamar ke- 31 Nahdlotul Ulama di Surat Kabar Suara Merdeka." Semarang: UIN Walisongo.

WEBSITE

- <http://kbbi.web.id/pemberitaan>, diakses 20 Februari 2017.
- <http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-38001552> diakses pada 25 April 2017.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Aksi_4_November diakses pada 4 Oktober 2017.
- <http://zainuddin.lecturer.uin-malang.ac.id/2015/09/26/islam-agama-damai/> diakses pada 28 Januari 2018).

KORAN

- Kompas, 4 November 2016.
- Republika, 4 November 2016.
- Kompas, 5 November 2016.

"Dalam menjalankan fungsi pengawasan, tidak boleh ada yang menghalangi anggota DPR. Ada hak imunitas bagi anggota DPR. Jadi, ini bukan makar, ini pengawasan," kata Fahri.

Sementara itu, empat anggota DPR, yaitu Junimarit Girsang, Trimedys Banjaitan, dan Charles Heneria dari Fraksi IDU-P serta Ruzul Sitompul dari Fraksi Partai Demokrat, Kemarin, diundang ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pasalnya, mereka melanggar Parlok saat yang bersangkutan diperiksa di Barekris Polri.

Pelaporan ke MKD ini dilakukan Khalid Masjkur Wakil Ketua DPR DPR yang terdiri dari sejumlah lembaga swasta masyarakat. Ahmad Hanafi, salah seorang pelapor, mengatakan, empat anggota DPR diang. jadi pengacara sasuki. Padahal, anggota DPR dilarang melakukan pekerjaan sebagai pengacara.

Namun, Junimarit Girsang menyatakan, kehadirannya di Barekris atas instruksi partainya, yaitu PDI-P, untuk mengungkap pengacara yang mendampingi Basuki saat pemeriksaan. "Diceritakan di daftar pengacara itu, tidak ada nama saya atau nama tiga anggota DPR lainnya," ujarnya.

(HAR/NDY/NTA/UTI/DNE/WAD/AGE/REK/APA)

Lihat Video Terkait "Konsolidasi Presiden Pasca Unjuk Rasa" di kompasprint.com/vod/sowarpascademo

Foto:

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Presiden Joko Widodo (baris kanan tengah) menerima kunjungan pimpinan organisasi masyarakat Islam di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (9/11). Dalam pertemuan itu presiden ingin menyampaikan masukan terkait kebijakan pemerintah tentang unjuk rasa pada 4 November lalu ataupun kebijakan di bidang lainnya.

PUSAT INFORMASI KOMPAS
 PALMERAH SELATAN 26 - 28 JAKARTA, 10270
 TELP. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200
 FAX. 5347743

KOMPAS KAMIS, 10-11-2016. HALAMAN: 01

PRESIDEN TERUS BERSILATURAHIM

Sekitar 20 Ormas Islam Diundang ke Istana

JAKARTA, KOMPAS - Presiden Joko Widodo terus menjalin silaturahmi. Setelah menemui Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Presiden bertemu dengan sekitar 20 pemimpin ormas Islam di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (9/11) sore.

Dalam pertemuan kemarin, Presiden kembali menegaskan, tidak akan mengintervensi dan melindungi Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama terkait kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukannya. Presiden juga meminta masukan kebijakan lain yang dapat diambil pemerintah.

Hadir dalam pertemuan kemarin, antara lain Syarikat Islam, Huslimat Nahdlatul Ulama, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, dan Majelis Basulullah. Sementara Presiden didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin, secara terpisah, mengatakan, proses hukum terhadap kasus Basuki harus berjalan karena terkait salah satu pasal pada hukum positif.

Ketua Umum Al Washliyah Yusnar Yusuf, seperti bertemu Presiden, menuturkan, "Presiden menganggap masih ada sebagian umat yang kedewa setelah aksi damai pada 4 November l. u. Kita akan lakukan penenangan kepada umat karena Presiden sudah berjanji untuk tegas dan berlaku adil dalam kasus saudara Basuki."

Proses hukum

Kemarin, Badan Reserse Kriminal Polri kembali meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan Basuki. Mereka yang diminta keterangan, antara lain pengajar hukum pidana Universitas Islam Indonesia, Kudus, dan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Darussalam, Wonorejo.

Selain mengungkap kasus dugaan penistaan agama, Polri juga menerima laporan terkait aksi unjuk rasa 4 November lalu. Kemarin, Barisan Relawan Jokowi Presiden (Para-JR) melancarkan aksi kejut DPR Faksi Hamzah ke Barokrim Polri. Perwakilan Para-JR, Mergana Sinaga dan Ferry Simanungiang, menilai, pernyataan Faksi saat aksi 4 November bernilai provokatif dan mengarah pada upaya merusak stabilitas nasional yang saat ini.

Menanggapi laporan itu, Faksi Hamzah mengatakan, pada saat aksi unjuk rasa tersebut, para aktivis beranda-beranda telah dibayar dengan konstitusi. Ia berkeinginan undang per-Aktiva. 1.1.17 pengawasan legislatif.

jika ada pelanggaran hukum, Polri akan menegaskannya.
"Ini berlaku kepada siapa pun," ujarnya.

(NTA/OSA/SON/NDY/IAN)

Soal Unjuk Rasa

HAL 2 DAN 5

Lihat Video Terkait "Presiden Tanggapi Dugaan
Penghinaan Ahmad Dhani" di
kompasprint.com/vod/jokowisesia

Lihat Video Terkait "Presiden Teror: Puspitan
Muhammadiyah" di
kompasprint.com/vod/jokowikemhammadiyah

Seperti halnya pernyataan NU pada hari Senin lalu, Muhammadiyah juga berharap pemerintah lebih responsif dan mau menjalin komunikasi dengan semua pihak, termasuk umat Islam.

Dalam pertemuan itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir juga menegaskan, unjuk rasa 4 November murni aspirasi keagamaan umat Islam. Muhammadiyah merintus pemerintah untuk menyelesaikan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki.

“Yang terakhir, yang berkaitan dengan problem kita sebagai bangsa, kasus (dugaan penistaan agama) ini memang kita harapkan segera berakhir dan ada kata putus agar hal-hal ini tidak tersandera 1-2 orang yang berindak gegabah di kehidupan berkebangsaan kita,” kata Haedar.

Saat menerima Presiden yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Haedar didampingi Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muhsin dan beberapa Ketua PP Muhammadiyah.

Bertemu Megawati

Seusai menerima Presiden, sejumlah pihak dari Muhammadiyah ke rumah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri di Jalan Teuku Umar, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa hal terkait situasi kebangsaan saat ini.

“Intinya persatuan dan kesatuan bangsa ini harus bersama. Jangan sampai aksi massa 4 November dan dugaan penistaan agama oleh Pak Basuki membuat elemen masyarakat terpecah belah dan membuat perdebatan publik yang berlarut-larut,” kata Abdul Muhsin tentang isi pertemuannya dengan Megawati.

↳

Menurut Abdul Muhsin, penyelesaian secara hukum kasus dugaan penistaan agama itu telah disepakati bersama sehingga semua pihak diharapkan patuh dan mengikuti prosedur yang ada.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto juga meminta semua pihak sabar dan percaya pada proses hukum yang sedang berjalan. “Sebaiknya masyarakat tenang. Kepala Polri telah menjanjikan proses yang berjalan cepat, tegas, dan transparan,” katanya.

Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan PP Muhammadiyah menerima informasi adanya rencana aksi lanjutan terkait dugaan penistaan agama oleh Basuki pada 21 November. Namun, belum ada izin resmi yang masuk ke Polri untuk kegiatan itu. “Ada informasi, kami akan mengantisipasi. Namun, tanpa izin belum masuk. Biasanya dalam beberapa hari sebelumnya,” kata Kapolri.

Kapolri menjelaskan, Polri akan bekerja profesional, dan

Seperti halnya pernyataan NU pada hari Senin lalu, Muhammadiyah juga berharap pemerintah lebih responsif dan mau menjalin komunikasi dengan semua pihak, termasuk umat Islam.

Dalam pertemuan itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir juga menegaskan, hingga saat ini November muncul aspirasi keagamaan umat Islam. Muhammadiyah menuntut komitmen dalam menyelesaikan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki.

“Yang terakhir, yang berkaitan dengan problem kita sebagai bangsa, kasus dugaan penistaan agama ini memang kita harapkan segera berakhir dan ada cara-purus agar bangsa ini tidak tersandera 1-2 orang yang bertindak pedas di kehidupan berkebangsaan kita,” kata Haedar.

Saat menarima Presiden yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Haedar didampingi Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muhsin dan beberapa ketua PP Muhammadiyah.

Bertemu Megawati

Seusai menerima Presiden, sejumlah pihak dari Muhammadiyah ke rumah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa hal terkait situasi kebangsaan saat ini.

“Intinya persetujuan dan keretakan bangsa ini dibina bersama. Jangan sampai aksi massa 4 November dan dugaan penistaan agama oleh Pak Basuki membuat elemen masyarakat terpecah belah dan membuat perdebatan publik yang berlarut-larut,” kata Abdul Muhsin tentang isi pertemuannya dengan Megawati.

Menurut

Menurut Abdul Muhsin, penyelesaian secara hukum kasus dugaan penistaan agama itu telah disepakati bersama sehingga semua pihak diharapkan patuh dan mengikuti prosedur yang ada.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto juga meminta semua pihak sabar dan percaya pada proses hukum yang sedang berjalan. “Sebaiknya masyarakat tenang. Kepala Polri telah menjadikan proses yang berjalan cepat, tegas, dan transparan,” katanya.

Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menyatakan telah menerima informasi adanya rencana aksi lanjutan terkait dugaan penistaan agama oleh Basuki pada 17 Desember. Namun, belum ada izin resmi yang masuk ke Polri untuk kegiatan itu. “Ada informasi, kami akan menantisipasinya. Namun, surat izin belum masuk. Biasanya dalam beberapa hari sebelumnya,” kata Kapolri.

Kapolri menjelaskan, Polri akan bekerja profesional, dan

User Name : User Swalayan
Job ID : 226906

P U S A T I N F O R M A S I
Palmerah Selatan, D.C. Jakarta, 121
Telp. 5347710, 5347711, 5347712, 5347713
Fax. 5347743

KOMPAS Rabu, 09-11-2006. Halaman 11.
Komunikasi Politik
Presiden Tak Akan Lindungi Basuki
Komunikasi Politik
Presiden Tak Akan Lindungi Basuki
JAKARTA, KOMPAS (mdash): Presiden Tak Akan menegaskan tidak akan melindungi Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama terkait kasus dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukannya. Presiden juga menyatakan menerima kritik dari sejumlah pihak terkait kelambanan pemerintah dalam membangun komunikasi politik.

“Sekali lagi, ini juga rakyat perlu tahu, saya tidak akan melindungi Saudara Basuki Tjahaja Purnama karena sudah masuk pada proses hukum,” kata Presiden sesuai bertamu Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah Jakarta, Selasa (8/11).

Presiden mengunjungi PP Muhammadiyah setelah bertemu dengan 500 personel Polri di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta.

Portemuan dengan Polri dan PP Muhammadiyah ini terjadi setelah sehari sebelumnya Presiden mengunjungi Markas Besar TNI Angkatan Darat dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Kepada Polri, Presiden mengucapkan terima kasih atas kewaspadaan, soliditas, dan profesionalismenya saat mengamankan unjuk rasa 4 November sehingga kegiatan itu berjalan tertib dan damai. Presiden juga menyampaikan simpati kepada 16 anggota Polri yang menjadi korban saat unjuk rasa itu ricuh pada malam hari.

Menurut Presiden, salah satu sisi dari unjuk rasa 4 November lalu adalah tentang pelepasan darah peserta yang ternyata lebih besar daripada pelepasan sebelumnya.

Kritik
Selesai bertemu PP Muhammadiyah, Presiden menyatakan kritik yang diberikan Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama merupakan masukan bagi pemerintah.

“Yang benar baik akan kami pertahankan, yang belum bagus akan kami benahi. Karena saya berharap bangsa yang penuh dengan keadilan dan kepastian,” jelas dia.

Sebelumnya, kepada Presiden, Muhammadiyah mengkritik pemerintah yang lambat melakukan komunikasi dengan rakyat.

”Jurnalis bekerja dilindungi undang-undang. Semua hal menyangkut sengketa pemberitaan, ada mekanisme sebagaimana diatur UU Pers. Oleh karena itu, stop menjadikan jurnalis sebagai sasaran kekerasan,” kata Ketua Umum AJI Swarjono.

(KIM/WAD/GER/ASE/SEN. DIT. UNE. ADE. IND. SAN/OK/EDW)

Foto:

KOMPAS/ANDY RIZA HIDAYAT

Presiden Joko Widodo di tangan melakukan komunikasi jarak jauh dengan warga Indonesia di Australia yang digelar di Istana Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/11). Kepada warga Indonesia di Sydney, Presiden menyampaikan situasi terakhir di Indonesia. Menurut Presiden, negara dalam keadaan aman, tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

bagian penting sebagai generasi kehidupan bangsa ini, " kata Menteri Sosial Kholidah Indar Fawwaz dalam acara tersebut.

Terkait dengan peran civik agama ini, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengapresiasi peran serta para ulama dalam membimbing dan menyetuikan ummatnya agar tidak berbuat anarkistis pada aksi unjuk rasa. Apresiasi itu disampaikan Panglima TNI saat berdialog dengan ulama dari sejumlah wilayah di Base Ops Lintas Halim II, Pondokgondok, Jakarta.

Secara terpisah, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, saat Gerak Jalan Kerukunan di Jakarta, kemarin, menyatakan akan terus berkoordinasi dan menjalin dialog dengan pemuka agama. Dia yakin, dialog menjadi salah satu cara mencari titik temu berbagai cara pandang.

Basuki diperiksa

Polri merencanakan gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama pada pekan ketiga November. Terkait hal itu, hari ini Polri akan memeriksa Basuki dan meminta keterangan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Ma'ruf Amin sebagai ahli agama. "Setelah merampungkan pemeriksaan ahli, kami akan lakukan gelar perkara terbuka dengan mengundang sejumlah pihak," kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Roy Rafli Amar.

Sementara itu, 10 orang yang diduga melakukan provokasi untuk melakukan aksi anarkistis yang ditangkap polisi saat unjuk rasa Jumat lalu, menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiyono, telah dibebaskan dan belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. "Memang ada tiga orang yang melakukan tindak pidana, tetapi al. : bukti belum cukup," ujar Awi.

Awi menambahkan, polisi telah mengantongi ciri-ciri pelaku perampasan kartu memori juru kamera Kompas TV, Muhammad Guntur, saat unjuk rasa lalu.

Kemarin, di Polres Metro Jakarta Pusat, Guntur diperiksa sebagai saksi pelapor kasus dugaan pencurian dan penganiayaan yang dialaminya ketika meliput aksi unjuk rasa 4 November. Dia mengatakan, dia kartu memori kameranya dirampas oleh dua orang. Ia juga mengatakan sempat dipukul ketika ditarik ke kerumunan massa.

Kemarin, Guntur juga mendapat radhan dirinya sebagai pelepas botol air mineral ke arah barisan polisi. "Saya saat itu membawa peralatan untuk siaran langsung seberat 10 kilogram dan kamera seberat 4 kilogram. Saya tidak mungkin bisa melepaskan botol dengan berat perlengkapan liputan seperti itu dan tangan sedang memegang kamera," ujarnya.

Sementara itu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) berharap tidak ada lagi jurnalis yang menjadi sasaran kemarahan.

User Name : User Swalayan I
Job ID : 226907

P O S T : I N T E R N A T I O N A L
Palmerah Selatan 04 - 17 Jakarta, 11710
Telp. 6347710, 6347720, 6347730, 6347740
Faks. 6347740

KOMPAS Senin, 7-11-1994, Halaman 1, 1A
Dugaan Penistiaan Agama
Konsolidasi Politik dan Kenegaraan Dibutuhkan
Dugaan Penistiaan Agama
Konsolidasi Politik dan Kenegaraan Dibutuhkan
BOGOR, KOMPAS indash: Meski saat ini yang perlu dikhawatirkan dengan kondisi Tanah Air saat ini, pemerintah menilai masih dibutuhkan konsolidasi politik dan kenegaraan. Terkait hal itu, dalam minggu ini pemerintah akan mengundang tokoh politik dan tokoh agama untuk memberikan masukan dalam rangka memberikan rasa sejuk dan mendinginkan suasana.

“Kami terus mengundang tokoh politik, tokoh agama, untuk memberikan masukan dan hal-hal seperti itu akan kami lakukan dalam minggu ini,” kata Presiden Joko Widodo, Minggu (6/11), di Istana Bogor, Jawa Barat, saat melakukan komunikasi jarak jauh dengan sekitar 400 warga Indonesia di Australia.

Acara itu diadakan setelah Presiden menjadwal ulang rencana kunjungan kenegaraan ke Australia. Inciden semula akan terbang ke Australia Sabtu malam lalu, tetapi ditunda setelah Jumat siang ada unjuk rasa besar-besaran terkait kasus dugaan penistiaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama.

Dalam komunikasi jarak jauh, kemarin, warga Indonesia di Australia berkumpul di Olympic Arena, Sydney. Hadir di Sydney antara lain Dubes RI untuk Australia Nadjib Riphah Kesobema, Menteri Perdagangan Enggartiasro Lukita, serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong.

Dalam acara tersebut, perwakilan pemuda Indonesia di Australia membacakan ikrar tentang seruan agar pemerintah menjaga kedamaian dan persatuan. “Kedamaian, kami berharap Presiden Jokowi tetap berkomitmen menjaga kedamaian Indonesia. Persatuan, kami berharap bangsa Indonesia yang beragama tidak terpecah belah oleh alasan apa pun. Ketegasan, kami berharap pemerintah memastikan terlaksananya reformasi hukum untuk meningkatkan integritas bangsa Indonesia.”

Seruan perdamaian dan persatuan, kemarin, juga muncul dalam acara Jalan Sehat, Dua Lintas Asia untuk Pahlawan Bangsa, di Pantai Giri di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Acara itu digelar untuk memperingati Hari Pahlawan. “Persepatan dalam sebuah kebersamaan senantiasa harus dijaga, dan ini membutuhkan peran tokoh agama yang merupakan

Presiden Punya Data Intelijen

(Lanjutan dari halaman 1)

provokator Entro dan wana provokator itu berasal terapa yang telah biasa melakukan provokasi.

Pembina GNPF-MLI Biting sudah mengabdikan pada tdk mengabdikan masa yang menjajah, tdk dan membuat keributan di luar Batang, Penyerangan, Jakarta Utara, Jakarta Selatan.

Suara terpecah Sama Union Pemuda Besar Mumpuni Mahasiswa Islam (HMI) Mulyadi P Tamsil membentah tuduhan politisi yang menyebut anggota HMI sebagai pemuka keributan. Ia mengatakan keributan dipicu provokator berlatar HMI.

Sementara Ketua Poni Jendral (Pon) Tito Karnawan, Jusuf Kimmu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Sabtu malam, mengatakan, penyidik Dendri Bareskrim Mabes Polri akan melakukan gelar perkara kasus dugaan penistaan Al Quran oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama secara terbuka dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Pemiparan hasil temuan penyidik itu akan menentukan apakah kasus ini dapat ditagalkan ke tahap penyidikan dengan penetapan Basuki sebagai tersangka atau tidak.

Menurut Tito, gelar perkara hasil penyidikan Polri itu sesuai perintah Presiden Jokowi yang meminta Presiden Jokowi untuk melakukan proses hukum dan setting aparat dan transparansi.

"Kita akan menggunakan prosedur

itu akan menyangkut. Hasil dituntut diminta keterbacaan pada forum terbuka. Pembidik juga akan meminta keterangan saksi ahli yang ditunjuk untuk membantu dalam proses penyelidikan ini.

"Memang gelar perkara itu tidak wajib dilakukan secara live. Namun, ini perintah dari Bapak Presiden untuk membuka transparansi agar Tawar.

Perogadit, kata Tito, sudah meminta keterangan 10 saksi ahli, yang di antaranya pengacara termasuk dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan orang yang tidak terafiliasi. Saksi ahli ini berasal dari dua agama Islam, ahli hukum pidana, dan ahli bahasa. Nantinya, Komando Kepolisian Nasional, Mahkamah Polri, maupun aparat penegak hukum akan melakukan investigasi termasuk dalam catatan waktu pengusutan.

"Hal itu berkoordinasi dengan RUTAP dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana," ujar Sekretaris Kompolnas Bekti Supripto.

Kembali normal

Setelah unjuk rasa, situasi kota Jakarta kembali normal. Semua rute dan koridor PT Transjakarta tetap dilalui normal tanpa terganggu oleh meluapnya pelanggan. "Koridor 1 hingga XII tetap akan beroperasi normal," kata Budi Kharisno, Direktur Utama PT Transjakarta.

Koridor 13 dan 14, Balarantik, Pasar Pagi, TIC dan Mal Mangga Dua, Jakarta Barat, sudah beroperasi secara normal. Kios, ger-

tek, dan toko sudah mulai mulai pagi hingga pukul 1700. Tak ada lagi aparat kepolisian yang berjaga-jaga. Padahal Sabtu sebelumnya, Jumat siang, kawasan Grogol tetap sepi setelah pagi hari sempat dibuka.

Hampir seluruh pangkukan resmi telah kembali pulang ke tempat semula Sabtu pagi sebelumnya, sempat akan mengutip di Kompleks Parlemen. Masa yang sempat berantapi di Kompleks Parlemen membubarkan diri Sabtu pagi setelah dimarahi Ketua DPR Zulkahri Hasan dan anggota Komite III DPR, Sufmi Daswani Ahmad dan Anas Buluk Athallah.

Sesuai pertemuan, Zulkahri meminta massa kembali ke daerahnya masing-masing. DPR juga menyediakan akomodasi bus untuk menampung kedatangan. Penutupan pengunjuk rasa juga cabarun Kementerian Perhubungan yang menyediakan sejumlah bus.

Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dinas Sosial DKI Jakarta Turmijo Damanik, Sabtu, mengatakan, Dinas Sosial DKI Jakarta dan Kementerian Sosial juga ikut memulangkan pengunjuk rasa yang tercecer dari rombongan. Kepala Penerangan Kodam III Sili ngdi Kolonel Ach M Desi Arifanto mengemukakan, Mabes TNI AD Sabtu pagi menerjunkan sekitar 900 pengunjuk rasa ke daerah masing-masing di Jabodetabek dengan menggunakan bus.

Terkait unjuk rasa danus pada Jumat lalu, seluruh elemen bangsa diminta menjadikan peristiwa tersebut sebagai pembelajaran

menjaga dan memperbaiki situasi Indonesia. "Ladon haruslah tetap aman dan damai tetap terjaga jika informasi-si-informasi yang berlebihan tidak media sosial tidak ditentah-mentah sebagai keharuan," kata Guru Besar UIN Ar-Raniry Komarudin Hidayat.

Ketua Umum Pengurus De Nahdliyyah Ulama KH Faid A Saef juga meminta masyarakat untuk menjaga kebenaran. "Kecepatan kita harus kembali pada kebersamaan meskipun berbeda ras, suku, dan agama lainnya."

Pembina Senior Pusat Penelitian Politik (PPP), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris meminta agar Presiden Jokowi berdialog terbuka dan bijak agar negara ini berarah dan demokrasi terpelihara dengan baik. "Presiden haruslah menunjukkan loyalitasnya sebagai gairama dituntut konstitusi dan para pemilihnya," kata Syamsuddin.

BARUNTA/HAMALAH
OSA/CHR/IKI/ESA/SEN
DEA/MDN/HLN/PH



Ulat Video Teknik
"Membaca Para Menteri
Presiden Jokowi
di Kompas.com dan
mabes.com"



Sumber: Kompas.com
Kompas.com dan
Kompas.com

Presiden Punya Data Intelijen

Tudingan Ada Aktor dalam Demo Tak Mendasar

JAKARTA, SOMPAS — Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan Presiden Joko Widodo tidak sembarangan bicara terkait aktor yang menunggangi kerusuhan dalam aksi damai Jumat malam. Presiden punya data, yaitu laporan intelijen, laporan kepolisian, dan lainnya.

"Guei sebati itu, apa yang disampaikan Presiden itu bukanlah sembarangan. Polisi tentu segera menindaklanjutinya dalam waktu dekat ini. Bukan TNI, lho. TNI hanya mengawasi lokasi," ujar Panglima TNI kepada Kompas di Jakarta, Sabtu (3/10) malam.

Saat ditanya apakah Panglima TNI yakin aktor itu ada, Gatot menjawab. Menurut dia, Polri harus segera menindaklanjuti laporan permulaan Presiden bukan

sebagai pernyataan yang bisa menimbulkan masyarakat.

"Bukan jelas. Sebelum, ketika orang itu sepakat untuk datang sebelum shalat Iya bermotif rasa tertak dan damai. Tuntutananya sudah dipenuhi pemerintah. Namun, ada pihak lain yang tetap tidak mau meninggalkan kawasan di depan Istana," ujar Panglima TNI.

Salah besar

Namun, dalam Jumat para Ge-

rasat Nasional Tenggara Ratu Majlis Ulama Indonesia, sebagai gerakan itu. Bahkan, Nabilah menubuhkan pernyataan Presiden yang membolehkan siapa saja boleh datang ke lokasi aksi damai.

"Aktor politik yang dibuktikan oleh Presiden salah besar dan tidak mendasar. Kecuali, Presiden dapat informasi dari intelijen dan memiliki bukti sendiri itu di luar dugaan kami," katanya.

Terlihat upaya rasa damai yang berubah menjadi rusuh. Bahkan, meributkan gerakan yang dipapornya sebagai pemuncu. Front Pembela Islam (FPI) yang menjadi bagian dari gerakan itu justru mencegah kerusuhan terjadi dengan berada di antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan. "Pemuncu kerusuhan adalah

(Bersambung ke hal 15 kel 1-4)

Namun, ketugangan mulai terasa di depan Istana Merdeka sekitar pukul 19.00. Saat itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,unjuk rasa sebenarnya sudah harus berakhir karena sudah melewati pukul 18.00. Namun, saat itu, sebagian peserta masih di depan Istana Merdeka.

Sekitar pukul 20.00, keributan terjadi di depan Istana Merdeka. Aparat keamanan terlibat bentrok dengan sebagian pengunjung rasa yang masih berada di tempat itu. Keributan juga terjadi di kawasan Luar Batang, Penjajingan, Jakarta Utara.

Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal W Diliwan menuliskan, dalam keributan di sekitar depan Istana Merdeka, dua polisi terluka karena terkena lemparan benda keras dan 18 kendaraan rusak dengan dua di antaranya kendaraan polisi dibakar massa.

Sekitar pukul 21.00, suasana di sekitar Istana Merdeka dapat dikendalikan. Pengunjuk rasa meninggalkan tempat itu menuju Kompleks MPR/DPD/PPD dan berencana menginap di tempat itu. Namun, hingga pukul 23.45, massa belum dapat masuk Kompleks Parlemen yang dijaga aparat keamanan. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempersilakan pengunjuk rasa untuk beristirahat dan menginap di Kompleks Parlemen.

Kesepakatan

Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi sejumlah menteri, Panglima TNI, Kapolri, serta anggota DPR dan DPD, kemarin sekitar pukul 17.33, menerima tiga tokoh wakil pengunjuk rasa. Mereka adalah KH Bachtiar Nashir, Ustaz M Zaitun Rasmin, dan Ustaz Misbachul Anam.

“Kami sudah berbicara dengan teman-teman yang mewakili massa yang luar biasa banyaknya. Kesimpulannya ialah dalam hal Saudara Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), kita akan laksanakan dengan hukum yang tegas dan cepat. Oleh Kapolri dijanjikan selesai dalam dua minggu pelaksanaan hukum yang cepat itu sehingga semua berjalan sesuai aturan, tetapi dengan tegas,” ujar Kalla setelah sekitar 30 menit bertemu dengan wakil pengunjuk rasa.

Perbedaan antara Wapres dan wakil pengunjuk rasa ini terjadi setelah dilakukan tiga kali negosiasi. Sebelumnya pada pukul 15.35, Bachtiar bersama wakil pengunjuk rasa yang lain menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan minta agar diterima Presiden untuk menyampaikan langsung tuntutan agar kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki segera dituntaskan tanpa intervensi Presiden.

Namun, saat itu Presiden masih di Bandara Soekarno Hatta. Wiranto menjelaskan, Presiden telah menyetujui untuk menerima wakil pengunjuk rasa.

User Name : User Swalayan 1
Job ID : 226906

P U S A T I N F O R M A S I K O M P A S
Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10172
Telp. 5247710, 5247720, 5247730, 5247740
Fax. 5247743

KOMPAS Sabtu, 05-11-2016. Halaman: 01, 15
Presiden: Akto Politik Menanggapi
Ucapkan Terima Kasih pada Ulama, Kiai, dan Habib
Presiden: Akto Politik Menanggapi
Ucapkan Terima Kasih pada Ulama, Kiai, dan Habib
JAKARTA, KOMPAS.com -- Presiden Joko Widodo mengucapkan
terima kasih kepada ulama, kiai, habib, dan ustad sehingga
unjuk rasa terkait kasus dugaan penistaan agama yang
dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja
Purnama berjalan tertib dan damai pada Jumat (4/11).

Namun, Presiden menyesalkan kerusuhan yang terjadi setelah
aksi damai itu pada Jumat malam. Saat itu, aksi unjuk rasa
seharusnya sudah bubar dan tuntutan pengunjuk rasa yang
meminta penanganan hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama
dilakukan secara tegas, cepat, dan transparan sudah
disepekan pemerintah.

“Dan (kerusuhan) ini kita lihat telah dirunggangi oleh
aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi,” kata
Presiden di Istana Merdeka, Sabtu (5/11), sekitar pukul
09.15.

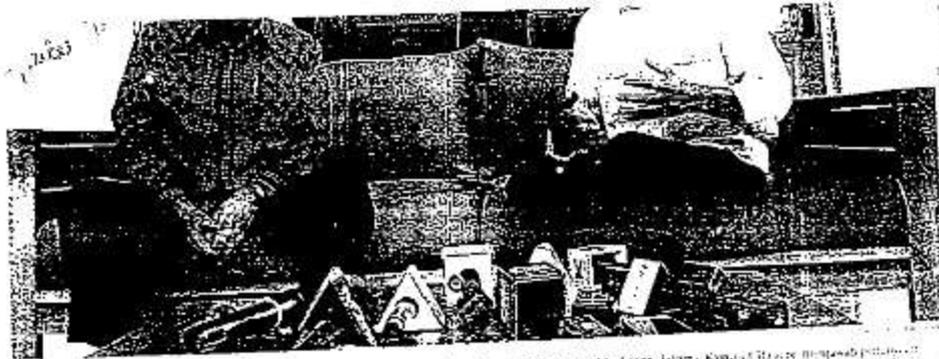
Pernyataan ini disampaikan Presiden usai rapat koordinasi
terbatas di Istana Merdeka. Hadir dalam rapat itu sejumlah
menteri, Panglima TNI Jenderal Gatot Mulyanto, Kepala Polri
Jenderal (Pol) Tito Karnavian, dan Kepala Badan Intelijen
Negara Budi Gunawan. Semalam, Presiden memasuki Kompleks
Istana Kepresidenan Jakarta pada pukul 22.30.

Pada kesempatan itu Presiden juga mengucapkan terima kasih
dan mengapresiasi langkah aparat keamanan yang telah menjaga
unjuk rasa sehingga bisa berjalan aman dan tertib hingga
Jumat sore.

Kasih normal

Sebelumnya, sekitar pukul 11.00, Presiden meninggalkan
Istana Kepresidenan Jakarta menuju Kompleks Bandara
Soekarno-Hatta di Cengkareng untuk meninjau proyek
pembangunan kereta bandara, lalu mengunjungi Garuda
Maintenance Facility.

Aksi damai yang dimulai pada Jumat siang ini membuat
sejumlah ruas jalan di Jakarta tampak relatif lengang
sepanjang kemarin. Namun, aktivitas ekonomi tetap berjalan,
sejumlah toko dan pasar tetap buka. Pasar keuangan juga
tidak terlekan.



Presiden Joko Widodo (tengah) Wakil Presiden Jusuf Kalla (di beranda belakang) bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto (kanan) dan Menteri Sekretaris Negara, Pratiwi (di depan) saat menghadiri rapat kabinet terbatas membahas pelaksanaan kebijakan baru yang akan diterapkan pada 1 Desember.

KEBEBAHAN BERPENDAPAT

Presiden dan Wapres Berkantor seperti Biasa

JAKARTA, KOMPAS - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tetap akan ber Kantor seperti biasa seperti yang diumumkan berkeputusan resmi normal meski hari ini ada ancaman aksi teroris karena dengan penutupan agensi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur Jakarta Parama.

"Masyarakat tetap bekerja saja seperti biasa. Yang jelas, saya akan di 'di situ' baru Presiden di Jakarta," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla saat di Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu (4/11/2016).

Presiden dan Wakil Presiden akan bekerja di Gedung DPR/MPR Jakarta dan Wakil Presiden akan bekerja di Gedung DPR/MPR Jakarta.

Presiden dan Wakil Presiden akan bekerja di Gedung DPR/MPR Jakarta dan Wakil Presiden akan bekerja di Gedung DPR/MPR Jakarta.

KRI tetap beroperasi
HAL 28

"Jadi biasa saja. Hari ini ada hari kerja, jadi ada di Gedung DPR/MPR Jakarta," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla saat di Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu (4/11/2016).

Presiden dan Wakil Presiden akan bekerja di Gedung DPR/MPR Jakarta dan Wakil Presiden akan bekerja di Gedung DPR/MPR Jakarta.

Presiden dan Wakil Presiden akan bekerja di Gedung DPR/MPR Jakarta dan Wakil Presiden akan bekerja di Gedung DPR/MPR Jakarta.

REKAYASA LALU LINTAS DEMONSTRASI 4 NOVEMBER 2016 DI JAKARTA



- 1. Tol Transjakarta (Tol Jagorawi) - Tol Transjakarta (Tol Jagorawi) akan beroperasi normal pada 4 November 2016.
- 2. Tol Transjakarta (Tol Jagorawi) - Tol Transjakarta (Tol Jagorawi) akan beroperasi normal pada 4 November 2016.
- 3. Tol Transjakarta (Tol Jagorawi) - Tol Transjakarta (Tol Jagorawi) akan beroperasi normal pada 4 November 2016.
- 4. Tol Transjakarta (Tol Jagorawi) - Tol Transjakarta (Tol Jagorawi) akan beroperasi normal pada 4 November 2016.
- 5. Tol Transjakarta (Tol Jagorawi) - Tol Transjakarta (Tol Jagorawi) akan beroperasi normal pada 4 November 2016.
- 6. Tol Transjakarta (Tol Jagorawi) - Tol Transjakarta (Tol Jagorawi) akan beroperasi normal pada 4 November 2016.
- 7. Tol Transjakarta (Tol Jagorawi) - Tol Transjakarta (Tol Jagorawi) akan beroperasi normal pada 4 November 2016.
- 8. Tol Transjakarta (Tol Jagorawi) - Tol Transjakarta (Tol Jagorawi) akan beroperasi normal pada 4 November 2016.
- 9. Tol Transjakarta (Tol Jagorawi) - Tol Transjakarta (Tol Jagorawi) akan beroperasi normal pada 4 November 2016.
- 10. Tol Transjakarta (Tol Jagorawi) - Tol Transjakarta (Tol Jagorawi) akan beroperasi normal pada 4 November 2016.

Presiden dan Wakil Presiden akan bekerja di Gedung DPR/MPR Jakarta dan Wakil Presiden akan bekerja di Gedung DPR/MPR Jakarta.

Presiden dan Wakil Presiden akan bekerja di Gedung DPR/MPR Jakarta dan Wakil Presiden akan bekerja di Gedung DPR/MPR Jakarta.

Presiden dan Wakil Presiden akan bekerja di Gedung DPR/MPR Jakarta dan Wakil Presiden akan bekerja di Gedung DPR/MPR Jakarta.

Presiden dan Wakil Presiden akan bekerja di Gedung DPR/MPR Jakarta dan Wakil Presiden akan bekerja di Gedung DPR/MPR Jakarta.

Presiden dan Wakil Presiden akan bekerja di Gedung DPR/MPR Jakarta dan Wakil Presiden akan bekerja di Gedung DPR/MPR Jakarta.

Kembali mengingatkan setiap elite politik agar menahan diri.

“Main politik merupakan hak dari setiap elite politik, tetapi hendaknya tetap dalam koridor dan aturan sebatas negara yang berideologi Pancasila,” kata Ade.

(APA/NTA/OSA/AGE/INA/PRN/LAK/ESA/KCS/WIE/BAY/TUM/TKI/WAD/PIN/IKN/MDN/WIN/HAR)

Pilkada Bukan Cuma

HAL 5

Lihat Video Terkait “SBY Bantah Terlibat Unjuk Rasa 4 November” di kompasprint.com/vid/sbybantah4nov

Foto:

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Konvoi kendaraan taktis milik kepolisian melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (2/11). Konvoi kendaraan dilakukan se usai Gelar Pasukan Pengamanan Aksi Unjuk Rasa.

terkait dengan unjuk rasa esok hari. Senin lalu, Presiden Jokowi menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan esok harinya pertemuan antara Presiden dan sejumlah ulama serta pimpinan ormas Islam.

Pada Selasa lalu, presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Setelah itu, Yudhoyono menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Terkait dengan sejumlah pertemuan tersebut, Yudhoyono menilai semuanya baik. "Janganlah kalau ada pertemuan politik yang dilakukan oleh mereka yang berada di luar kekuasaan, lantas dicurigai. Intelijen harus akurat. Jangan berkembang menjadi intelijen agawur dan main tuduh," kata Yudhoyono di rumahnya di Cikeas, Bogor, kemarin.

Jika dikaitkan dengan situasi sekarang, kata Yudhoyono, informasi atau analisis intelijen yang menuduh seperti itu sangat berbahaya. "Menuduh seseorang, menuduh sebuah kalangan, menuduh sebuah partai politik melakukan seperti itu, saya kira itu fitnah. Fitnah lebih kejam dibandingkan dengan pembunuhan," ujarnya dalam pidato yang disampaikan sekitar 48 menit itu.

Wiranto mengatakan tidak perlu menanggapi pernyataan Yudhoyono tersebut. "Tidak perlu saya elaborasi pernyataan Pak Yudhoyono. Saya tidak perlu menilai karena dia juga mantan pejabat, tahu apa yang diucapkan," ujarnya.

Ketua Partai Golkar Yorrys Kawayal berpendapat, Yudhoyono tidak perlu secara defensif mengklarifikasi sesuatu yang disebutnya sebagai informasi intelijen. Sebab, selama ini belum pernah ada tuduhan langsung terkait sosok di balik aksi unjuk rasa 4 November.

Terkait dengan pernyataan Yudhoyono yang menilai intelijen tidak akurat dengan menyebut ada partai politik di balik unjuk rasa 4 November, Ketua Partai Nasdem Taufik Basari menutarakan, Yudhoyono seharusnya bisa memilah informasi dan tidak memberikan pernyataan yang membingungkan rakyat.

Isi pidato Yudhoyono di Cikeas itu, menurut Taufik, akhirnya terialu berlebihan, tidak menunjukkan sikap kenegarawan, dan justru memanasakan situasi.

Ketua Partai Hanura Sariluddin Sudding menilai sikap Yudhoyono ini kontras dengan sikap Prabowo yang merupakan rival dari Jokowi pada Pemilu Presiden 2014, yang justru mampu memberikan pesan sejuk kepada masyarakat.

"Kami menghargai pandangan Yudhoyono. Namun, sebagai tokoh bangsa, Yudhoyono seharusnya ikut mengambil peran menciptakan suasana yang kondusif," ujarnya.

Sementara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin

Waktu Kerja : Hari Swabayan 1
Job ID : 1226904

P U S A T I N F O R M A S I K O M P A S
Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10272
Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5347740
Fak. 5347743

KOMPAS Kamis, 03-11-2016. Halaman: 11, 13

Kebebasan Berpendapat

Pemerintah Jamin Keamanan Masyarakat

Kebebasan Berpendapat

Pemerintah Jamin Keamanan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS andash; Masyarakat tak poria resah terhadap unjuk rasa terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama yang digelar esok. Pemerintah menjamin keamanan masyarakat.

andquo;Besok beraktivitas saja seperti biasa. Pokoknya besok aktivitas normal, andquo; kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/11).

Sekitar 4.000 personel terdiri dari aparat Polri, TNI, dan satpol PP, kemarin, melakukan apel gelar pasukan di Lapangan Monas, Jakarta. Mereka bagian dari sekitar 16.000 aparat yang besok mengemankan aksi unjuk rasa. Hadir dalam apel ini, Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal Gatot Soesantyo.

Menurut Kapolri, sesungguhnya sudah tidak ada alasan untuk berunjuk rasa karena Presiden Joko Widodo sudah menyatakan tidak akan mengintervensi proses hukum terhadap kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Basuki. Polri juga sedang mengusut kasus itu.

Namun, Kapolri mengatakan, unjuk rasa tersebut tidak dilarang karena merupakan hak warga negara yang dijamin konstitusi dan Kovenan Internasional untuk Hak Sipil dan Politik. Namun, unjuk rasa tersebut harus berlangsung damai dan tidak anarki.

andquo;Apabila demo meningkat menjadi anarki bahkan radikal, yang kami lindungi adalah rakyat Indonesia, di mana pun berada, jangan sampai terkena dampak anarki dan radikal tersebut, andquo; kata Panglima TNI kepada pasukannya.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiyono menuturkan, pengamanan tidak hanya terpusat di lokasi unjuk rasa, yaitu kawasan Istana Presiden, tetapi juga di sejumlah lokasi lain. Semua pengamanan itu akan dilakukan melalui cara cara persuasif.

Pertemuan

Sepanjang minggu ini, sejumlah elite politik dan tokoh masyarakat melakukan pertemuan yang sebagian di antaranya

2 September 16

Surabaya 121 1545781
Dilihat: www.kompas.com
Kontak: korpang@kompas.com
Telepon: Jakarta 021 571 0123
Korwil: 021 527 4633
Layanan Pelanggan 021 5671 000
Harga langganan Rp 94000 -
Harga eceran Rp 4.000



Didatal Utama SBY Said Agil Syur, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto; Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin, hadir dalam pertemuan antara lain, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hasybiyeh dan Ketua Umum Tablighiyah Pengurus Besar

Presiden Tidak Akan Intervensi

SBY Temui Wapres dan Wiranto

JAKARTA, KOMPAS - Presiden Joko Widodo tak akan mengintervensi penanganan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahjaja Purnama. Presiden juga tak menghalangi aksi unjuk rasa, tetapi hal itu harus dilakukan secara damai dan sesuai aturan.

Presiden meyakini, ulama se-
lah membawa kabar baik serta
mengaji dan memberikan van-
nitas kepada umat.
"Mantab bersama-sama kita
jaga, kita pelepas, kita perju-
angkan kemerdekaan kita," ujar
Presiden saat bertemu sejumlah
ulama dan pemimpin organisasi
masjid di Istana Merdeka,
Jakarta, Selasa (14/9).

Selain Ketua Umum Majelis
Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf
Amin, hadir dalam pertemuan
antara lain, Ketua Umum Pem-
impinan Pusat Muhammadiyah
Hasybiyeh dan Ketua Umum
Tablighiyah Pengurus Besar

Nahdlatul Ulama Said Agil Syur.
Sementara Presiden didampingi
Menteri Sekretaris Negara
Pradono, Menteri Koordinator
Politik, Hukum, dan Keamanan
Wiranto, serta Menteri Agama
Lukman Hakim Saifullah.

Final

Sebelum pertemuan, Ma'ruf
mengatakan, bagi ulama, Negara
Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) adalah final. Ulama tidak
akan memberikan toleransi ter-
hadap siapa saja yang akan me-
nancam NKRI.

Berita.com/2016/09/14/

Lihat Video Terkait "Temu Presiden Joko Widodo dan Prabowo" di kompasprint.com/vod/jokowikeprabowo

Foto:

KOMPAS WISNU KIDIANTRAJ

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto (kanan) menyempatkan diri berkuda bersama di sela-sela pertemuan mereka di Fedepokan Garuda Yaksa Bojone Karang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (11/10). Selain sebagai bentuk silaturahmi, pertemuan itu juga untuk mendiskusikan sejumlah masalah di Indonesia.

Pelgras 9 Juli 2014. Pertemuan pertama terjadi saat mereka memenui undangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berbuka puasa bersama di Istana Negara, Kompleks Istana, Minggu malam (Kompas, 21/7/2014).

Pertemuan kedua terjadi ketika Jokowi, presiden terpilih, mengunjungi Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-63 (Kompas, 18/10/2014). Ketika itu, Prabowo mengundang Jokowi untuk datang ke Hambalang, yang dipelukinya kemarin siang.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Idris mengatakan, pertemuan kedua tokoh dapat melahirkan banyak solusi untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Namun, kata Fadli, kehadiran Presiden di Hambalang tidak akan mengubah sikap kritis Gerindra terhadap pemerintah.

Sementara itu, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komaruddin meminta para pemimpin lembaga tinggi negara dan elite politik tidak memperkeruh suasana dengan melontarkan pernyataan yang bersifat memanas-memansi situasi menjelang rencana aksi unjuk rasa 4 November mendatang. Para elite politik diharapkan bisa menahan diri dengan tidak ikut berunjuk rasa.

“Elite politik dan semua warga negara harus sadar, negara saat ini dalam keadaan sulit, situasi pelik. Untuk bisa bertahan, fondasi negara harus kokoh. Jangan sampai dirusak untuk kepentingan tertentu. Saya imbau kepada semua elite politik untuk menahan diri demi kepentingan bangsa,” kata Ade.

Ade mengapresiasi langkah Presiden Jokowi dan Prabowo yang bertemu untuk membahas berbagai masalah kebangsaan, termasuk mengenai aksi unjuk rasa 4 November mendatang.

Secara terpisah, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan mengatakan, semua orang punya hak untuk menyatakan pendapat dan berdemonstrasi. Namun, terkait agenda pilkada yang belakangan ini membawa sentimen isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), Zulkifli berharap hal itu dapat diselesaikan dalam ranah penegakan hukum saja.

“Yang mau unjuk rasa silakan sampaikan pesan dengan damai, tidak bisa juga dilarang-larang. Namun, jangan ada pernyataan aneh-aneh yang membawa isu sensitif seperti SARA. Kalau saya sendiri tidak akan ikut berpartisipasi dalam aksi, biar penegak hukum yang bekerja,” kata Zulkifli, yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional.

(ITA/SAN/SOH/AGE/APA)

Pesan Kesejukan

Hal 5

Suarakan komentar Anda mengenai artikel ini dan baca di kompasprint.com

Juga berpesan agar rakyat membentengi setiap upaya yang dapat memecah belah bangsa. Kita harus jaga jangan sampai ada, katakanlah, unsur-unsur yang mau memecah belah bangsa. Itu yang sangat kita jaga. Kita negara yang majemuk. Kita negara banyak suku, banyak agama, banyak lidah, semua, kalau ada masalah, mari lah kita berunding dengan bijak, jangan marah, tidak ujar Prabowo.

Yogyakarta, 10 Februari

Prabowo menegaskan bahwa hubungannya dengan Presiden Jokowi relatif baik. Komunikasi tetap dilakukan meski terkadang Partai Gerindra berbeda pendapat, bahkan menyampaikan kritik keras kepada pemerintah. Kita Pak, kadang-kadang Gerindra keras karena kami tanggung jawab kepada konstituen. Tapi, di ujung, kita punya kepentingan yang sama, NKRI. Kita ingin menjaga NKRI. Kita Prabowo.

Sesudah dengan Prabowo, Presiden Jokowi berpesan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi. Presiden juga meminta kepada para tokoh bangsa agar bersedia bersama-sama mendinginkan suasana pilkada serentak 2017. Rivalitas yang ada janganlah dijadikan bibit permusuhan yang merusak bangsa kemudian hari.

Saya kira tadi kita di dalam sampai tertawa bersama. Rivalitas itu ada sampai pada saat Pemilihan Presiden (2014). Itulah demokrasi. Tapi, setelah itu, kita bersama bahu-membahu membangun negara dari segala sisi. Saya kira ini yang kita sampaikan. Mungkin nanti tahun 2019 bisa saja ada rivalitas lagi, tetapi (sambilnya) nanti bahu-membahu lagi. ujar Presiden.

Sebelumnya, setelah menghadiri acara peringatan Hari Menabung Sedunia dan peluncuran kampanye gerakan "Ayo Menabung" di Balai Sidang Jakarta, Presiden menegaskan, pemerintah menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat. Namun, Presiden mengingatkan, kegiatan penyampaian pendapat harus mengutamakan ketertiban umum dan tidak melakukan tindakan anarkistis.

Presiden juga menegaskan, berpendapat di media sosial merupakan bagian dari demokrasi. Akan tetapi, Presiden mengingatkan, berbicara di media sosial ada batas-batasnya, etika, dan sopan santun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Demonstrasi ini merupakan hak demokratis setiap warga. Silakan, boleh-boleh saja demonstrasi. Tapi, yang penting jangan memaksakan kehendak, atau yang merusak, yang anarkistis. Ini yang tidak boleh. Kita Presiden menjawab pertanyaan wartawan. Saya sudah memerintahkan kepada aparat keamanan untuk melakukan tugasnya secara profesional. ujar Presiden.

Pertemuan ketiga

Pertemuan Jokowi dan Prabowo di Sembelung ini merupakan pertemuan yang ketiga kalinya setelah pemungutan suara

User Name : User Swayanan 1
Job ID : 218901

P H S A T I D E J A W A S A I K A N I S A N
Palmerah Selatan Lt - 104 Jakarta, 10170
Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5347740
Fax. 5347743

KOMPAS Selasa, 11-11-2016, Halaman 07, 10
Elite Patut Jaga Kemajemukan
Untuk Ketiga kalinya, Presiden Joko Widodo Bertemu Prabowo
Subianto

Elite Patut Jaga Kemajemukan
Untuk Ketiga kalinya, Presiden Joko Widodo Bertemu Prabowo
Subianto

BOGOR, KOMPAS — Para tokoh elite nasional patut ikut menyelesaikan masalah kebangsaan dengan damai dan sejuk. Keterlibatan mereka, dari kalangan agama hingga politik, sangat penting dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan dan kemajemukan Indonesia.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 101 daerah hendaknya menjadi pesta demokrasi yang berjalan damai dan tenteram tanpa upaya memecah belah. Salah satu agenda demokrasi lokal ini sepatutnya memperkuat struktur makro bangsa dan kebangsaan, politik nasional, serta iklim ekonomi yang kondusif untuk membawa Indonesia memenangi kompetisi global.

Presiden Joko Widodo membahas hal itu saat mengunjungi Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto di kediamannya yang asri di Desa Bojong Koneng, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (31/10) siang. Presiden, Prabowo, dan para tamu menikmati nasi goreng dalam pertemuan yang penuh keakraban itu. Perlemuan berlangsung sejak pukul 12.39 hingga 14.39.

Presiden didampingi Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Padjajalan dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Adapun Prabowo didampingi, antara lain, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Yusuf AR, Wakil Ketua Umum Bidang Kaderisasi dan Informasi Partai Gerindra Sugiono, dan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rostada.

Sesuai makan siang, Prabowo menemani Presiden mendengar menunggang kuda sebentar. Keduanya kemudian menemui wartawan untuk memberikan pernyataan bersama.

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengungkapkan pandangannya terhadap pilkada serentak tahun 2017, yang juga berlangsung di Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta.

Prabowo mengatakan, dirinya selalu berharap agar pelaksanaan pesta demokrasi rakyat berjalan tenang baik dan tentram. Ia

Tegakkan Hukum untuk Semua...



APEL SIAGA sejumlah pasukan TNI mengawali Apel Siaga Kebangsaan di Lapangan Gasca, Kota Bandung, Kamis (11/11). Apel dengan pembina-pembina Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan dalang tunggal dengan amanat serta pengumuman, akan dimulai 2 November 2012.

Presiden: Tetap Tenang

● **WALIKOTA** - 980 21000
2012/11/11 - 09:02

**Panglima TNI me-
minta warga berpra-
sangka baik terhadap
penguji rasa.**

JAKARTA — Presiden Joko Widodo menegaskan, masyarakat tak perlu merasa dan ketakutan berlebihan menjelang pemilu yang akan berlangsung di seluruh provinsi pada Jumat (14/11). Jokowi meminta warga Jakarta tetap tenang di hari seperti biasa.

"Tidak ada alasan untuk merasa takut dan khawatir menjelang pemilu," kata Jokowi dalam siaran pers yang diunggah di akun Twitternya, @jokowi, Kamis (11/11).

Jokowi mengatakan, pemilu adalah momen yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Dia meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh berita-berita yang tidak jelas atau provokatif.

"Kita harus tetap tenang dan percaya diri. Jangan mudah terprovokasi oleh berita-berita yang tidak jelas atau provokatif," kata Jokowi.

Presiden Jokowi juga menegaskan, pemerintah akan memastikan pemilu berjalan dengan lancar dan aman. Dia meminta masyarakat untuk tetap tenang dan percaya diri.

"Kita harus tetap tenang dan percaya diri. Jangan mudah terprovokasi oleh berita-berita yang tidak jelas atau provokatif," kata Jokowi.

Presiden Jokowi menegaskan, masyarakat tak perlu merasa dan ketakutan berlebihan menjelang pemilu yang akan berlangsung di seluruh provinsi pada Jumat (14/11). Jokowi meminta warga Jakarta tetap tenang di hari seperti biasa.

"Tidak ada alasan untuk merasa takut dan khawatir menjelang pemilu," kata Jokowi dalam siaran pers yang diunggah di akun Twitternya, @jokowi, Kamis (11/11).

Jokowi mengatakan, pemilu adalah momen yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Dia meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh berita-berita yang tidak jelas atau provokatif.

"Kita harus tetap tenang dan percaya diri. Jangan mudah terprovokasi oleh berita-berita yang tidak jelas atau provokatif," kata Jokowi.

Presiden Jokowi juga menegaskan, pemerintah akan memastikan pemilu berjalan dengan lancar dan aman. Dia meminta masyarakat untuk tetap tenang dan percaya diri.

"Kita harus tetap tenang dan percaya diri. Jangan mudah terprovokasi oleh berita-berita yang tidak jelas atau provokatif," kata Jokowi.

Presiden Jokowi menegaskan, masyarakat tak perlu merasa dan ketakutan berlebihan menjelang pemilu yang akan berlangsung di seluruh provinsi pada Jumat (14/11). Jokowi meminta warga Jakarta tetap tenang di hari seperti biasa.

"Tidak ada alasan untuk merasa takut dan khawatir menjelang pemilu," kata Jokowi dalam siaran pers yang diunggah di akun Twitternya, @jokowi, Kamis (11/11).

Jokowi mengatakan, pemilu adalah momen yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Dia meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh berita-berita yang tidak jelas atau provokatif.

"Kita harus tetap tenang dan percaya diri. Jangan mudah terprovokasi oleh berita-berita yang tidak jelas atau provokatif," kata Jokowi.

Presiden Jokowi juga menegaskan, pemerintah akan memastikan pemilu berjalan dengan lancar dan aman. Dia meminta masyarakat untuk tetap tenang dan percaya diri.

"Kita harus tetap tenang dan percaya diri. Jangan mudah terprovokasi oleh berita-berita yang tidak jelas atau provokatif," kata Jokowi.

Presiden Jokowi menegaskan, masyarakat tak perlu merasa dan ketakutan berlebihan menjelang pemilu yang akan berlangsung di seluruh provinsi pada Jumat (14/11). Jokowi meminta warga Jakarta tetap tenang di hari seperti biasa.

"Tidak ada alasan untuk merasa takut dan khawatir menjelang pemilu," kata Jokowi dalam siaran pers yang diunggah di akun Twitternya, @jokowi, Kamis (11/11).

Jokowi mengatakan, pemilu adalah momen yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Dia meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh berita-berita yang tidak jelas atau provokatif.

"Kita harus tetap tenang dan percaya diri. Jangan mudah terprovokasi oleh berita-berita yang tidak jelas atau provokatif," kata Jokowi.

Presiden Jokowi juga menegaskan, pemerintah akan memastikan pemilu berjalan dengan lancar dan aman. Dia meminta masyarakat untuk tetap tenang dan percaya diri.

"Kita harus tetap tenang dan percaya diri. Jangan mudah terprovokasi oleh berita-berita yang tidak jelas atau provokatif," kata Jokowi.



TEMU ULAMA - Para pemimpin ulama, ulama, dan Majelis Ulama Indonesia bertukar pikiran dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Sabtu. Dalam pertemuan itu, ulama mendesak agar pemerintah segera mengakhiri pelaksanaan kebijakan pembatasan ibadah pada Idul Adha.

Ulama Imbau Unjuk Rasa Damai

Prosidien berjam-jam tak kunjung selesai. Tak ada titik.

MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) menggelar pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (2/11/2020). Pertemuan itu berlangsung selama lebih dari dua jam. Para ulama mendesak agar pemerintah segera mengakhiri pelaksanaan kebijakan pembatasan ibadah pada Idul Adha.

Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah akan segera mengakhiri pembatasan ibadah pada Idul Adha. Namun, ulama mendesak agar pemerintah segera mengakhiri pelaksanaan kebijakan pembatasan ibadah pada Idul Adha.

Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah akan segera mengakhiri pembatasan ibadah pada Idul Adha. Namun, ulama mendesak agar pemerintah segera mengakhiri pelaksanaan kebijakan pembatasan ibadah pada Idul Adha.

Ulama mendesak agar pemerintah segera mengakhiri pelaksanaan kebijakan pembatasan ibadah pada Idul Adha. Mereka khawatir, pembatasan ibadah akan menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam.

Ulama mendesak agar pemerintah segera mengakhiri pelaksanaan kebijakan pembatasan ibadah pada Idul Adha. Mereka khawatir, pembatasan ibadah akan menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam.

Ulama mendesak agar pemerintah segera mengakhiri pelaksanaan kebijakan pembatasan ibadah pada Idul Adha. Mereka khawatir, pembatasan ibadah akan menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam.

Ulama mendesak agar pemerintah segera mengakhiri pelaksanaan kebijakan pembatasan ibadah pada Idul Adha. Mereka khawatir, pembatasan ibadah akan menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam.

Ulama mendesak agar pemerintah segera mengakhiri pelaksanaan kebijakan pembatasan ibadah pada Idul Adha. Mereka khawatir, pembatasan ibadah akan menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam.

Ulama mendesak agar pemerintah segera mengakhiri pelaksanaan kebijakan pembatasan ibadah pada Idul Adha. Mereka khawatir, pembatasan ibadah akan menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam.

Ulama mendesak agar pemerintah segera mengakhiri pelaksanaan kebijakan pembatasan ibadah pada Idul Adha. Mereka khawatir, pembatasan ibadah akan menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam.

Ulama mendesak agar pemerintah segera mengakhiri pelaksanaan kebijakan pembatasan ibadah pada Idul Adha. Mereka khawatir, pembatasan ibadah akan menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam.

Ulama mendesak agar pemerintah segera mengakhiri pelaksanaan kebijakan pembatasan ibadah pada Idul Adha. Mereka khawatir, pembatasan ibadah akan menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam.

Ulama mendesak agar pemerintah segera mengakhiri pelaksanaan kebijakan pembatasan ibadah pada Idul Adha. Mereka khawatir, pembatasan ibadah akan menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam.

depth
Jurnal Lintas
Temulitama

Pesan Aksi Tersampaikan

● RATNA JENG TEJOMUKTI, WAHYU SURYANA

NU dan Muhammadiyah mengapresiasi aksi damai "Bela Islam".

JAKARTA — Aksi damai "Bela Islam" besar-besaran sepanjang Jumat (4/11) yang berjalan tertib diapresiasi berbagai kalangan. Setelah aksi yang menunjukkan persatuan tersebut, umat Islam diminta ikut mendinginkan tensi dan memberikan keteladanan dengan bersabar.

PB Nahdlatul Ulama (NU) dan PP Muhammadiyah sekaligus menulis pernyataan resmi mengapresiasi aksi tersebut, kemarin. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, seluruh umat Islam harus menunjukkan ikhtidak dan sikap baik serta percaya bahwa pesan aksi pada 4 November 2016 telah tersampaikan.

"Perayaan penanganan kasus tersebut sepenuhnya kepada pihak kepolisian sesuai dengan tugas dan kewenangannya," ujar dia dalam siaran pers yang diterima *Republika*, Ahad (6/11). Setelah menyampaikan aspirasinya di seluruh Indonesia,

Haedar berharap umat Islam dapat mendinginkan suasana sebagaimana yang ditunjukkan Rasulullah SAW.

Ia meminta Muslim menunjukkan sikap damai yang menebarkan suasana aman, tenang, dan sejuk. Umat Islam harus dapat membuktikan dalam keadaan apa pun, mampu memberikan uswah hasanah atau suri teladan yang baik.

Haedar juga mengimbau umat Islam untuk menghindari ujaran-ujaran dan imbauan-imbauan yang dapat memanaskan situasi dan berpotensi provokasi. Sebaliknya, Muslim diminta agar jangan terpancing provokasi siapa pun dan ajas damai apa pun.

Haedar juga berpesan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan jajaran agar penanganan kasus penistaan agama harus benar-benar dilakukan tegas, cepat, dan transparan. "Jangan hal-hal yang dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan publik," kata dia.

Sebelumnya, Haedar juga menegaskan, aksi damai tersebut adalah aspirasi umat Islam secara keseluruhan. Ia menolak bila aksi tersebut hanya dilihat sebagai aspirasi golongan Islam tertentu, apalagi yang dikonotasikan garis keras.

Sedangkan, surat pernyataan yang dibacakan NU ditandatangani Ketua

Umum PBNU Said Agil Siraj dan Sekjen PBNU Faishal Zaini. "Kami mengapresiasi Aksi Damai 4 November tentu hendak meluruskan etika berpolitik para pemimpin," seperti tertulis dalam poin pertama pernyataan sikap yang diterima *Republika* dari bagian humas PBNU tersebut.

Soal keributan di ujung aksi damai, PBNU mencurigai hal itu dilakukan kelompok yang ingin merusak kemurnian dan niat suci dari tujuan aksi damai. Meski begitu, PBNU menyangkan kelambanan pemerintah melakukan komunikasi politik dengan rakyat.

Aksi "Bela Islam" pekan lalu menuntut kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, diproses secara hukum. Secara institusional, PBNU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia tak ikut serta aksi "Bela Islam" pekan lalu. Mereka mengizinkan para kader ikut serta, tapi melarang atribut ormas masing-masing dibawa-bawa. Sikap serupa diambil PP Muhammadiyah.

Kendati demikian, dalam aksi damai yang diikuti ratusan ribu orang itu banyak kader yang menunjukkan afiliasi dengan kedua ormas tersebut berpartisipasi. Aksi damai terbesar dalam sejarah Indonesia itu sempat

dirusak sejumlah oknum pada malam hari, selepas sebagian besar peserta pulang. Meski begitu, insiden bentrokan dengan petugas kepolisian dan pembakaran sejumlah kendaraan polisi tak berlanjut lebih jauh.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga mengapresiasi aksi unjuk rasa pekan lalu. Ia berharap ketertiban serupa bisa dipelihara pada masa-masa mendatang.

Sedangkan, Ustaz Arifin Ilham, salah satu pimpinan massa aksi damai pekan lalu, menyatakan, apapun hasilnya, tidak ada kesia-siaan atas upaya ratusan ribu orang yang membela kitab Alquran. Ia menilai persatuan yang ditunjukkan pekar lalu adalah kemenangan tersendiri bagi umat.

Setelah itu, ia menginginkan umat Islam menunjukkan kesabaran. "Subhanallah wa bismillah. Setelah aksi damai, semua umat harus kembali bersabar dan sabar itu juga pintu kemenangan," katanya.

Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) Bachtiar Nasir juga mengatakan, aksi 4 November 2016 sebagai kemenangan umat. "Kita sudah menang karena kita sudah melakukannya dengan cara manusiawi yang adil dan beradab," ujarnya dalam siaran resmi, kemarin.

■ Santo Agustinus, satrio
ed: fening zamzami

Indepth

DPR: Umumkan
Aktor Politik

Him-9



Jokowi Janji tak Lindungi Ahok

● NALDARUS SARIHAN, RAZUQI HUSRIQ

Muhammadiyah meyakini kepolisian tak masuk area tafsir.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengajukan tak akan melindungi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang saat ini tengah diproses hukum terkait dengan pemertan agama. Hal tersebut diungkapkan Presiden usai melakukan pertemuan dengan pimpinan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah di Jakarta, Selasa (8/11).

"Telu rakyat tahu, saya tidak akan melindungi Sandan Bupati Tjahja Purnama karena sudah masuk pada pita hukum," ujar Jokowi selepas pertemuan tersebut. Saat melakukan pertemuan tersebut dengan pimpinan PP Muhammadiyah, Presiden menegaskan bahwa akan melakukan penegakan hukum dalam kasus Ahok secara profesional dan transparan.

Laporan atas dugaan pemertan agama yang dilakukan Ahok terkait dengan pernyataan di Pengadilan Syariah, September lalu. Dalam kunjungan itu, Ahok terkejut meminta warga jangan menditeling "polisi"

arah ah blindah ayat 3.

Pada Jumat (4/11), ratusan ribu Muslim melakukan aksi menuntut pemerintah terkait urusan Ahok. Aksi yang berlangsung damai itu dimediasi Kerucutan Setela, tak ada kepasian bahwa Presiden bersedia menerima perwakilan pengunjuk rasa.

"Sebelum kunjungan ke sini, Jokowi menjadi sangat lelak, lelak saat ketibaannya, baik saat masuk ke gedung," ujar kerucutan Setela yang berada di Gedung MPR di Gedung MPR.

Kritik yang membuat Jokowi lamban beres di Gedung MPR. Nalidarus Sarihan, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), menilai Jokowi menunjukkan ketidaksiannya atas sikap pemerintah, yang dia anggap semakin menyalah. Ahok sebagai raja dan berkeadilan, sedang ini semua urusan Islam.

Nata Umar, PP Muhammadiyah Haidar Nasir mengungkapkan kekecewaan yang dirasakan, bahwa pemerintah Ahok. Dalam pertemuan, Muhammadiyah tak pernah menuntut Presiden Jokowi untuk mempolitikkan pemerintahan tersebut dalam pemerintahan. "Kita menganggap ini soal politik, bukan masalah agama, bukan soal agama, yang masyarakat tak dapat menditelingi soal agama," ujar Nata.

Basuki Tjahaja Purnama," kata dia. Meski begitu, ia juga meminta kepolisian untuk tidak membuat tafsir-tafsir perkara pemertan agama dan Alquran. "Pak Kapulu (Jenderal Tito Karnavian) jangan usak karena tafsir tersebut agar tidak menimbulkan prasangka, baik besar, atau lebih-lebih malah bisa menimbulkan prasangka lagi dan nanti menimbulkan masalah," ujarnya.

Di hadapan perwakilan pemertan agama ini dapat ditunjukkan agar bangsa Indonesia dapat fokus pada persoalan lain yang lebih mendasar. "Kita harus melihat ke depan, jangan habiskan energi di permasalahan,"

Pemertan

Sementara itu, setelah menerima Ahok pada Senin (7/11) sebagai gubernur, Jokowi telah mendirikan pelapor untuk diperiksa kembali. Pihak pelapor yang diperiksa adalah pengurus Angkatan Muda Muhammadiyah serta Tim Abukasi Furus Adh. Peristiwa Agama (FAPA).

Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah, Prati Kusuma, menilai di antara beberapa pernyataan, bahwa Ahok memertan agama. Ia menatahkan, tidak soal kata-kata

Ahok tak membalikan fakta bahwa Ahok memertan sunah al-Quran" dan para ulama, yang menguraikan ayat tersebut.

Ketua Tim Advokasi FAPA Denny Ardiansyah Lubis, menguraikan, pihaknya dimintai keterangan terkait materi keberatan sebelum pihak pelapor. "Di mana tidak ada pemertan pemertan karena sebagai pelapor, itu yang diaman dalam pertemuan. Untuk substitusi, kita sampaikan, plus pernyataan itu pemertan agama," ujar Denny.

Kepolisian juga memeriksa saku ahli dan pihak berkepentingan. Hamka Heng Janggala DPR dari Fraksi PIR yang juga menjadi anggota Dewan Perwakilan Majelis Ulama Indonesia (Majelis Ulama Indonesia) itu ditanyai soal perbedaan pendapat internal, sebelum MUI mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Ahok memertan Alquran dan ulama.

"Caranya panggil semua orang yang dibenci seluruh ah Ahok, dan lakukan aksi pemertan pendapat MUI itu hanya dilakukan secara apolitik berdasarkan pelapor, tidak dihindari terlapor," ujar Hamka. Dalam pemertan, ia berpendapat tak ada pemertan agama dan Ahok. "Di luar dugaan, pengumuman ini di luar perkara ini. Apakah kata Ahok yang memertan agama, yang berarti sebagai, kata dia.

● www.kompas.com



TEMU PERS: Presiden Joko Widodo (kiri) bersama para anggota DPR RI dan Wakil Ketua DPR RI (kanan) dalam pertemuan pers yang berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (7/11/2016). (Foto: Antara)

Ahok Diperiksa 9 Jam

Ahok ditampungi politikus PDIP di ruang pemeriksaan.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Ahok) ditampungi oleh politikus PDIP di ruang pemeriksaan. Hal ini terjadi saat Ahok menjalani pemeriksaan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (7/11/2016). Ahok ditampungi oleh politikus PDIP di ruang pemeriksaan. Hal ini terjadi saat Ahok menjalani pemeriksaan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (7/11/2016).

Pemeriksaan berlangsung selama sembilan jam. Ahok ditampungi oleh politikus PDIP di ruang pemeriksaan. Hal ini terjadi saat Ahok menjalani pemeriksaan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (7/11/2016).

Ahok telah diinterogasi selama sembilan jam. Ahok ditampungi oleh politikus PDIP di ruang pemeriksaan. Hal ini terjadi saat Ahok menjalani pemeriksaan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (7/11/2016).

Penyidik memeriksa Ahok selama sembilan jam. Ahok ditampungi oleh politikus PDIP di ruang pemeriksaan. Hal ini terjadi saat Ahok menjalani pemeriksaan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (7/11/2016).

Presiden Minta Ormas Islam Dinginkan Suasana

● KALIMATUS SALEM

Ormas Islam tetap meminta proses hukum Abok berjalan dengan adil dan tidak pura-pura.

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengungkap para tokoh dari sejumlah ormas Islam ke Istana Merdeka, Rabu (9/11). Kali ini ia melakukan pertemuan dengan tokoh agama dari 17 ormas, antara lain Al Iqad Al Islamiyah, Al Wasliyah, Majelis Rasdullah, Marthabul Anwar, Fatayat NU, Muslimat NU, Gerakan Pemuda Anshar dan Iktan Cendekawan Muslim Indonesia (ICMI).

Presiden mengawali pertemuan tersebut dengan mengucapkan terima kasih pada pimpinan ormas yang mematuinya telah menyebarkan pesan damai saat aksi massa 4 November lalu. Kemudian, Jokowi menegaskan sikapnya atas aksi massa yang menuntut penegakan hukum atas kasus dugaan peristimew agama oleh Basuki Tjahaja Purnama tersebut. Ia menyatakan, pemerintah tak akan melindungi Basuki. Karenanya, Presiden berharap masyarakat tak memisahkan hal tersebut dan mengpercayai proses yang sedang berjalan. "Saya mau ajak kepada seluruh

pimpinan organisasi massa Islam untuk mendinginkan suasana, menungguni keadilan serta mengpercayai tali persatuan, mempererat ikhtimad. Kita selingka kekegagalan-kegagalan di masyarakat bisa kita redakan secepatnya," kata Jokowi.

Ia juga mengajak seluruh umat untuk beristiqomah menajutkan pada warga dunia bahwa rakyat Indonesia bisa hidup rukun dalam keberagaman.

Usai pertemuan, Ketua Umum PB Al Wasliyah Yusuf Anugrah mengatakan agar pemerintah sering memproses kasus dugaan peristimew agama oleh Basuki Tjahaja Purnama.

"Kami siap mengabdikan segala umat Islam, permulaan kami lakukan mana seseorang yang sudah diduga melakukan peristimew agama agar diproses hukum dengan adil, jangan pura-pura," kata Yusuf dalam konferensi pers bersama ormas Islam lain usai bertemu Jokowi.

Ia menyebutkan aksi tanggal 4 November nanti bukan demonstrasi tapi merupakan aksi damai. Aksi damai tidak digenatkan ormas. Kita hanya berharap bahwa ada sesuatu yang harus diberitahukan, umat Islam mempunyai kekuatan kalifa yang menggerakkan itu sehingga tidak terjadi anarki," katanya.

Ia menambahkan secara umum ormas Islam mengapresiasi langkah pemerintah yang akan melaksanakan proses hukum kepada yang bersangkutan.

"Presiden juga mengingatkan tidak

membela dan melindungi Basuki Tjahaja Purnama dalam kasus ini. Kita persiapkan proses hukum berjalan," kata Yusuf.

Nalika ditanya apakah akan ada aksi demonstrasi jika tindak lanjut tidak sesuai harapan, Yusuf mengatakan itu akan ada aksi sesudah belum selesai kepada ormas yang digugat. "Kalau itu belum selesai kepada kami apresiasi pemerintah akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya," katanya.

Ia menyebutkan hingga saat ini belum ada putusan hukum. "Keputusan belum ada, nanti kita lihat, kita lihat nanti bagaimana status," kata

Setelah aksi 4 November, Presiden Jokowi berkeciling ke dua ormas Islam terbesar di Indonesia PBNU dan PP Muhammadiyah. Saat bertemu Pimpinan PBNU Udale Setiwo (7/11) dan PP Muhammadiyah pada Selasa (9/11) Jokowi menyampaikan pesan yang sama.

Jokowi mengucapkan terima kasih kepada PBNU dan Muhammadiyah yang bisa membuat aksi pada 4 November berjalan kondusif dan damai.

Tak ditahan

Sementara itu, Polda Metro Jaya tidak jadi menahan Sekretaris Jenderal Himpunan Mahasiswa Islam (Sekjen PMI) Ami Jaya Hafid, Publika Ami Jaya dan empat kader HMI lainnya sehubungan sudah ditetapkan sebagai narasaksi di kepolisian. Kabid Humas Polda Metro Jaya

Kumbes Ari Setiawan menyangkalkan. Ami Jaya ditepaskan lantaran publik memiliki sejumlah pertimbangan subjektif dalam pilihannya tersebut. Namun, kata dia, status Ami Jaya sesuai tezim.

"Alasannya memang itu alasan subjektif dari penyidik berdasarkan pasal 20 KUHLAP. Penyidikan di pasal 1 terkait penahanan memang tidak perlu," ujar Ari kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Rabu (9/11).

Mezriat Awi, Ami Jaya sudah mengatakan kepada penyidik bahwa dia tidak akan melakukan aksi selama proses hukum kasus dugaan penyerangan terhadap aparat kepolisian saat demo 4 November dan hari-hari selanjutnya.

"Ada jaminan dari beberapa pihak bahwa yang bersangkutan tidak akan melakukan aksi, tidak menghidangkan barang bukti, dan tidak mengganggu peribadinya," ucap Awi.

Tim kuasa hukum kader HMI, Muhammad Syukur Manda mengatakan, penangskapan terhadap lima kader HMI pada Senin (7/11) sangat mahal, tersebut telah dilakukan secara paksa. Ia pun mengportokan bahwa tidak dilakukan dengan cara melayangkan surat penangskapan terlebih dahulu.

"Siapa pun yang ditanya, kami akan polik surat secara baik, kami akan kami. Tapi jangan mengambil secara paksa, apalagi diambil di pinggir jalan, ini tidak bisa ingatkan," katanya.

■ www.republika.co.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Anim Munifah
2. Tempat/Tanggal Lahir : Tuban, 17 Desember 1992
3. NIM : 131211096
4. Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam
5. Alamat : Ds. Sumberarum, RT.01 RW.01, Kec.
Kerek, Kab. Tuban- Jawa Timur
6. Riwayat Pendidikan : MI AL-HIDAYAH 1999-2004
Madrasah Stanawiyah 2004 -2007
Madrasah Aliyah 2008-2012